

SOSIOLOGI

Hukum, Masyarakat, Dan Kebudayaan
Integrasi Nilai Sosial Untuk Pembangunan



Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H. Lahir di Padang Ratu Lampung Utara, 26 Juni 1984. Menamatkan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di tempat kelahirannya di Sungkai Utara. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMU Negeri 44 Jakarta. Penulis adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2007, dan Program Studi Magister

Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia tahun 2012 dan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung selesai tahun 2024. Sejak tahun 2015 menjadi Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Sebelum menjadi Dosen penulis pernah mengabdikan selama delapan tahun di Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat ini penulis juga aktif sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Zainudin Hasan & Partners dan sebagai Advokat di Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Cabang Lampung. Sebagai Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kota Metro, Lampung Tengah, dan Lampung Timur (2019-2023). Sebagai Tim Ahli Hukum Gubernur Lampung (2019-2024), Tenaga Ahli di DPRD Kota Bandar Lampung dan Tenaga Ahli di DPRD Provinsi Lampung (2024). Penulis aktif sebagai peneliti dan penceramah diberbagai seminar ditingkat lokal, nasional dan internasional. Telah banyak menulis opini, artikel, jurnal, dan buku antara lain pada media Lampung Post, Lintas Lampung, Jurnal Pranata Hukum, Jurnal Keadilan Progresif, menulis buku monograf tentang "Perkembangan Hukum di Indonesia" (2017), dan buku tentang "Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba melalui media terapi musik dalam perspektif Pidana Ekonomi" (2018), "Sosiologi; Hukum, Masyarakat, Dan Kebudayaan Integrasi Nilai Sosial Untuk Pembangunan" (2024).



CV. ALINEA EDMEDIA

© alineaedumedia.id
© penerbit.alineaedumedia
© penerbit.alineaedumedia@gmail.com
Anggota IKAPI No. 274/JTE/2023

Sosiologi Hukum, Masyarakat, Dan Kebudayaan
Integrasi Nilai Sosial Untuk Pembangunan

Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H.

SOSIOLOGI

Hukum, Masyarakat, Dan Kebudayaan
Integrasi Nilai Sosial Untuk Pembangunan

Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H



ALINEA
EDUMEDIA

SOSIOLOGI
Hukum, Masyarakat, Dan Kebudayaan
Integrasi Nilai Sosial Untuk Pembangunan

Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H.



PENERBIT
CV. ALINEA EDUMEDIA

SOSIOLOGI
Hukum, Masyarakat, Dan Kebudayaan
Integrasi Nilai Sosial Untuk Pembangunan

Penulis:

Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H.

ISBN:

978-623-89616-1-0

Design Cover:

Debi Setia Aji

Layout:

Nofendy Ardyanto

PENERBIT

CV. ALINEA EDUMEDIA

Alamat Redaksi:

Jl. Kalidonan RT 04 RW 13 Kelurahan Donan,
Kab. Cilacap, Prop. Jawa Tengah

Email : penerbit.alineaedumedia@gmail.com

Website : alineaedumedia.id, Phone : 0823-2610-3344

All right reserved

Cetakan pertama: Desember 2024

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa
izin penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan nikmat dan karunia Nya sehingga buku ajar Sosiologi ini dapat diselesaikan. Buku ajar Sosiologi dengan judul “Sosiologi Hukum, Masyarakat, dan Kebudayaan Integrasi Nilai Sosial untuk Pembangunan”, sebagai bahan ajar pada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

Terima kasih disampaikan kepada Ibu Meita Djohan Oelangan,SH,MH yang telah memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Prof. Dr. Erlina B,SH,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Ibu Recca Ayu Hapsari,SH,MH selaku Ketua Program Study dan Sekretaris Program Study Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk mengajar mata kuliah Sosiologi.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan buku ajar ini untuk itu, kritik dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi mahasiswa khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung, Nopember 2024

Dr. Zainudin Hasan,S.H.,M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENGERTIAN, TUJUAN, DAN OBJEK KAJIAN	
SOSIOLOGI	1
A. Pengantar.....	1
B. Pengertian Sosiologi.....	4
C. Tujuan Dan Manfaat Mempelajari Sosiologi	6
D. Sejarah Sosiologi	8
BAB II TEORI-TEORI SOSIOLOGI.....	42
A. Gambaran Ringkas Sejarah dan Teori Sosiologi	42
B. Teori Sosiologi Klasik.....	45
C. Teori Sosiologi Modern.....	60
D. Teori Sosiologi Postmodern	69
BAB III STRUKTUR SOSIAL.....	74
A. Pengantar	74
B. Kelompok Sosial	74
C. Institusi sosial.....	81
D. Nilai Sosial.....	85
E. Norma sosial	86
F. Stratifikasi Sosial.....	92
BAB IV KEBUDAYAAN DAN MASYARAKAT.....	99
A. Kebudayaan.....	99
B. Masyarakat	112
BAB V INTERAKSI SOSIAL.....	117
A. Pengantar	117
B. Pengertian Interaksi Sosial	118
C. Unsur dan Ciri Interaksi Sosial.....	120
D. Syarat-syarat Interaksi Sosial	121
E. Bentuk-bentuk Interaksi Sosial	124
F. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Interaksi Sosial	129
BAB VI PERUBAHAN SOSIAL	131
A. Pengantar	131
B. Hal-hal Yang Mendorong Dan Menghambat Perubahan..	133
BAB VII PENYIMPANGAN SOSIAL	146
A. Pengantar	146
B. Pengertian Penyimpangan Sosial.....	147

C. Bentuk Penyimpangan Sosial dan Contohnya.....	152
D. Faktor Penyebab Penyimpangan Sosial.....	161
E. Dampak Penyimpangan Sosial.....	165
F. Cara Mencegah Penyimpangan Sosial.....	166
BAB VIII PENGENDALIAN SOSIAL.....	168
A. Pengantar.....	168
B. Pengertian dan Tujuan Pengendalian Sosial.....	169
C. Jenis-jenis Pengendalian Sosial.....	171
D. Cara Pengendalian Sosial.....	173
E. Jenis-jenis Lembaga Pengendalian Sosial.....	176
F. Konformitas.....	186
BAB IX KEKUASAAN, WEWENANG, DAN KEPEMIMPINAN.....	193
A. Pengertian Kekuasaan.....	193
B. Unsur-unsur Kekuasaan.....	195
C. Jenis-jenis Kekuasaan.....	197
D. Cara Mempertahankan Kekuasaan.....	200
E. Saluran-saluran Kekuasaan.....	200
F. Wewenang.....	203
G. Kepemimpinan.....	214
TENTANG PENULIS.....	226
DAFTAR PUSTAKA.....	228

SOSIOLOGI
Hukum, Masyarakat, Dan Kebudayaan
Integrasi Nilai Sosial Untuk Pembangunan

BAB I

PENGERTIAN, TUJUAN, DAN OBJEK KAJIAN SOSIOLOGI

A. Pengantar

Sejak manusia dilahirkan ke dunia ini, timbullah kepedulian terhadap sesama, pertama kepedulian terhadap keluarga, kemudian saudara, tetangga, teman bermain, dan sebagainya, sejak lahir manusia sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk selalu hidup bersama, perhatian tersebut bersifat naluri. Seiring berjalannya waktu naluri tersebut menjadi terstruktur secara sistematis, kemudian muncullah orang-orang yang memikirkan dan mengkaji secara khusus tentang manusia, tingkah lakunya serta hubungan manusia dengan manusia lainnya, baik secara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau antara kelompok dengan kelompok lainnya, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan masyarakat.

Ilmu yang mempelajari tentang masyarakat pertama kali dikenalkan oleh Auguste Comte (1798-1857) di dalam bukunya yang berjudul *Cours de Philosophie Positive* kemudian dalam catatan sejarah, Emile Durkheim (1858-1917) melanjutkan dan menerapkannya menjadi sebuah disiplin ilmu. Nama yang pertama kali diberikan untuk ilmu pengetahuan ini adalah *fisika sosial* (*social physics*), yang kemudian diganti dengan Sosiologi, karena ahli matematika Belgia Quetelet telah mempergunakan istilah fisika sosial bagi studi statistik tentang gejala moral¹.

Kajian sosiologi berangkat dari prinsip dasar bahwa kehidupan manusia adalah kehidupan sosial. Sebagian besar dari kita secara teratur terlibat dalam interaksi dengan orang lain. Dari keluarga tempat kita dilahirkan, melalui sekolah, bekerja, bermain, pensiun dan bahkan pertemuan untuk memperingati kematian kita. Manusia ini hidup dalam

¹ Soleman B. Taneko, *Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, Cetakan kedua, Jakarta, 1990, halaman 1

permadani yang ditunen dari tananan sosial yang saling bergantung. Sosiologi berfokus pada parameter ini, termasuk bagaimana parameter tersebut diciptakan, bagaimana parameter tersebut berubah, dan bagaimana parameter itu memengaruhi kehidupan, peluang, dan pilihan yang tersedia.

Secara linguistik, Sosiologi berasal dari gabungan dua kata latin, *Socius* yang berarti masyarakat dan *Logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Berdasarkan kedua kata tersebut dapat dipahami bahwa sosiologi berarti ilmu yang mempelajari masyarakat dan hal-hal yang dapat dipelajari berupa proses yang timbul dalam berbagai hubungan masyarakat. Di antara berbagai hubungan sosial, sistem hubungan sosial yang dibahas dalam sosiologi adalah hubungan kekerabatan, hubungan kerja, hubungan formal dan informal, serta hubungan sosial lainnya.

Sosiologi berusaha mencari tahu tentang hakekat dan sebab-sebab dari berbagai pola pikiran dan tindakan manusia yang teratur dan dapat berulang, berbeda dengan psikologi yang memusatkan perhatiannya kepada karakteristik pikiran dan tindakan orang perorangan, sosiologi hanya tertarik kepada pikiran dan tindakan yang dimunculkan seseorang sebagai anggota suatu kelompok atau masyarakat². Jadi Sosiologi mempelajari kehidupan dan prilaku, terutama dalam kaitannya dengan suatu sistem sosial dan bagaimana sistem tersebut mempengaruhi orang dan bagaimana pula orang yang terlibat di dalamnya mempengaruhi sistem tersebut.

Sosiologi merupakan ilmu yang bertujuan untuk memahami perilaku sosial manusia. Tindakan sosial dilaksanakan dengan memperhatikan tingkah laku orang lain. Sosiologi bisa dimaknai sebagai ilmu yang meneliti interaksi dan dampak saling memengaruhi antara beragam fenomena sosial, seperti ekonomi, politik, keluarga, dan moral. Sosiologi adalah ilmu yang fleksibel karena perkembangannya dapat dilihat dari penelitian-penelitian ilmiah yang terbuka untuk dikritik oleh publik, mengingat fokusnya pada pengetahuan

² Stephen K Sanderson, *Sosiologi Makro Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, Edisi kedua Rajawali Press, Jakarta 1993, halaman 2.

kemasyarakatan. Bidang sosiologi senantiasa mengalami perkembangan yang dinamis, dapat direvisi sejalan dengan evolusi yang terjadi pada objek kajiannya, yaitu masyarakat.

Karenanya, Sosiologi ini menjadi sangat relevan untuk dipelajari khususnya bagi mahasiswa karena berhubungan langsung dengan aktivitas dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sosiologi memiliki wawasan yang memungkinkan pemahaman mengenai tata sosial dan interaksi yang dapat memengaruhi tindakan individu maupun kelompok. Dengan mempelajari Sosiologi, mahasiswa dapat mengenali pola-pola sosial yang mendasari perilaku sehari-hari, seperti alasan dibalik tindakan seseorang dalam situasi tertentu, serta bagaimana norma dan nilai tersebut membentuk struktur sosial, kekuasaan, dan ketimpangan dalam masyarakat.

Selain itu, sosiologi memungkinkan kita untuk memahami bahwa banyak permasalahan individu sesungguhnya merupakan isu sosial yang lebih besar. Sebagai contoh, pengangguran tidak hanya merupakan isu pribadi yang disebabkan oleh sifat malas individu, melainkan juga merupakan akibat dari struktur ekonomi serta kebijakan publik yang berdampak pada ketersediaan pekerjaan. Pemahaman ini mempersiapkan seseorang untuk menjadi lebih analitis dan responsif terhadap beragam kesempatan, rintangan, dan permasalahan dalam hidup. Sosiologi turut mendorong kita untuk merenungkan posisi kita dalam komunitas serta cara-cara di mana kita dapat memberikan sumbangsih untuk perubahan sosial yang konstruktif.

Dari prespektif sosiologi, kita dapat memahami dan menghargai perbedaan budaya serta meningkatkan rasa empati terhadap sesama. Aspek ini sangat penting dalam dunia yang kian terhubung dan global, di mana interaksi dengan orang-orang dari beragam latar belakang semakin sering berlangsung. Pada intinya, sosiologi bukan hanya menyediakan wawasan dalam aspek teori, tetapi juga memberikan alat yang bermanfaat untuk menganalisa dan menangani isu-isu sosial. Ini memberikan kesempatan bagi individu untuk hidup dengan

lebih bermakna dan berkontribusi pada perkembangan komunitas secara menyeluruh.

B. Pengertian Sosiologi

Sosiologi, sebagai cabang ilmu, adalah pengetahuan mengenai masyarakat yang dibangun dari pemikiran ilmiah dan dapat diperiksa secara kritis oleh individu lain atau khalayak. Sosiologi merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat. Di bawah ini terdapat sejumlah pengertian sosiologi yang disampaikan oleh berbagai pakar:

1) Selo Sumardjan dan Soelaeman Soemardi³

Sosiologi merupakan ilmu yang meneliti struktur sosial, yaitu hubungan sosial yang melibatkan elemen-elemen utama, seperti norma-norma sosial, kelompok, dan kelas sosial. Bidang ilmu sosiologi turut menjelajahi proses-proses sosial yang terjadi, yang merupakan hasil dari interaksi yang kompleks antara berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, terdapat keterkaitan yang erat antara kehidupan agama dan kehidupan politik, serta keterkaitan yang erat antara kehidupan agama dan aspek kehidupan ekonomi.

2) Roucek dan Warren⁴

Menurut Roucek dan Warren, Sosiologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari hubungan sosial yang terjadi pada individu dan kelompok.

³ Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, halaman 14.

⁴ Terjemahan bebas dari Roucek dan Werren, *Sociology, an Introduction*, Littlefield, Adams & Co Peterson, New Jersey, 1962, halaman 3.

3) Soerjono Soekanto⁵

Sosiologi adalah ilmu sosial yang bersifat kategoris (dewasa ini), murni, abstrak, rasional, empiris dan berusaha mencari pengertian-pengertian kemasyarakatan yang bersifat umum (berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat).

4) Pitirim Sorokin⁶

Bidang ilmu sosiologi bertujuan untuk memahami interaksi dan saling memengaruhi antara berbagai fenomena sosial, seperti aspek ekonomi, keluarga, dan moral. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari interaksi dan saling pengaruh antara fenomena sosial dan non-sosial, serta sebagai kajian yang menjelajahi karakteristik umum dari berbagai jenis gejala sosial yang ada.

5) William F. Ogburn dan Meyer F. Nimkoff⁷

Sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial.

Dari berbagai definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu pengklasifikasian atau ilmu yang membahasa tentang apa yang terjadi khususnya hubungan dan pola sosial, sekaligus mencoba mencari pengertian bersama yang rasional, empiris dan umum. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari jaringan hubungan antar manusia dalam masyarakat, sedangkan dalam arti luas sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat, dimana sosiologi mempelajari masyarakat sebagai suatu kekuatan, hubungan, jaringan interaksi dan suatu kompleks institusi.

Sosiologi merupakan kajian mengenai interaksi yang berlangsung serta proses yang muncul dalam berbagai jenis hubungan sosial. Oleh karena itu, sosiologi merupakan suatu

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, 1986, halaman 19.

⁶ Terjemahan bebas dari Pitirin Sorokin, *Contemporary Sociological Theories*, Harper & Row, New York, and Evanston, 1928, halaman 760.

⁷ Terjemahan bebas dari William F. Ogburn dan Mayer F Nimkoff, *Sociology*, halaman 39.

disiplin ilmu yang mempelajari karakteristik masyarakat, perilaku komunitas, serta evolusi sosial. Sosiologi adalah salah satu disiplin ilmu sosial yang mempelajari komunitas dan dampaknya terhadap individu. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari aspek kehidupan dan perilaku manusia, khususnya terkait dengan sistem sosial yang ada. Ilmu ini juga mengkaji bagaimana sistem sosial memengaruhi individu, serta bagaimana individu berinteraksi dan memberikan pengaruh terhadap sistem sosial yang mereka jalani.

C. Tujuan Dan Manfaat Mempelajari Sosiologi

Kajian sosiologi merupakan upaya untuk memperdalam pemahaman kita tentang ciri-ciri dan sifat-sifat masyarakat serta meningkatkan kemampuan kita dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitar, khususnya lingkungan sosiokultural. Caranya adalah dengan memperoleh pengetahuan obyektif tentang fenomena sosial yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan sosial. Bagi calon lulusan khususnya Sarjana Hukum, mempelajari sosiologi tentunya mempunyai tujuan masa depan yang dapat mempunyai peran dan manfaat langsung bagi yang mempelajarinya. Tujuan dan manfaat mempelajari sosiologi antara lain:

1. Tujuan Mempelajari Sosiologi

- a. Mempelajari sosiologi bertujuan untuk bisa memahami masyarakat tertentu (misalnya petani, pedagang, buruh, pegawai, komunitas, sosialita, keagamaan, militer, dan sebagainya).
- b. Mempelajari sosiologi bertujuan untuk memahami struktur masyarakat, pola-pola interaksi, serta stratifikasi sosial dalam masyarakat.
- c. Mempelajari sosiologi bertujuan untuk memahami kondisi terkini masyarakat yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan suatu kebijakan (baik kebijakan dari pemerintah, perusahaan, badan dunia, dan sebagainya).

- d. Mempelajari sosiologi bertujuan agar hasil kajian sosiologi dapat dijadikan pertimbangan untuk memecahkan masalah-masalah sosial.
- e. Mempelajari sosiologi bertujuan untuk mendapatkan data-data tentang masyarakat sehingga dapat membantu kegiatan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi hasil-hasilnya.

Selain itu, tujuan sosiologi adalah meningkatkan pemahaman terhadap ciri-ciri dan sifat-sifat masyarakat serta meningkatkan daya adaptasi diri dengan lingkungan hidupnya, terutama lingkungan sosial budaya, caranya adalah dengan mengembangkan pengetahuan yang objektif mengenai gejala-gejala masyarakat yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah sosial.

2. Manfaat Mempelajari Sosiologi

Sosiologi yang bersifat praktis digunakan untuk menyelidiki dan memahami masyarakat. Ilmu ini dapat langsung dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan terkait penanganan konflik sosial, sebagai dasar awal pembentukan peraturan, dan sebagai bahan evaluasi setelah pelaksanaan kebijakan.

Sosiologi bisa membantu kita dalam memahami pola interaksi sosial dan kontrol sosial. Sosiologi membantu kita untuk memahami nilai, norma, tradisi, dan keyakinan yang diyakini oleh masyarakat lain, serta konflik antar budaya yang kerap terjadi. Sosiologi membantu kita merespon situasi sosial dengan bijaksana, kritis, dan berpikiran terbuka di dalam masyarakat, sambil memberikan kemampuan untuk mengambil tindakan yang sesuai terhadap berbagai isu sosial. Sosiologi sangatlah penting hingga menjadi mata kuliah yang harus diambil di setiap fakultas dan jurusan di semua perguruan tinggi.

Yang unik dari manfaat mempelajari sosiologi dengan cara ini adalah jika sosiologi dengan disiplin ilmunya maka akan memberikan gelar sosiologi secara akademik kepada mahasiswa. Karena mahasiswa dapat menjadi ahli dalam berbagai aspek yang diminati, antara lain:

1. Sebagai spesialis penelitian, Anda akan bertanggung jawab untuk hal-hal berikut:
 - a. Menejemen dan pelaksana pekerjaan penelitian;
 - b. Memperbaiki pembicaraan samar yang sedang populer;
 - c. Membuat prediksi-prediksi sosial yang menarik.
2. Sebagai penasihat kebijaksanaan yang memprediksi pengaruh kebijaksanaan dan berkontribusi pada pemilihan tindakan untuk mencapai tujuan.
3. Sebagai seorang ahli teknisi yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan lokal dan mengusulkan cara untuk berinteraksi dengan komunitas lokal. Selain itu, juga bisa sebagai teknisi di lembaga pemerintahan, militer, lembaga modal, atau lembaga kesejahteraan seperti program kesehatan untuk anak-anak miskin dan lainnya.
4. Sebagai seorang guru, menjadi pendidik yang mempunyai tugas utama bagi seorang sosiologis atau sarjana sosiologi.
5. Sebagai pekerja lepas di beberapa industri kecil, asosiasi Perdagangan, yayasan, serikat buruh, serta organisasi riset yang terlibat dengan berbagai posisi yang beragam.

D. Sejarah Sosiologi

1. Sejarah Sosiologi dan Perkembangannya

Pada mulanya, manusia mengintegrasikan segala bidang pengetahuan ke dalam filsafat alam. Setelah itu, wilayah filsafat meluaskan cakupannya ke berbagai disiplin ilmu, salah satunya adalah filsafat sosial. Filsafat sosial

membahas diskusi mengenai moralitas yang penting dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tokoh-tokoh yang dimaksud, antara lain Plato yang hidup pada tahun 429 hingga 347 SM dan Aristoteles yang hidup pada tahun 384 hingga 322 SM. Plato membahas mengenai unsur sosiologi dalam hal urusan negara, sedangkan Aristoteles mendiskusikan mengenai etika sosial. Sosiologi memusatkan perhatian pada pemahaman realitas sosial dalam masyarakat dari pada norma etika yang diterapkan oleh mereka. Konsep sosiologi dibuat lebih kaya oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean Jaques Rousseau melalui pemeriksaan interaksi sosial. Pemikiran sosiologi ini baru diakui sebagai ilmu sejak awal tahun 1800-an.⁸

Dalam perkembangannya, sosiologi mengalami pemisahan dari disiplin ilmu lainnya, seperti ekonomi dan sejarah. Pemikiran mengenai masyarakat dalam bidang sosiologi telah berkembang menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang mandiri. Banyak upaya, baik yang bersifat ilmiah maupun tidak, yang telah membentuk sosiologi sebagai ilmu pengetahuan mandiri. Salah satu hal yang mendorong timbulnya sosiologi adalah semakin banyaknya permintaan terhadap kesejahteraan masyarakat dan perubahan yang terjadi di dalamnya.⁹

Selain itu, perkembangan studi sosiologi dipicu oleh perubahan dalam masyarakat, adanya konflik, dan masalah sosial yang mendorong para ilmuan untuk menjelajahnya. Para sosiolog awal sangat khawatir tentang perubahan signifikan yang berlangsung, dan mereka percaya bahwa ilmu yang ada tidak mampu untuk memahami, menjelaskan, menganalisis, dan mengintrepretasikan prinsip-prinsip dasar yang mengatur fenomenal sosial. Dengan melewati beberapa

⁸ Suhardi dan Sunarti, S. 2009. *Sosiologi I*, Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. ISBN 978-979-068-208-5. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2020-09-30. Di akses 17 November 2024.

⁹ Sucipto, Urip. 2014. *Sosiologi*, Cet I, (Yogyakarta: Deepublish), hal. 5.

tahap perkembangan itulah, sosiologi akhirnya muncul sebagai disiplin ilmu akademis.

Istilah sosiologi mula-mula dikenalkan oleh Auguste Comte di dalam karyanya berjudul *Cours De Philosophie Positive* yang diterbitkan pada tahun 1838. Kemudian lebih meluas penggunaannya oleh Herbert Spencer pada tahun 1876 melalui bukunya *Principle of Sociology*. Asal muasal sosiologi berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Latin, yakni *Socius* dan *Logos*. *Socius* bermakna sebagai kawan, sementara *Logos* diartikan sebagai ilmu pengetahuan.¹⁰

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ben Agger (2004:43), terdapat sejumlah kontribusi intelektual yang menonjol. Kontribusi penting dari ilmu sosiologi ialah memandang 'diri manusia' sebagai suatu hasil dari interaksi sosial. Walaupun manusia memiliki naluri, impian, dan pemikiran yang bersifat pribadi, pengalaman hidup manusia sangat dipengaruhi oleh keanggotaannya dalam kelompok sosial. Seperti keluarga, sekolah, tetangga, kelompok suku, gender, generasi, dan negara adalah lingkungan yang dapat memengaruhi seseorang.

Sebagai ilmu pengetahuan, Sosiologi tergolong baru dengan usia seratus tahun. Perbandingan itu bisa dilakukan dengan filsafat kuno dari zaman Plato yang telah ditulis berabad-abad sebelum Masehi. Fisika mulai berkembang pada abad ke-17 saat zaman pencerahan dimulai. Menurut para ahli filsafat era pencerahan, adalah dengan cara terbaik untuk memahami dunia dengan keahlian ilmiah, menghimpun data, menguji hipotesa, dan mengaplikasikan pengetahuan demi mengendalikan fenomena alam dan kehidupan masyarakat. Sebelum tahun 1960, filosof seperti Plato meyakini bahwa segala pengetahuan yang diinginkan manusia telah tersedia dalam pemikiran manusia dan dapat diperoleh cukup dengan duduk tenang di kursi yang nyaman sambil merenung.

¹⁰ Murdiyanto, E. 2008. *Sosiologi Pedesaan: Pengantar untuk Memahami Masyarakat Desa*, Cet. I, (Yogyakarta: Wimaya Press), hal. 2.

Dengan begitu, ilmu sosiologi bisa dipahami sebagai studi tentang kehidupan sosial manusia. Pemikiran mengenai sosiologi sebenarnya telah diperkenalkan oleh para cendekiawan Yunani Kuno. Di Eropa pada abad ke-19, disiplin ilmu sosiologi yang mendalami masyarakat muncul untuk pertama kalinya. Sebagai pemicu lahirnya ilmu sosiologi dimulai dari peristiwa Revolusi Industri di Inggris dan Revolusi Sosial di Prancis.¹¹

Terlepas dari dampak kedua revolusi tersebut, sosiologi juga dipengaruhi oleh sejumlah perubahan jangka panjang yang dianggap sebagai pendorong lahirnya disiplin ini, seperti: (1) perkembangan kapitalisme pada abad ke-15; (2) transformasi dalam ranah sosial dan politik; (3) reformasi yang diusulkan oleh Martin Luther; (4) pertumbuhan individualisme; (5) munculnya ilmu pengetahuan modern; dan (6) peningkatan kepercayaan pada potensi diri sendiri.¹²

2. Tokoh-tokoh yang Mempengaruhi Perkembangan Sosiologi

Dalam ilmu sosiologi, terdapat beragam tokoh yang turut berkontribusi dalam pembentukan disiplin ilmu sosiologi tersebut. Seperti halnya ilmu bidang lainnya, sosiologi tidak langsung dikenal secara luas oleh masyarakat seperti sekarang ini. Tokoh dalam bidang ilmu sosiologi memiliki peran penting dalam seluruh proses lahir dan perkembangan ilmu tersebut. Di bawah ini terdapat beberapa tokoh sosiologi yang terkenal:

a) Auguste Comte

Tokoh sosiologi pertama adalah Auguste Comte, yang dikenal sebagai bapak sosiologi dunia. Auguste Comte sebetulnya adalah seorang filsuf atau pemikir yang menciptakan sebuah disiplin ilmu inovatif yang dikenal sebagai fisika sosial. Fisika sosial ini telah menjadi

¹¹ Ritzer, George, dan Goodman J. Douglas. 2004. *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Penerbit Kencana), hal. 7-9.

¹² Basrowi. 2005. *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hal. 2.

pangkal dibentuknya sejarah perkembangan sosiologi global sampai saat ini. Comte menggunakan istilah fisika sosial karena bidang studi tersebut bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip ilmu alam dalam konteks sosial. Comte dikenal sebagai seorang pria yang lahir dari keluarga bangsawan Katolik. Comte nama panjangnya Isidore Marie Auguste Francois Xavier Comte, lahir 17 Januari 1798 di Montpellier, Paris. Comte mencetuskan istilah sosiologi pertama kali dalam bukunya yang terkenal *Positive Philosophy* yang diterbitkan pada tahun 1838.¹³



Auguste Comte (Tahun 1798 - 1857)

Auguste Comte mengemukakan konsep tentang tiga tahap perkembangan dalam berpikir manusia, yaitu: *Pertama*, Teologis. Keyakinan pada kekuatan supranatural di luar diri manusia adalah esensi dari hukum teologis, dan termasuk di dalamnya keyakinan pada Sang Pencipta. *Kedua*, Metafisik. Percaya pada keberadaan kekuatan abstrak di alam semesta merupakan tahap

¹³ Prof. Dr. Wahyu, MS. 2020. *Sosiologi, Tokoh, Teori dan Berbagai Pemikirannya*, Cet. I, (Banjarmasin: Tahura Media), hal. 32.

metafisik yang penting. *Ketiga*, Positif. Keyakinan pada ilmu pengetahuan merupakan hal yang penting dalam tahap *positivistic*.

Dikarenakan memperkenalkan metode positif, maka Comte dianggap sebagai tokoh pendiri positivisme. Seperti yang kita pahami, metode positif menuntut agar objek penelitian bersifat faktual, memberikan manfaat, serta memastikan kecermatan dan kepastian. Berdasarkan pandangan Comte, terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengkaji secara positivistik, seperti pengamatan, perbandingan, eksperimen, dan metode historis. Sampai sekarang, tahap positivistik dianggap sebagai metode ilmiah yang kuat dan dipercaya oleh banyak intelektual.

b) Herbert Spencer

Tokoh lainnya ialah Herbert Spencer. Dikenal dengan nama Spencer, tokoh filsuf ini dulunya lebih dikenal di bidang lain sebelum ia diakui sebagai salah satu tokoh sosiologi terkemuka. Spencer lahir di Derby, Inggris pada tanggal 27 April 1820 dan pernah menekuni profesi sebagai insinyur di kota Birmingham. Spencer pernah juga melibatkan diri dalam industri kereta api sekaligus mengejar karir dalam jurnalistik. Herbert Spencer dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah perkembangan ilmu sosiologi setelah istilah sosiologi diperkenalkan oleh Auguste Comte. Dia menjadi penggagas ilmu sosiologi di Inggris ketika Revolusi Industri mulai berkembang di negara tersebut pada pertengahan abad ke- 19.¹⁴

¹⁴ Sukidin & Suharso. 2015. *Pemikiran Sosiologi Kontemporer*, Cet. I, (Jember: UPT Penerbitan Unej), hal. 5.



Herbert Spencer (Tahun 1820 - 1903)

Teori-teori sosiologi yang dikemukakan oleh Herbert Spencer berpengaruh signifikan dalam perkembangan sosiologi di Amerika pada masa itu. Pengaruhnya lebih signifikan dari pada Karl Marx, Max Weber, Emile Durkheim, dan Auguste Comte. Sebab utamanya adalah keahliannya dalam menulis bahasa Inggris. Saat itu, hanya dia yang menulis dalam bahasa Inggris. Berkat kemampuannya tersebut, karya tulisnya lebih mudah diterima oleh para pembaca. Teori-teori Herbert Spencer diterima dengan baik karena sesuai dengan kondisi masyarakat yang sedang mengalami industrialisasi. Buku-bukunya kemudian digunakan sebagai panduan perkuliahan di beberapa perguruan tinggi terkemuka di Inggris. Seperti *Principle of Sociology* yang dijadikan panduan oleh beberapa dosen di Oxford University.

c) Emile Durkheim

Sosok berikutnya dalam bidang sosiologi ialah Emile Durkheim yang lahir pada tanggal 15 April 1858. Durkheim dilahirkan di Epinal, sebuah kota yang terletak di wilayah Perancis. Dalam perjalanan pendidikannya, ia

dikenal sebagai siswa yang cerdas dan meraih banyak prestasi. Durkheim merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam perkembangan sosiologi modern. Dia mendirikan fakultas sosiologi pertama di sebuah universitas di Eropa pada tahun 1895, dan menerbitkan salah satu jurnal awal yang dikhususkan untuk ilmu sosial, *L'Annee Sociologique* pada 1896.



Emile Durkheim (Tahun 1858 - 1917)

Saat itu, Durkheim berada di tengah keadaan dimana ilmu-ilmu sosial belum dihargai sepenuhnya. Pada masa itu, keberadaan filsafat, psikologi, dan biologi sangat menonjol dan menjadi pusat perhatian utama. Pada masa itu juga bidang sosiologi masih dipengaruhi oleh pemikiran positif Auguste Comte dan Herbert Spencer, tetapi Durkheim berupaya membebaskan sosiologi dari pengaruh filsafat dengan menyelipkannya dalam lapangan empiris.

Menurut Durkheim, sosiologi tidak dapat lagi dipandang hanya dari sudut pandang mental murni seperti yang diajarkan oleh Comte dan Spencer yang menekankan aspek dunia ide sebagai inti pembahasan. Itulah sebabnya, Durkheim kemudian mengembangkan sebuah konsep dalam bidang sosiologi yang dinamainya

fakta sosial. Fakta sosial menjadi pusat perhatian dalam bidang sosiologi dan perlu diselidiki melalui penelitian empiris. Perbedaan kemudian timbul antara sosiologi yang bersifat empiris dengan filsafat yang lebih berorientasi pada aktivitas berpikir.

Dalam dunia sosiologi, konsep Emile Durkheim sering disebut sebagai paradigma 'fakta sosial', yang merujuk pada hal-hal di luar diri manusia. Hal ini cenderung berkala besar dan menitikberatkan pada struktur masyarakat secara umum. Durkheim membagi fakta sosial ke dalam dua jenis, yaitu fakta sosial material dan non-material. Fakta sosial material cenderung mendalami isu-isu seputar hukum dan birokrasi, sementara fakta sosial non material lebih berfokus pada aspek kebudayaan dan pranata sosial.¹⁵

d) Max Weber

Maximilian Weber lahir pada tanggal 21 April 1864 di Erfurt, Thuringia, Jerman.¹⁶ Weber merupakan seorang pakar di bidang politik, ekonomi, geografi, dan sosial asal Jerman yang diakui sebagai salah satu tokoh pionir di dalam pengembangan Ilmu Sosiologi dan Administrasi negara modern. Karya utamanya berkaitan dengan rasionalisasi di bidang sosiologi agama dan pemerintahan, walaupun ia juga menulis tentang ekonomi. Karyanya yang paling terkenal adalah esai berjudul *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*, yang menjadi awal dari studinya tentang sosiologi agama.

¹⁵ Hanneman Samuel. Emile Durkheim: riwayat, pemikiran, dan warisan Bapak Sosiologi modern, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, (Sumber: <https://lib.litbang.kemendagri.go.id/>) Diakses 17 November 2024.

¹⁶ Adi Sanotoso. 2020. *Biografi Tokoh-Tokoh Sosiologi Klasik sampai Postmodern*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press), hal. 13.



Maximilian Weber (Tahun 1864 - 1920)

Weber memandang bahwasannya agama menjadi salah satu faktor utama yang membedakan perkembangan budaya antara Barat dan Timur. Dalam salah satu karya terkenalnya, *Politics as a Vocations*, Weber secara rinci menjelaskan tentang bagaimana negara dianggap sebagai institusi yang memiliki hak eksklusif untuk menggunakan kekuatan fisik yang sah, sebuah definisi penting dalam konteks ilmu politik Barat yang lebih mutakhir.

Maksudnya adalah mencari penjelasan mengapa budaya Barat dan Timur berkembang dalam arah yang berbeda. Weber dalam analisisnya menyoroti pengaruh signifikan pemikiran agama Puritan (dan Kristen secara umum) terhadap evolusi sistem ekonomi di Eropa dan Amerika Serikat, meskipun Weber senantiasa memberikan catatan bahwa hal tersebut bukanlah faktor tunggal yang membentuk perkembangan tersebut.

3. Objek Kajian Sosiologi

Obyek studi atau kajian sosiologi adalah manusia (manusia adalah multidimensi) tetapi sosiologi menganalisis

manusia dari sisi sosial yang kita sebut masyarakat, yaitu interaksi antara individu dan sebab akibat yang muncul dari interaksi tersebut. Istilah masyarakat sering dipakai untuk merujuk pada kesatuan kehidupan manusia, contohnya masyarakat desa, masyarakat kota, masyarakat Bali, masyarakat Lampung, masyarakat adat, dan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, studi tentang masyarakat sangat terkait dengan tradisi dan budaya. Masyarakat adalah kesatuan kehidupan manusia yang berinteraksi berdasarkan sistem tradisi tertentu yang bersifat terus-menerus dan terikat oleh rasa identitas bersama. Sedangkan tradisi adalah aturan kehidupan yang abadi dan diwariskan dari generasi ke generasi sebagai warisan sehingga memiliki integrasi yang kuat dengan pola perilaku masyarakat.

Sebagian yang lain beranggapan bahwa fokus kajian sosiologi adalah masyarakat dan perilaku sosial individu dengan memperhatikan kelompok-kelompoknya. Kelompok-kelompok ini meliputi keluarga, suku atau etnis, komunitas pemerintahan, serta berbagai organisasi sosial, agama, politik, budaya, bisnis, dan lain-lain. Sosiologi juga mempelajari perilaku dan interaksi antar kelompok, menelusuri asal mula pertumbuhannya, serta menilai dampak aktivitas kelompok terhadap anggotanya.

Mengenai objek penelitian, sosiologi sebagai disiplin ilmu memiliki sejumlah objek, di antaranya adalah:

1. Objek Material

Fokus sosiologi adalah tentang keberadaan sosial, fenomena, dan interaksi manusia yang berdampak pada kesatuan manusia itu sendiri. Objek ini mengacu pada barang, sumber daya, serta tempat yang membentuk keberadaannya. Seperti rumah, tetangga, kota atau daerah, sekolah, tempat ibadah, kantor, peralatan, produk, dan berbagai hal lainnya. Segala unsur fisik tersebut memiliki pengaruh terhadap perilaku dan budaya seseorang. Sebagai contoh, kemajuan teknologi internet yang pesat membawa perubahan sosial dengan

memengaruhi perilaku masyarakat. Kini, internet tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi di media sosial, tetapi juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, industri, politik, perbankan, dan pertahanan negara.

2. Obyek Formal

Objek formal sosiologi membahas interaksi antar manusia dan proses yang timbul dari interaksi tersebut di dalam masyarakat, dengan fokus pada manusia sebagai makhluk sosial atau anggota komunitas. Jika kita menguraikan lebih lanjut, objek formal sosiologi mencakup hal-hal berikut:

- a. Hubungan manusia dengan manusia lainnya, hal ini meliputi tentang sikap perilaku dan tindakan manusia terhadap lingkungan sekitarnya dan kehidupan sosial melalui penjelasan ilmiah.
- b. Proses yang ditimbulkan dari sebuah hubungan, yang bisa berfungsi untuk meningkatkan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat.
- c. Hasil yang ditimbulkan dari sebuah hubungan, yang dapat berfungsi untuk meningkatkan kerja sama antar manusia.

Objek formal dalam bidang sosiologi turut membantu individu dalam menyesuaikan diri di tengah masyarakat. Membangun pengertian yang obyektif terhadap fenomena sosial yang bermanfaat untuk mengatasi masalah-masalah sosial dengan efektif. Astrid S, Susanto melakukan pemisahan antara Obyek Sosiologi dengan cara berikut:

- a. Obyek Material sosiologi adalah kehidupan sosial manusia, dan gejala serta proses hubungan antar manusia yang mempengaruhi kesatuan hidup bersama.
- b. Obyek Formal sosiologi adalah pengertian terhadap lingkungan hidup manusia dalam kehidupan sosial,

meningkatkan kehidupan harmonis masyarakatnya, meningkatkan kerja sama antar manusia.

Masyarakat dalam bidang sosiologi merujuk pada sekelompok individu yang telah lama saling hidup bersama, terbentuk nilai-nilai serta norma-norma untuk mengatur kehidupan mereka. Sementara istilah masyarakat sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni syaraka yang berarti ikut serta atau turut berpartisipasi. Dalam bahasa Inggris, konsep masyarakat merujuk pada society yang mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, serta rasa kebersamaan. Berikut ini adalah beberapa definisi masyarakat menurut pandangan para ahli:

1. Maclver dan Page

Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan masyarakat selalu berubah.

2. Ralph Linton

Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerjasama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

3. Selo Soemardjan

Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan.

4. Emile Durkheim

Masyarakat merupakan suatu kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya.

Menurut Soerjono Soekanto ciri-ciri masyarakat pada umumnya adalah sebagai berikut :

1. Manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang.
2. Bercampur atau bergaul dalam waktu yang cukup lama sehingga menciptakan sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia.
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan.
4. Merupakan suatu sistem hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.

Marion Levy menyatakan bahwa ada empat kriteria yang perlu dipenuhi agar suatu kelompok dapat disebut masyarakat, yaitu:

1. Kemampuan bertahan yang melebihi masa hidup seorang anggotanya.
2. Perekrutan seluruh atau sebagian anggotanya melalui reproduksi atau kelahiran.
3. Adanya sistem tindakan bersama yang bersifat swasembada.
4. Kesetiaan pada suatu sistem tindakan utama secara bersama-sama.
5. Melakukan sosialisasi terhadap generasi berikutnya.

Walaupun definisi masyarakat dari beberapa para ahli tersebut berlainan, pada dasarnya isinya sama, yaitu masyarakat yang mencakup beberapa unsur berikut ini:

1. Manusia yang hidup bersama. Di dalam Ilmu Sosial tidak ada ukuran mutlak ataupun angka pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi secara teoretis angka minimnya adalah dua orang yang hidup bersama.
2. Berbaur dalam jangka waktu yang cukup lama. Kelompok manusia menunjukkan perbedaan yang

nyata dengan benda-benda mati seperti kursi, meja, dan lainnya. Dengan terjalinnya hubungan antar manusia, akan lahir generasi baru di tengah-tengah kita. Manusia juga dilengkapi dengan kemampuan untuk berkomunikasi, merasakan, serta memahami, selain itu juga memiliki dorongan untuk menyampaikan kesan dan perasaannya. Sebagai hasil dari interaksi sosial, timbul evolusi sistem komunikasi dan norma-norma yang mengatur interaksi antar individu dalam kelompok tersebut.

3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan.
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan lainnya.¹⁷

Berdasarkan berbagai sudut pandang mengenai masyarakat, dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat merupakan sekelompok individu yang tinggal bersama di suatu lokasi untuk jangka waktu yang cukup lama, yang memiliki aturan-aturan yang mengatur kehidupan mereka menuju cita-cita bersama, serta di tempat itulah terjadi proses regenerasi anggotanya. Manusia membutuhkan kehidupan berkelompok sebagai respons terhadap kondisi lingkungan. Dalam hubungan antara manusia dan alam, terdapat dinamika yang kompleks, di mana perhatian utamanya adalah bertujuan pada kenyataan bahwa alam kadang-kadang tidak selalu mendukung kehidupan manusia dengan mudah. Rupa-rupa keterbatasan itu terlihat dari alam yang senantiasa berubah-ubah, seperti cuaca atau iklim, serta kondisi geografis yang berbeda-beda. Maka, manusia akhirnya menggunakan pikiran, perasaan, dan keinginannya

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, 1986, halaman 20-21

dalam berinteraksi dengan alam melalui reaksi tarik menarik.

Berdasarkan indikator yang ada, manusia selalu merasa memiliki dua keinginan yang melekat pada dirinya, yaitu keinginan untuk terhubung dengan lingkungannya serta keinginan untuk akrab dengan sesama manusia demi menjalani kehidupan dengan lebih lancar. Oleh karena itu, manusia cenderung untuk bersatu atau bersama-sama demi menjalin interaksi yang harmonis.

Interaksi adalah istilah yang merujuk pada hubungan antar manusia. Dari hubungan antara individu akan timbul produk interaksi, yakni tata nilai dan norma yang mencakup aspek positif dan negatif dalam lingkup kelompok yang bersangkutan. Pandangan mengenai yang dianggap baik dan yang dianggap buruk akhirnya berdampak pada perilaku sehari-hari seseorang.

Dengan demikian, terdapat tiga persyaratan untuk membentuk masyarakat, yaitu:

- a. Terdapat sekumpulan orang.
- b. Bermukim di wilayah tertentu dalam jangka waktu yang cukup lama.
- c. Akibat dari hidup di tempat tertentu dalam jangka waktu lama akhirnya menghasilkan kebudayaan.

1. Ruang Lingkup Kajian Sosiologi

Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi mengkaji lebih mendalam pada bidangnya dengan cara bervariasi. Misalnya, seorang sosiolog mengkaji dan mengamati kenakalan remaja di Indonesia saat ini, mereka akan mengkaji mengapa remaja tersebut nakal, mulai kapan remaja tersebut berperilaku nakal, sampai memberikan alternatif pemecahan masalah tersebut. Hampir semua gejala sosial yang terjadi di desa maupun di kota baik individu ataupun kelompok, merupakan ruang kajian yang cocok bagi sosiologi, asalkan menggunakan prosedur ilmiah. Ruang lingkup kajian

sosiologi lebih luas dari ilmu sosial lainnya. Hal ini dikarenakan ruang lingkup sosiologi mencakup semua interaksi sosial yang berlangsung antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok di lingkungan masyarakat.

Secara tematis, ruang lingkup sosiologi dapat dibedakan menjadi beberapa sub disiplin sosiologi, seperti:

- a. Sosiologi pedesaan (*Rural Sociology*), Model penelitiannya terfokus pada masalah-masalah, seperti penyebaran inovasi teknologi, kesenjangan antara gaya hidup masyarakat kota dan desa, pola mobilitas pendidikan dan pekerjaan, serta dampak program pembangunan masyarakat. Berbagai dimensi tersebut dikaji dengan menggunakan metodologi yang berdasarkan kuesioner, teknik wawancara formal, dan analisis kuantitatif.
- b. Sosiologi Medis (*Medical Sociology*), Sosiologi medis merupakan bagian dari sosiologi yang kajiannya memfokuskan pada pelestarian ilmu kedokteran, khususnya pada masyarakat modern.
- c. Sosiologi Perkotaan (*Urban Sociology*), penelitian tentang sosiologi perkotaan baru dimulai di Eropa, perintisnya sejak tahun 1920-an dan 1930-an, walaupun resminya sejak awal tahun 1970-an yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah khususnya Amerika Serikat.
- d. Sosiologi Militer (*Military Sociology*), Bidang kajian ini menyoroti angkatan bersenjata sebagai suatu organisasi bertipe khusus dengan fungsi sosial spesifik.
- e. Sosiologi Keluarga (*Family Sociology*), Mempelajari pembentukan dan perkembangan keluarga, bentuk keluarga, fungsi dan struktur keluarga, arah perkembangan keluarga pada masa mendatang, permasalahan yang dihadapi keluarga serta penyelesaiannya, dan masalah keluarga berencana. Mencakup hubungan keluarga dengan sistem sosial lainnya, seperti sistem pendidikan, ekonomi, pemerintahan, hubungan keluarga dengan sistem nilai

dan organisasi lainnya, serta implikasinya terhadap anggota keluarga. Pendekatan sosiologi dalam melihat keluarga, peranan, interaksi, dan keluarga dalam era modernisasi maupun pembangunan.

- f. Sosiologi Pendidikan (*Sociology of Education*), Merupakan bidang kajian sosiologi yang perintisnya selalu dikaitkan dengan sosiologi pendidikan bernama Lester Frank Ward pada tahun 1883, yang mengatakan bahwa untuk memperbaiki masyarakat wajib diperlukan pendidikan.

2. Sosiologi Sebagai Ilmu Pengetahuan

Sosiologi ditinjau dari sifatnya digolongkan sebagai ilmu pengetahuan murni (*pure science*) bukan ilmu pengetahuan terapan (*applied science*). Sosiologi dimaksudkan untuk memberikan kompetensi kepada peserta didik dalam memahami konsep-konsep sosiologi seperti sosialisasi, kelompok sosial, struktur sosial, lembaga sosial, perubahan sosial, dan konflik sampai pada terciptanya integrasi sosial.

Sosiologi mempunyai dua pengertian dasar yaitu sebagai ilmu dan sebagai metode. Sebagai ilmu, sosiologi merupakan kumpulan pengetahuan tentang masyarakat dan kebudayaan yang disusun secara sistematis berdasarkan analisis berpikir logis. Sedangkan sebagai metode, sosiologi adalah cara berpikir untuk mengungkapkan realitas sosial yang ada dalam masyarakat dengan prosedur dan teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Sosiologi sudah relatif lama berkembang di lingkungan akademis, sehingga secara teoritis sosiologi memiliki posisi strategis dalam mempelajari masalah-masalah sosial dan budaya yang berkembang dimasyarakat dan harus selalu siap memberikan alternatif jawaban terhadap masalah-masalah sosial yang ada. Melihat era globalisasi saat ini, sosiologi di tuntut untuk tanggap terhadap isu-isu global yang di dalamnya mencakup demokratisasi, desentralisasi, pengakuan HAM,

pemerintahan yang bersih, dan tentang kerukunan hidup bermasyarakat.

Soerjono Soekanto menulis bahwa sosiologi sebagai ilmu pengetahuan mempunyai sifat dan hakikat. Sifat dan hakikat sosiologi adalah antara lain sebagai berikut :

- a. Sosiologi merupakan bagian dari ilmu sosial, bukan merupakan bagian ilmu pengetahuan alam maupun ilmu kerohanian.
- b. Sosiologi bukan merupakan disiplin yang normatif, melainkan suatu disiplin yang bersifat kategoris. Artinya, sosiologi membatasi diri pada apa yang terjadi saat ini, dan bukan mengenai apa yang semestinya terjadi atau seharusnya terjadi.
- c. Sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum (nomotetik). Berbeda dengan sejarah, sosiologi lebih banyak meneliti dan mencari pola-pola khusus atau ideografik yang menekankan tentang keunikan sesuatu yang dikaji.
- d. Sosiologi merupakan ilmu sosial yang empiris, faktual, dan rasional.
- e. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak, bukan tentang ilmu pengetahuan yang konkret. Artinya, bahan kajian yang diperhatikan dalam sosiologi adalah bentuk-bentuk dan pola-pola peristiwa dalam masyarakat, dan bukan wujudnya tentang masyarakat yang konkret.
- f. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum. Karena dalam sosiologi, meneliti dan mencari apa yang menjadi prinsip-prinsip atau hukum-hukum umum daripada interaksi antar manusia dan juga perihal sifat hakikat, bentuk, isi, dan struktur dari masyarakat.

Menurut Prof. Dr. M.M. Djodjodigono, S.H, Sosiologi berfungsi untuk menggabungkan berbagai aspek, yang berarti sosiologi ingin memahami kondisi sebenarnya dari

kehidupan dalam masyarakat. Plato, Aristoteles, Hobbes, dan Spinoza memberikan perspektif yang berbeda. Mereka melihat masyarakat dari pandangan normatif dan finalis. Normatif berarti mendirikan norma-norma untuk kehidupan bersama yang baik. Finalis berarti mengejar tujuan untuk suatu organisasi sosial politik yang ideal. Buku Sosiologi Suatu Pengantar karya Soerjono Soekanto menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu sosial yang murni, abstrak, rasional, empiris, umum, dan berupaya menemukan pemahaman umum. Berdasarkan pengertiannya, hakikat sosiologi adalah sebagai berikut:

1. Sosiologi adalah ilmu sosial.
2. Sosiologi bukan merupakan disiplin ilmu normatif, melainkan disiplin ilmu kategoris, yang membatasi diri pada kejadian dewasa ini, bukan apa-apa yang terjadi atau seharusnya terjadi.
3. Sosiologi termasuk ilmu pengetahuan murni (*pure-science*), bukan ilmu pengetahuan terapan (*applied-science*). Misalnya, para sosiolog mengemukakan pendapat yang berguna untuk petugas administrasi, pembentuk undang-undang diplomat, guru-guru dan sebagainya.
4. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan abstrak, bukan ilmu pengetahuan konkret. Dalam sosiologi, yang diperhatikan adalah bentuk pola peristiwa-peristiwa masyarakat.
5. Sosiologi bertujuan menghasilkan pengertian dan pola-pola umum, serta mencari prinsip-prinsip dan hukum-hukum umum dari interaksi manusia, sifat, hakikat, bentuk, isi, dan struktur masyarakat.
6. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat empiris dan rasional, hal ini menyangkut metode yang digunakan.
7. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan umum, bukan pengetahuan khusus.

3. Sosiologi Dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya

Sosiologi sebagai ilmu sosial yang mempunyai fokus kajian mengenai tingkah laku manusia mempunyai bidang kajian yang sangat luas, antara lain bidang kajian Sosiologi Industri, Sosiologi Hukum, Sosiologi Pendidikan, Sosiologi Perkotaan, Sosiologi Pedesaan, Sosiologi Kesehatan, dan lain-lain.

Sosiologi Industri mengkaji masalah fenomena industri dengan menitikberatkan kajiannya pada faktor manusia, dan mengaitkannya dengan faktor mesin serta mekanisme kerja pabrik yang berorientasi pada efisiensi dan efektifitas. Sedangkan Sosiologi Hukum merupakan cabang sosiologi yang mengkaji fenomena-fenomena hukum yang ada di masyarakat. Sementara itu Sosiologi Pendidikan mengkaji proses-proses sosiologis yang berlangsung dalam lembaga pendidikan dengan tekanan dan wilayah tekanannya pada lembaga pendidikan. Di lain pihak Sosiologi Perilaku Menyimpang mengkaji perilaku dan kondisi yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang sudah disepakati dalam masyarakat.

Dalam melakukan kajiannya, terutama pada masyarakat modern, sosiologi perlu bekerja sama dengan ilmu-ilmu sosial lainnya membentuk kajian multidisiplin. Antropologi bisa membantu sosiologi dalam hal metodologi mengingat antropologi mempunyai pengalaman yang sangat panjang dalam melakukan penelitian yang bersifat kualitatif. Psikologi bisa memberi masukan bagi sosiologi dalam hal informasinya mengenai kecenderungan-kecenderungan yang sifatnya individual. Sementara itu sosiologi juga harus meminta bantuan ahli sejarah untuk memberi informasi tentang proses historis yang ada dalam fenomena perubahan sosial.

Berikut ini adalah hubungan keterkaitan antara ilmu sosiologi dengan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, antara lain:

a) Sosiologi dan Sejarah

Masyarakat selalu mengalami perubahan pada berbagai tingkat kompleksitas internalnya. Di dalam tingkat makro, terdapat pergeseran dalam ekonomi, politik, serta aspek kultural. Dan juga terjadi perubahan dalam interaksi dan perilaku individu di tingkat makro. Masyarakat bukanlah sekedar sekumpulan entitas fisik, tetapi merupakan serangkaian proses yang saling berhubungan secara kompleks, mengaitkan kondisi masyarakat saat ini dengan sejarah masa lampau. Hubungan masyarakat dengan sejarahnya senantiasa abadi. Hubungannya tertanam dalam karakter masyarakat tersebut. Sebab, masyarakat tak kan bisa menjadi masyarakat kalau tidak ada hubungannya dengan masa lampau.¹⁸ Sebagaimana yang disampaikan oleh Edward Shils:

“Masyarakat adalah fenomena antar waktu. Masyarakat terjelma bukan karena keberadaannya di satu saat dalam perjalanan waktu. Tetapi ia hanya ada melalui waktu. Ia adalah jelmaan waktu (1981: 327)”

Hal ini terbukti dengan adanya para ahli atau cerdas cendekia yang tertarik pada karakteristik masyarakat sepanjang sejarah. Mereka berfokus pada apa yang menjadikan masyarakat ideal. Namun, selama tahun 1800-an, mereka mulai mempelajari bagaimana masyarakat sebenarnya dan bagaimana struktur sosial berfungsi (bagaimana masyarakat bekerja). Dengan pengetahuan ini, mereka merasa dapat menangani masalah sosial dengan lebih baik dan mendorong perubahan sosial.¹⁹ Itulah sebabnya antara sosiologi dan sejarah tidak dapat dipisahkan.

Sosiologi dan sejarah adalah dua ilmu sosial yang sama-sama mempelajari peristiwa dan hubungan yang

¹⁸ Aksilas Dasfordate, dkk. 2023. *Buku Ajar Sosiologi Sejarah*, (Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara) hal. 76.

¹⁹ Khaerul Umam Noer. 2021. *Pengantar Sosiologi untuk Mahasiswa Tingkat Dasar*, Cet. I, (Jakarta: Perwatt), hal. 7.

dialami manusia. Sejarah lebih fokus pada kejadian yang berlangsung di masa lalu dan juga ingin mencari tahu alasan terjadinya suatu peristiwa. Sejarah memperhatikan karakteristik unik dari sebuah kejadian sejarah, sedangkan sosiologi hanya mengamati kejadian-kejadian sebagai proses sosial yang muncul dari interaksi antar manusia dalam berbagai situasi dan kondisi. Artinya, sejarah menekankan perbedaan yang ada pada peristiwa-peristiwa yang sama, sementara sosiologi menekankan kesamaan yang terdapat pada peristiwa yang berbeda.

Oleh karena itu, menurut beberapa pakar seperti dikutip dari buku Pengantar Ilmu Sosial (2022) karya Ryan Taufik dan Baihaqi Siddik, menyatakan bahwa sosiologi sangat terkait dengan ilmu sejarah, karena sosiologi juga menganalisis peristiwa sebagai bagian dari proses sosial. Proses itu muncul dari interaksi antar manusia dalam situasi dan kondisi yang berbeda.

Saat meneliti fenomena sosial dalam masyarakat, para pakar dapat memanfaatkan ilmu sosiologi dan sejarah secara bersamaan. Misalnya, para pakar menggunakan ilmu sejarah untuk menggali cerita dan fenomena yang terjadi di masa lalu masyarakat tersebut. Para pakar juga memanfaatkan sosiologi sebagai dasar untuk meneliti fenomena sosial saat ini, serta hubungannya dengan aspek sosial lainnya.

b) Sosiologi dan Ekonomi

Sosiologi tidak hanya mempelajari bidang sosial dalam masyarakat tetapi juga dapat menghubungkan dengan bidang lain, termasuk ilmu ekonomi. Masyarakat dan perekonomian dapat berjalan beriringan karena terdapat hubungan sebab dan akibat; misalnya faktor kemiskinan dapat mempengaruhi kehidupan sosial kelompok tertentu. Hubungan antara keduanya menciptakan cabang sosiologi lain, yaitu sosiologi ekonomi.



Ilustrasi interaksi sosial di bidang ekonomi yang dilakukan sehari-hari oleh masyarakat; jual beli barang untuk saling menguntungkan (Sumber gambar: theasianparent)

Ekonomi merupakan ilmu yang menyelidiki semua fenomena yang berhubungan dengan usaha, produksi, dan distribusi sumber daya. Sebagai contoh ekonomi berusaha memecahkan masalah yang timbul karena tidak seimbangnya persediaan pangan dengan jumlah penduduk dengan cara menaikkan produksi bahan pangan. Sosiologi berusaha melihat permasalahan ini dengan melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat misalnya apa yang dialami oleh petani.

Diambil dari buku Sosiologi Ekonomi (2016) karya Sindung Haryanto, sosiologi ekonomi didefinisikan sebagai cabang ilmu sosiologi yang mempelajari cara masyarakat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan yang lebih kompleks, dengan pendekatan sosial. Meskipun terkait, akan tetapi terdapat perbedaan pokok antara sosiologi ekonomi dan ilmu ekonomi pada umumnya. Umumnya, para pakar sosiologi ekonomi lebih cenderung mengaplikasikan pendekatan induktif dalam ajaran

mereka, sambil mengamati variasi perilaku ekonomi dari segi temporal, geografis, serta melacak variabel sosial yang berpengaruh.

Dari sisi proses sosiologi ekonomi, menurut buku Sosiologi Distribusi (2016) karya Drajat Tri Kartono terdiri dari tiga proses sosial. Di sini, ada suatu konsep yang menjadi fokus utama dalam bidang sosiologi ekonomi, yaitu *Pertama*, Kekuasaan. Pengaruh kekuasaan terhadap aktivitas ekonomi yang dapat dikuasai oleh institusi dengan wewenang yang lebih tinggi, serta kemampuannya untuk mengatur jalannya aktivitas ekonomi di wilayah yang ia pimpin. *Kedua*, Institusional. Dalam era modern ini, kegiatan ekonomi membutuhkan sebuah institusi atau lembaga untuk memantau perkembangan positif maupun negatif dalam perekonomian. *Ketiga*, Jaringan. Dalam teori jaringan, aktivitas ekonomi tidak hanya menggarisbawahi isu-isu ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap kehidupan sosial di suatu wilayah karena ekonomi memiliki peran penting yang signifikan dalam kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan menurut dua sosiologi ternama dari Swedia, Richard Swedberg dan Mark Granovetter, salah satu proporsi utama dalam pengembangan aliran baru Sosiologi Ekonomi Modern adalah bahwa tindakan ekonomi merupakan bentuk tindakan sosial. Artinya, perilaku ekonomi bisa mempengaruhi perilaku sosial. Lebih tegas lagi bahwa tindakan ekonomi didasarkan pada konteks sosial. Sebab, ekonomi tidak selalu harus mendominasi, tetapi harus diadaptasi terhadap situasi sosial yang beragam. Institusi ekonomi disusun secara sosial. Oleh karena itu, pihak ekonomi perlu memahami situasi sosial di kalangan masyarakat agar dapat menyesuaikan tindakan ekonomi yang dilakukan. Dari paparan ini, dapat dipahami bahwa aktivitas ekonomi

berpijak atau menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan sosial di tengah masyarakat.

c) Sosiologi dan Politik

Sosiologi dan politik meskipun dua bidang studi yang berbeda, namun memiliki hubungan dan keterkaitan saat menjelaskan fenomena politik. Sosiologi politik merupakan cabang dari ilmu sosiologi yang secara khusus mengkaji aspek sosial dari politik, karena terdapat hubungan erat dengan individu sebagai makhluk sosial yang memengaruhi masyarakat, termasuk institusi politik seperti negara. Memahami sifat manusia sebagai makhluk sosial adalah dasar untuk memahami pengaruh masyarakat terhadap kekuasaan pemerintah, yang menjadi salah satu fokus utama dalam sosiologi politik.

Politik mempelajari pemerintah dan menjelaskan kerumitan pemerintahan, termasuk usaha untuk mendapatkan dan menggunakan kekuasaan. Politik adalah karakter sistem pemerintahan yang paling tepat untuk meraih tujuan dan bagaimana seorang pemimpin perlu bertindak demi keamanan masyarakatnya. Sedangkan Sosiologi fokus pada aspek-aspek umum masyarakat, dengan kekuasaan yang digambarkan sebagai bentuk interaksi, kerjasama, persaingan, atau konflik.

Sebetulnya, ilmu politik itu memiliki makna yang sangat luas. Tetapi dalam kebanyakan situasi, ilmu politik melibatkan berbagai aktivitas yang terjadi dalam sistem politik suatu negara yang sedang berusaha menegakkan kewibawaan negara dan mengambil keputusan mengenai cita-cita yang ingin dicapainya. Tujuan yang dicapai terkait dengan memilih di antara berbagai opsi untuk menetapkan urutan penting dari tujuan yang telah dipilih. Hal ini dilakukan untuk menentukan dan mengimplementasikan tujuan yang memerlukan kebijakan yang mengatur cara sumber daya didistribusikan.



Ilustrasi hubungan sosiologi dan politik; kondisi sosial mempengaruhi pembuatan program publik yang dikeluarkan pemerintah (Sumber gambar: Kumparan)

Secara umum sosiologi politik meneliti hubungan antara masyarakat dan negara, sedangkan secara khusus sosiologi politik menitikberatkan perhatian antara lain pada studi kondisi-kondisi sosial yang memengaruhi pembuatan program publik yang ditetapkan pemerintah, pengaruh kelompok sosial tertentu terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, serta kondisi sosial yang mendukung terwujudnya demokrasi yang stabil.

Dari penjelasan di atas, dapat didefinisikan bahwa sosiologi politik adalah cabang ilmu yang mempelajari dua fenomena bersamaan yaitu fenomena sosiologis dan fenomena politik. Oleh para ahli sosiologi yang fokus pada studi politik, mereka menyebut sosiologi politik sebagai penggabungan studi antara politik dan masyarakat, antara struktur sosial dan struktur politik, atau perilaku sosial dan perilaku politik.²⁰

²⁰ Basrowi, Sukidin & Suko Susilo. 2012. *Sosiologi Politik*, Cet. I, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hal. 5.

Sosiologi politik menjadi aspek utama, karena setiap kehidupan manusia berkaitan dengan cara seseorang mendapatkan kekuasaan, pengakuan, status sosial, dan usaha untuk mempertahankannya. Ilmu sosiologi politik muncul sebagai bagian dari masyarakat yang mempelajari hubungan antara kehidupan masyarakat dan keputusan yang diambil oleh penguasa. Sosiologi politik adalah studi interdisipliner yang terdiri dari gabungan dua bidang ilmu, yaitu sosiologi dan politik. Jadi, jika ilmu sosiologi membahas masyarakat, maka politik mempelajari penguasanya atau pengambil keputusan.

Pada dasarnya, ide-ide sosiologi politik bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan zaman, sehingga akan lebih menarik bagi siapa saja yang mengikuti perubahan politik di suatu negara atau daerah. Tujuan adanya ilmu itu adalah untuk meningkatkan pemahaman pembaca atau masyarakat dalam menganalisis kondisi sosial politik di sekitarnya.

d) Sosiologi dan Antropologi

Pada awalnya antropologi mempelajari objek-objek penelitian di desa dan sosiologi di kota, tetapi seiring waktu antropologi juga meneliti masalah-masalah kompleks di kota, begitu pula sosiologi. Di Amerika, Sosiologi Pedesaan telah berkembang sejak lama. Dalam hal cara kerja, antropologi memiliki pengalaman panjang dalam mengatasi berbagai macam perbedaan antara ribuan budaya di masyarakat kecil yang ada di seluruh dunia, dan ini mengakibatkan munculnya berbagai cara pengumpulan data yang sifatnya kualitatif, dengan pendekatan yang menyeluruh. Dan berbagai cara analisis yang bersifat perbandingan, yang komparatif.

Sementara itu, sosiologi lebih banyak berfokus pada penelitian gejala masyarakat kota yang rumit dan kurang memperhatikan variasi dalam kehidupan masyarakat dan budaya manusia. Hal ini mengakibatkan

munculnya berbagai cara untuk mengumpulkan data yang lebih merata dan beragam metode pengolahan dan analisis data yang didasarkan pada perhitungan jumlah besar. Ini yang disebut metode kuantitatif, seperti metode statistik misalnya.²¹

Antropologi fokus pada masyarakat tradisional yang masih sederhana budayanya, sementara sosiologi melihat masyarakat modern yang strukturnya sudah rumit. Jika meninjau masyarakat yang sedang beralih sebagai proses saling memengaruhi antara elemen-elemen modern, maka antropologi lebih menyoroti elemen-elemen modern. Intinya, sosiologi dan antropologi adalah dua ilmu sosial yang saling terhubung dan melengkapi satu sama lain.

Akan tetapi, meskipun Sosiologi dan Antropologi saling terkait, namun sering dianggap sama. Padahal, kedua ilmu tersebut berbeda. Antropologi pada dasarnya lebih fokus pada penelitian tentang bagaimana manusia dapat berevolusi untuk bertahan hidup dalam kondisi saat ini. Ruang lingkup antropologi mencakup aspek fisik, sosial, dan budaya. Secara lebih tepat, antropologi lebih mempelajari aspek biologis dan sosiokultural manusia sejak dilahirkan sebagai makhluk di bumi ini. Bagi para ahli antropologi, yang sering disebut antropolog, tugas utama mereka adalah menyelidiki lebih dalam mengenai asal usul manusia sejak zaman dahulu. Penelitian tersebut telah dilakukan melalui survai arkeologis dan analisis budaya yang mencakup berbagai wilayah dunia.

Sedangkan sosiologi merupakan ilmu yang berhubungan dengan tingkah laku manusia dalam masyarakat. Pada intinya, sosiologi adalah suatu studi yang mempelajari cara manusia hidup sosial di sekitarnya. Hidup sosial itu berarti berhubungan dengan interaksi yang dilakukan, tindakan yang dilakukan, serta

²¹ Dr. Imam Subchi, M.A. 2018. *Pengantar Antropologi*, Cet. I, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), hal. 1

hal-hal lainnya. Para ahli sosiologi bertugas untuk mengetahui tentang struktur, proses, budaya, dan perilaku masyarakat dengan cara mengamati secara rinci setiap aktivitas dalam sebuah kelompok masyarakat.

Jadi, esensi perbedaan antara antropologi dan sosiologi terletak pada fokus yang diteliti. Antropologi mengkaji bagaimana manusia bermula, sementara sosiologi merupakan penelitian mengenai tingkah laku manusia dalam masyarakat. Biasanya, pengetahuan sosiologi digunakan untuk mengatasi perkara sosial di dalam kehidupan masyarakat, seperti contohnya mobilitas sosial, kekacauan, perubahan, kegelisahan, dan topik sejenis lainnya.

e) **Sosiologi dan Psikologi sosial**

Dalam interaksi sosial, terkadang kita bisa mengalami hubungan yang kurang harmonis dengan orang lain, menyebabkan situasi yang menimbulkan konflik, perbedaan pendapat, atau perselisihan antar golongan yang mungkin terjadi di antara keluarga, teman, tetangga, dan lainnya. Selanjutnya, dorongan tersebut menjadi pemantik bagi ilmu psikologi sosial dalam menggali lebih dalam mengenai interaksi antar manusia dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Hubungan antar manusia dipengaruhi oleh tingkah laku, sikap, dan keputusan yang bisa melahirkan respons yang bersifat destruktif atau konstruktif, hal ini terkait dengan psikologi sosial.

Psikologi merupakan disiplin ilmu yang menggali tentang aspek kejiwaan, misalnya menelaah tentang gejala-gejala kejiwaan seperti pengamatan, respons, ingatan, dan proses berpikir. Sedangkan dalam bidang sosiologi, ilmu ini membicarakan tentang hubungan antar manusia dan upaya memahami keberadaan manusia dalam konteks sosial. Psikologi dan sosiologi membahas tentang manusia karena keduanya memiliki fokus yang serupa. Subyek yang dimaksud adalah manusia.

Dalam tataran awal, psikologi sosial adalah disiplin ilmu yang mempelajari segala ragam perilaku manusia, dari aktivitas sehari-hari hingga interaksi sepanjang kehidupan. Agar bisa memahami perilaku manusia secara mendalam, penting untuk mempelajari ilmu sosiologi karena ilmu ini membahas berbagai varian tingkah laku dan tindakan manusia, dengan fokus pada dampak masyarakat atau kelompok sosial dalam keseluruhan gambaran. Dan melihat seseorang sebagai satu elemen dalam komunitas.

Dari sini maka terciptalah bidang psikologi yang mengkaji individu beserta berbagai aktivitas, tindakan, dan tingkah laku yang dilakukannya selama hidup. Apabila dilihat dari aspek kajian serta perluasan konsepnya, psikologi sosial merupakan hasil kombinasi antara ilmu psikologi dan ilmu sosiologi. Dengan pemaparan yang bersifat melengkapi, seorang pakar psikologi menjelaskan bahwa sosiologi dan psikologi merupakan dasar-dasar ilmiah bagi perkembangan cabang ilmu yang sekarang dikenal dengan nama psikologi sosial.²²

Dalam sebuah penelitian menemukan bahwa semakin positif pandangan kita terhadap orang lain, semakin banyak cahaya yang dipancarkan dalam kehidupan kita dan semakin banyak orang yang menghargai kita. Seseorang yang memberikan penilaian positif kepada orang lain menunjukkan bahwa dirinya memiliki kepribadian yang positif. Orang yang sering menilai negatif sebenarnya menunjukkan keteguhan diri dan cenderung menjauhi pergaulan. Ketika seseorang cenderung mengungkapkan hal-hal positif tentang orang lain, itu bisa menandakan bahwa orang tersebut memiliki kepribadian yang positif.

²² Yenti Arsini, dkk. *Hubungan Psikologi dengan Ilmu Sosiologi*, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial (Jurnal Pendis), Vol. 4, No. Tahun 2023, hal. 27.

Kemudian, suasana dalam berinteraksi sosial dipengaruhi bukan hanya oleh faktor psikologi tetapi juga situasi lingkungan. Faktor lingkungan mengikuti norma, nilai, aturan sosial, budaya, cuaca, dan elemen lainnya. Pengaruh dari lingkungan tersebut dapat dirasakan pada harga diri, semangat kerja, rasa bangga, semangat hidup, dan kesadaran individu dalam kehidupan sehari-hari. Peran keluarga, teman pergaulan, dan orang-orang di sekitar juga turut membentuk kepribadian seseorang dan memberikan motivasi serta dorongan dalam meraih kesuksesan. Sebaliknya, cara orang melihat orang lain secara negatif hal itu dikaitkan dengan kepribadian yang negatif. Kecenderungan untuk melihat orang lain secara negatif ini menandakan adanya risiko depresi serta gangguan kepribadian.

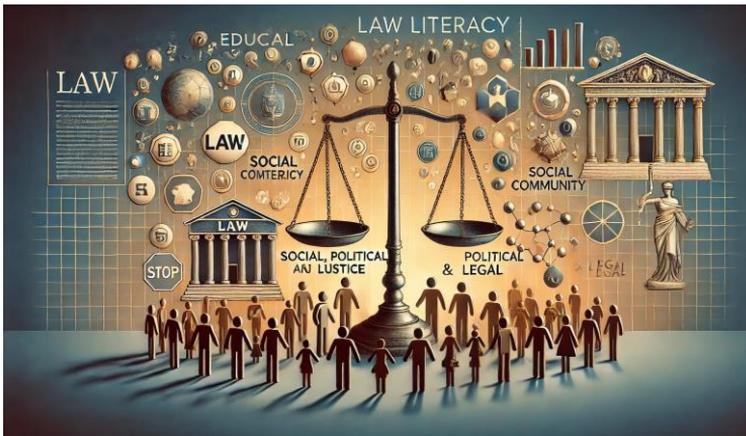
Profesor Dustin Wood, seorang psikolog di Wake Forest University, North Carolina, dalam penelitiannya, berkata bahwa "Cara Anda melihat orang lain bisa mencerminkan kepribadian Anda."²³ Oleh karena itu, agar kehidupan sosial kita semakin baik, maka perlu memperdalam pengetahuan tentang ilmu psikologi sosial guna meningkatkan keterampilan berinteraksi antar individu, sehingga tidak menimbulkan pandangan negatif kepada orang lain.

f) Sosiologi dan Hukum

Sosiologi hukum berusaha untuk mengupas hukum sehingga hukum itu tidak dipisahkan dari praktik penyelenggaraannya yang tidak hanya bersifat kritis melainkan bisa juga kreatif. Kreatifitas ini terletak kepada kemampuannya untuk menunjukkan adanya tujuan serta nilai-nilai tertentu yang ingin dicapai oleh hukum. Sosiologi hukum akan dapat mengingatkan orang kepada adanya tujuan hukum. Sosiologi hukum juga memberikan

²³ Retno Sri Astuti. 2022. *Psikologi, Kepribadian Seseorang Terlihat Saat Menilai Orang Lain*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, (Sumber <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>) Diakses 17 November 2024.

informasi hambatan-hambatan apa saja yang menghalangi pelaksanaan suatu ide hukum, dengan demikian akan sangat berguna untuk menghindari dan mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam penerapan hukum.



Ilustrasi gambar Sosiologi Hukum; Hukum sebagai aturan yang mengatur kehidupan sosial, keduanya saling berkaitan dan saling mempengaruhi (sumber gambar: literasi hukum)

Pendekatan sosiologi hukum membahas hukum sebagai bagian integral dari struktur sosial yang saling terkait. Hukum tidak hanya dianggap sebagai teks dalam undang-undang atau peraturan tertulis, namun juga sebagai realitas sosial yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Hukum tidak hanya dipahami secara teks normatif saja, melainkan juga dengan memperhatikan konteksnya. Sejalan dengan itu, pendekatan hukum didasari tidak hanya oleh logika hukum semata, melainkan juga oleh logika sosial dalam mencari makna.

Sosiologi hukum fokus pada kajian mengenai interaksi hukum dengan berbagai fenomena sosial dari segi pengalaman dan analisis. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi hukum, pengetahuan atau ilmu sosial turut membantu proses tersebut. Sosiologi memperlihatkan perbedaan dengan ilmu hukum dengan

sifatnya yang tidak melibatkan penilaian terhadap hukum. Jelaslah bahwa sosiologi hukum mengutamakan prespektif hukum yang objektif dengan tujuan menjelaskan fenomena hukum yang tengah berlangsung.²⁴

Sosiologi hukum membahas dua hal secara spesifik:²⁵ *Pertama*, Dasar-dasar sosial dari hukum. Contohnya adalah hukum nasional Indonesia yang bersandar pada Pancasila, dengan mencirikan gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan. *Kedua*, pengaruh hukum terhadap beberapa aspek sosial lainnya. Sebagai contoh, Undang-Undang Penanaman Modal berdampak pada ekonomi, Undang-Undang Pemilu memengaruhi politik, Undang-Undang Hak Cipta berperan dalam budaya, serta Undang-Undang Pendidikan Tinggi terkait dengan pendidikan.

Selanjutnya, sosiologi hukum mempelajari cara hukum berkembang di tengah masyarakat. Ciri khas sosiologi hukum yaitu memberikan penjelasan mengenai praktik hukum yang dijalankan oleh penegak hukum dan masyarakat. Apabila praktik tersebut dipilah ke dalam proses pembuatan peraturan, penerapan hukum, dan pengadilan, maka sosiologi hukum juga mengamati bagaimana praktik dilakukan dalam setiap tahap kegiatan hukum tersebut.

²⁴ Yusuf Daeng. 2018. *Sosiologi Hukum*, Cet. I, (Pekanbaru: Alaf Riau), hal. 55-56.

²⁵ Yusuf Daeng. *Ibid*, hal. 57.

BAB II TEORI-TEORI SOSIOLOGI

A. Gambaran Ringkas Sejarah dan Teori Sosiologi

Di Indonesia, penelitian tentang masyarakat yang tergolong dalam bidang ilmu pengetahuan bernama sosiologi belum pernah dilakukan. Konsep sosiologi ini meski tidak secara langsung dilakukan tapi pernah dipaparkan dalam berbagai ajaran dan karya sastra Nusantara. Salah satunya adalah ajaran “Wulang Reh” yang ditulis oleh Sri Paduka Mangkunegoro IV dari Keraton Surakarta. Di dalamnya diajarkan mengenai pola-pola hubungan antara individu-individu dari masyarakat Jawa yang berasal dari latar belakang atau status sosial yang berbeda. Ajaran Wulang Reh sendiri sarat dengan ajaran filosofis tentang praktik (gaya hidup) yang diperlukan untuk hidup sebagai manusia seutuhnya, baik secara material maupun spiritual yang merupakan bagian dari upaya membangun masyarakat yang beradab.

Kata “Wulang” identik dengan kata pitutur yang berarti ajaran. Kata “Reh” berasal dari bahasa Jawa Kuno yang berarti jalan, aturan dan amalan yang ingin dicapai atau diwajibkan. Wulang Reh dapat dipahami sebagai ajaran untuk mencapai sesuatu. Karya ini membahas tentang praktik menjalani kehidupan yang harmonis atau sempurna. Naskah Wulang Reh saat ini disimpan di Meseum Radya Pustaka Surakarta.

Wulang Reh dapat dipahami sebagai ajaran atau tata cara untuk mencapai taraf hidup yang diutamakan secara etis. Dengan demikian, terciptalah manusia yang mampu menempatkan dirinya pada posisi apapun dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Serat Wulang Reh juga merupakan salah satu sumber cita-cita lahirnya Pancasila oleh pendiri

bangsa, Soekarno, dalam pidatonya di hadapan sidang BPUPKI, pada tanggal 1 Juni 1945 tentang Dasar Falsafah Negara.²⁶

Hal yang serupa juga terdapat dalam prinsip ajaran Ki Hajar Dewantoro, yang menjadi landasan dasar pendidikan Nasional di Indonesia, berkenaan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan dan keluarga yang tercakup dalam konsep “*Ing ngarsa sung tuladha*” (di depan memberi contoh yang baik), “*Ing madya mangun karsa*” (di Tengah-tengah memberikan semangat), dan “*Tut wuri handayani*” (di belakang memberikan dukungan), secara tidak langsung menjadi dasar konsep sosiologi.

Menurut Ki Hadjar Dewantara, pendidikan yang cocok untuk bangsa Timur adalah pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, keberpihakan pada rakyat, serta kebersamaan dalam semangat kebangsaan. Tiga aspek inilah yang menjadi pijakan Ki Hadjar Dewantara dalam membimbing dan menginspirasi bangsa menuju politik pembebasan atau kemerdekaan. Mendalami pendidikan yang humanis ini memberikan pengalaman berharga dengan menggabungkan model sekolah dari Maria Montessori (Italia) dan Rabindranath Tagore (India). Ki Hadjar Dewantara berpendapat bahwa dua sistem pendidikan yang diterapkan oleh kedua tokoh pendidik tersebut sangatlah tepat untuk situasi pendidikan di Indonesia pada masa itu.



Ki Hadjar Dewantara (Tahun 1889 – Tahun 1959)

²⁶ Agus Widjanto (Praktisi Hukum). 2023. *Menilik Ajaran Wulang Reh untuk Kepemimpinan Indonesia*, Sumber: JPNN. Com. Diakses 23 November 2024.

Sebelum perang dunia II, Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta merupakan satu-satunya institusi di Indonesia yang memberikan mata kuliah sosiologi. Namun, pembelajaran sosiologi di lembaga pendidikan tinggi tersebut masih belum dianggap sebagai disiplin ilmu mandiri, tetapi hanya sebagai penunjang untuk mata pelajaran di bidang hukum. Para pengajarnya juga bukan berasal dari orang-orang yang memiliki keahlian khusus di bidang ilmu tersebut, karena pada waktu itu di Indonesia belum ada seorang sarjana yang secara eksklusif mengkhususkan diri dalam disiplin ilmu sosiologi. Sedangkan sosiologi yang diajarkan dalam kuliah tersebut masih berupa filsafat dan teori sosial.

Setelah Perang Dunia II tepatnya setelah Proklamasi Kemerdekaan di proklamirkan adalah untuk pertama kalinya Prof. Mr. Soenario Kolopaking memberikan kuliah sosiologi pada tahun 1948 di Akademi Ilmu Politik di Yogyakarta yang kemudian di lebur dalam Universitas Negeri Gajah Mada Yogyakarta. Di Universitas tersebut sosiologi di ajarkan sebagai ilmu pengetahuan dalam jurusan ilmu pemerintahan dalam Negeri, hubungan luar Negeri, dan publisistik. Pada tahun 1950 ada beberapa orang yang memperdalam sosiologi di luar negeri bahkan beberapa di antaranya mempelajari ilmu ini secara khusus yang akhirnya mereka menjadi cikal bakal tumbuhnya sosiologi di Indonesia. Perkembangan dari beberapa ilmuan sosial tersebut adalah di terbitkannya buku sosiologi yang berjudul *Sosiologi Indonesia* yang di tulis dalam bahasa Indonesia oleh Mr. Djody Gondokusumo yang memuat pengertian dasar sosiologi secara teoritis dan bersifat filsafat. Perkembangan selanjutnya, yaitu setelah revolusi fisik, sekitar tahun 1950 terbit untuk kedua kalinya buku sosiologi karya Barsono.

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa awalnya perkembangan sosiologi di Indonesia dianggap hanya sebagai ilmu tambahan. Namun, kehadiran perguruan tinggi di Indonesia telah menjadikan sosiologi memiliki peran yang sangat penting dalam mengkaji dan merenungkan perkembangan masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

Dari semangat memperkuat persatuan bangsa, sosiologi menjadi salah satu mata pelajaran yang sangat diutamakan dalam kurikulum perguruan tinggi di Indonesia. Hal ini menjadikan sosiologi menjadi mata kuliah yang wajib dan populer bagi para mahasiswa. Ada beberapa perguruan tinggi yang kini menyediakan program studi sosiologi sebagai mata kuliah terpisah di Fakultas mereka. Setelah dilakukan berbagai penelitian, kemudian muncul beragam teori sosiologi.

B. Teori Sosiologi Klasik

1. Sosiologi Positivis (Auguste Comte)

Auguste Comte (1798-1857) sangat prihatin terhadap anarkisme yang merasuki masyarakat saat berlangsungnya Revolusi Perancis. Oleh karena itu Comte kemudian mengembangkan pandangan ilmiahnya yakni positivisme atau filsafat sosial untuk menandingi pemikiran yang dianggap filsafat negatif dan destruktif. Positivisme mengklaim telah membangun teori-teori ilmiah tentang masyarakat melalui pengamatan dan percobaan untuk kemudian mendemonstrasikan hukum-hukum perkembangan sosial. Aliran positivis percaya akan kesatuan metode ilmiah akan mampu mengukur secara objektif mengenai struktur sosial.²⁷

Sebagai usahanya, Comte mengembangkan fisika sosial atau juga disebutnya sebagai sosiologi. Comte berupaya agar sosiologi meniru model ilmu alam agar motivasi manusia benar-benar dapat dipelajari sebagaimana layaknya fisika atau kimia. Ilmu baru ini akhirnya menjadi ilmu dominan yang mempelajari statika sosial atau struktur sosial dan dinamika sosial atau perubahan sosial.

Comte percaya bahwa pendekatan ilmiah untuk memahami masyarakat akan membawa pada kemajuan kehidupan sosial yang lebih baik. Ini didasari pada gagasannya tentang Teori Tiga Tahap Perkembangan

²⁷ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Gramedia Jakarta, 1986 halaman 77

Masyarakat, yaitu bahwa masyarakat berkembang secara evolusioner dari tahap teologis (percaya terhadap kekuatan Tuhan), melalui tahap metafisik (percaya pada kekuatan abstrak), hingga tahap positivistik (percaya terhadap ilmu sains). Pandangan evolusioner ini mengasumsikan bahwa masyarakat, seperti halnya organisme, berkembang dari sederhana menjadi rumit. Dengan demikian, melalui sosiologi diharapkan mampu mempercepat positivisme yang membawa ketertiban pada kehidupan sosial.

2. Sosiologi Struktural (Emile Durkheim)

Emile Durkheim percaya bahwa dalam mempelajari masyarakat, sosiologi tidak dapat lagi dianggap dalam keadaan murni. Oleh karena itu Durkheim membangun suatu pemahaman konsep dalam sosiologi tentang fakta sosial. Dalam fenomena sosial, fakta sosial menjadi objek studi yang paling utama dan harus dipelajari dan diteliti secara empiris.

Pandangan Durkheim tentang masyarakat adalah masyarakat sebagai wadah paling sempurna bagi kehidupan antara individu yang satu dengan yang lainnya, yang dijalani secara bersama-sama. Masyarakat memiliki sifat yang menentukan dalam perkembangannya. Hal-hal yang berkaitan dengan erat dengan individu sejatinya berasal dari luar diri individu tersebut, seperti kepercayaan dan agama. Dalam pemahaman Durkheim, individu-individu di dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh masyarakat yang menjadi wadah bagi kehidupannya. Oleh karena itu, dalam kajian studi Durkheim tentang masyarakat, individu bukan menjadi prioritas utama. Karena dalam mempelajari tindakan-tindakan manusia, seseorang harus melihatnya dari perspektif masyarakat itu. Masyarakat tidak tergantung dari individu-individu di dalamnya, tetapi terdiri dari sistem adat istiadat dan kepercayaan yang membentuk suatu lingkungan yang terorganisir, yang kemudian malah mempengaruhi kehidupan individu-individu tersebut.

Fakta sosial, dalam khazanah sosiologi, menurut Durkheim adalah sesuatu yang berada di lingkungan eksternal individu, yang bersifat makro dan memberikan penekanan pada tatanan masyarakat secara luas (memaksa individu). Oleh karena itu, Durkheim kemudian membedakan fakta sosial tersebut ke dalam dua tipe. Yang pertama adalah fakta sosial material, seperti birokrasi dan hukum. Sedangkan tipe yang kedua adalah fakta sosial nonmaterial, seperti kultur dan pranata sosial. Fakta-fakta sosial ini mengikat individu dalam suatu integrasi yang menyebabkan satu individu terikat dengan individu lain dalam masyarakat, yang juga akan mempengaruhi tindakan-tindakan individu terhadap masyarakatnya.

Dalam pemahamannya tentang masyarakat, Durkheim membagi masyarakat menjadi dua jenis, yaitu masyarakat pra-modern dan masyarakat modern. Dalam hal ini, Durkheim tidak secara jelas mengidentifikasi masyarakat pra-modern, yang kadang ia sebut sebagai masyarakat primitif.

Berangkat dari integrasi yang ada pada masing-masing masyarakat tersebut, Durkheim membedakan tipe-tipe masyarakat sosial, khususnya tipe solidaritas mekanis dan tipe solidaritas organis. Dalam masyarakat pra-modern, komunitas mendominasi individu karena mereka menyepakati keyakinan dan nilai-nilai tertentu. Setiap individu mempunyai kesadaran kolektif yang mencerminkan penggunaan dan realisasi bersama atas gagasan (pemahaman), nilai dan tujuan (untuk mencerminkan gagasan, nilai, dan tujuan bersama).

Masyarakat primitif (pra modern) adalah contoh masyarakat yang hidup dengan tipe solidaritas mekanis, dimana kehidupan masyarakatnya didasarkan atas kesamaan dan konsensus, dan tidak memiliki rasa ketergantungan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Individu-individu memiliki kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman hidup yang sama. Masyarakat

yang hidup bersama karena tunduk dengan norma dan aturan yang disepakati secara bersama. Perilaku menyimpang dianggap sebagai perilaku yang mengancam hidup kelompok secara keseluruhan dan merusak identitas anggota kelompok.

Masyarakat modern memiliki integrasi yang dipengaruhi oleh fungsi. Dalam artian terdapatnya perbedaan kemampuan antara individu satu dengan individu yang lainnya sehingga memiliki ketergantungan satu sama lainnya. Tipe solidaritas masyarakat modern adalah solidaritas organik. Dalam masyarakat ini, pembagian kerja menjadi lebih kompleks. Contoh masyarakat dengan tipe solidaritas organik adalah masyarakat yang hidup di lingkungan industri. Proses perubahan sosial terjadi melalui spesialisasi fungsional dan diferensiasi struktural akibat pembagian kerja. Dalam masyarakatnya, berkembang suatu hukum kontrak yang mengatur pertukaran barang dan jasa. Pelanggaran yang terjadi adalah suatu perilaku yang dapat merugikan orang lain sehingga hukum yang berlaku di dalam masyarakatnya adalah hukum yang bersifat memulihkan dan memudahkan interaksi.

Dalam membangun konsep fakta sosial, Durkheim menerapkannya dalam mempelajari gejala bunuh diri, yang bersifat terpisah dari arena psikologis dan filsafat. Penelitian Durkheim tentang gejala bunuh diri ini kemudian dituangkan dalam buku berjudul *Suicide*, yang didasarkan atas penelitian empiris terhadap suatu fenomena sosial.

Durkheim berpendapat bahwa gejala bunuh diri terjadi karena adanya fakta sosial sehingga menyebabkan perbedaan rata-rata bunuh diri. Menurut penelitian Durkheim, rata-rata orang melakukan bunuh diri disebabkan oleh status diri yang hidup sendiri (*single atau divorced people*), seperti janda atau duda. Selain itu, angka bunuh diri juga dipengaruhi oleh kepemilikan anak, di mana menurut penelitiannya, orang yang tidak punya anak cenderung untuk melakukan bunuh diri dari pada orang yang tidak

memiliki orang tua. Dalam hal kepercayaan, penelitian Durkheim memaparkan bahwa orang beragama Protestan lebih banyak melakukan bunuh diri daripada orang yang beragama Katolik, karena adanya tuntutan dalam agama yang mengharuskan orang Protestan untuk meraup kekayaan sebanyak-banyaknya karena dianggap manusia sejahtera adalah orang yang mendapat kasih Tuhan di dunia, yang diukur dengan jumlah kekayaan.

Durkheim memaparkan bahwa terdapat dua fungsi besar dalam masyarakat, yaitu integrasi yang dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola yang memiliki keserasian fungsi dan regulasi yang dimaknai sebagai suatu elemen yang memiliki esensi sebagai menciptakan keteraturan, kepastian hukum dan komitmen.

Berdasarkan dua fungsi tersebut, Durkheim menjadikannya sebagai variabel dalam menganalisa empat tipe bunuh diri. Empat tipe bunuh diri tersebut antara lain adalah bunuh diri yang bersifat *egoistic*, *altruistic*, *anomic*, dan *fatalistic*. *Altruistic*, disebabkan oleh integrasi di dalam masyarakat yang terlalu tinggi. Seorang individu memiliki keterikatan yang begitu kuat dengan kelompoknya sehingga mau merelakan diri demi kepentingan kelompok. Contohnya adalah hara-kiri yang dilakukan oleh samurai Jepang atau para pelaku bom bunuh diri.

Egoistic, disebabkan oleh integrasi yang begitu lemah, di mana seorang individu tidak menjalani interaksi dengan baik dan luas. Dalam kehidupannya individu tersebut tidak memiliki tujuan dan cita-cita yang sama dengan kehidupan kelompoknya sehingga ia akan merasa tersudut yang disebabkan oleh egoisme yang berlebihan dan akan mengakibatkan terjadinya bunuh diri. Contohnya adalah seorang lanjut usia yang melakukan bunuh diri karena sudah kehilangan sentuhan kontak dengan teman atau keluarganya.

Anomic, disebabkan oleh regulasi yang berjalan terlalu rendah di dalam masyarakat. Bunuh diri terjadi ketika tatanan, hukum-hukum, serta berbagai aturan moralitas sosial mengalami kekosongan. Contohnya adalah ketika pasca revolusi industri yang kemudian menggerogoti aturan dan moral. Contoh lain adalah ketika seseorang terlepas dari pekerjaannya, ia tidak bersinggungan lagi dengan regulasi yang mengatur dirinya sebelumnya, dan berada dalam posisi rawan yang dapat menyeretnya ke dalam perilaku yang rentan untuk melakukan bunuh diri.

Fatalistic, disebabkan oleh aturan-aturan yang begitu ketat. Contoh dari bunuh diri ini adalah seorang bawahan yang melakukan bunuh diri karena frustrasi akibat tekanan dari atasannya. Dalam melakukan penelitiannya, metode yang digunakan oleh Durkheim adalah penelitian empiris. Metodologi Durkheim berangkat dari pemahaman bahwa sosiologi lahir dan filsafat, namun harus dapat dipastikan dan dijelaskan secara ilmiah. Untuk menjelaskan tentang masyarakat, Durkheim kemudian berbicara mengenai kesadaran kolektif sebagai kekuatan moral yang mengikat individu pada suatu masyarakat. Melalui karyanya *The Division of Labor in Society*.

Durkheim mengambil pendekatan kolektivis atau solidaritas terhadap pemahaman yang membuat masyarakat bisa dikatakan primitif atau modern. Solidaritas itu berbentuk nilai-nilai, adat-istiadat, dan kepercayaan yang dianut bersama dalam ikatan kolektif. Masyarakat primitif atau sederhana dipersatukan oleh ikatan moral yang kuat, memiliki hubungan yang jalin-menjalin sehingga dikatakan memiliki Solidaritas Mekanik. Sedangkan pada masyarakat yang kompleks/modern, kekuatan kesadaran kolektif itu telah menurun karena terikat oleh pembagian kerja yang ruwet dan saling menggantung atau disebut memiliki Solidaritas Organik .

Selanjutnya dalam karyanya yang lain *The Role of Sociological Method* (1895), Durkheim membuktikan cara kerja

yang disebut Fakta Sosial, yaitu fakta-fakta dari luar individu yang mengontrol individu untuk berpikir dan bertindak dan memiliki daya paksa. Ini berarti struktur-struktur tertentu dalam masyarakat sangatlah kuat, sehingga dapat mengontrol tindakan individu dan dapat dipelajari secara objektif, seperti halnya ilmu alam. Fakta sosial terbagi menjadi dua bagian, pertama material meliputi birokrasi dan hukum dan kedua nonmaterial berupa kultur dan lembaga sosial.

3. Sosiologi Marxis (Karl Marx)

Karl Marx (1818-1883) melalui pendekatan materialisme historis percaya bahwa penggerak sejarah manusia adalah konflik kelas. Marx melihat bahwa distribusi kekayaan dan kekuasaan dalam masyarakat tidak merata. Karenanya, penguasa yang memegang kendali atas alat produksi, yaitu golongan borjuis atau kapitalis, selalu terlibat dalam ketegangan dengan para buruh atau proletar yang senantiasa menjadi korban eksploitasi.

Menurut Marx, sejarah segala masyarakat yang ada hingga sekarang pada hakikatnya adalah sejarah konflik kelas. Di zaman kuno ada kaum bangsawan yang bebas dan budak yang terikat. Di zaman pertengahan ada tuan tanah sebagai pemilik tanah dan hamba sahaya yang menggarap tanah bukan kepunyaannya. Bahkan di zaman modern ini juga ada majikan yang memiliki alat-alat produksi dan buruh yang hanya punya tenaga kerja untuk dijual kepada majikan. Di samping itu juga ada masyarakat kelas kaya (*the haves*) dan kelas masyarakat tak berpunya (*the haves not*). Semua kelas-kelas masyarakat ini dianggap Marx timbul sebagai hasil dari kehidupan ekonomi masyarakat

Proposisi utama Marx mengatakan bahwa kapitalisme adalah bentuk organisasi sosial yang didasarkan pada eksploitasi buruh oleh para pemilik modal. Kelas borjuis kapitalis mengambil keuntungan dari para pekerja dan kaum proletar. Mereka secara agresif mengembangkan dan

membangun teknologi produksi. Dengan demikian kapitalisme kemudian menciptakan sebuah sistem yang mendunia.

Sosiologi Marxis tentang kapitalisme menyatakan bahwa produksi komoditas mau tak mau membawa sistem sosial yang secara keseluruhan merefleksikan pengejaran keuntungan. Nilai-nilai produksi merasuk ke semua bidang kehidupan. Segala sesuatunya, penginapan, penyedia informasi, rumah sakit, bahkan sekolah kini menjadi bisnis yang menguntungkan. Tingkat keuntungannya menentukan berapa banyak staf dan tingkat layanan yang diberikan. Inilah yang dimaksud Marx bahwa infrastruktur ekonomi menentukan suprastruktur dalam hal ini kebudayaan, politik, hukum, dan ideologi.

Pendekatan Sosiologi Marxis menyimpulkan mengenai ide pembaruan sosial yang telah terbukti sebagai ide yang dianggap berhasil pada abad XX, sebagai berikut:

1. Semua masyarakat dibangun atas dasar konflik.
2. Penggerak dasar semua perubahan sosial adalah ekonomi.
3. Masyarakat harus dilihat sebagai totalitas yang di dalamnya ekonomi adalah faktor dominan.
4. Perubahan dan perkembangan sejarah tidaklah acak, tetapi dapat dilihat dari hubungan manusia dengan organisasi ekonomi.
5. Individu dibentuk oleh masyarakat, tetapi dapat mengubah masyarakat melalui tindakan rasional yang didasarkan atas premis-premis ilmiah.
6. Bekerja dalam masyarakat kapitalis mengakibatkan keterasingan (alienasi).
7. Dengan berdiri di luar masyarakat, melalui kritik, manusia dapat memahami dan mengubah posisi sejarah mereka.
8. Melalui kritik ilmiah dan aksi revolusioner, masyarakat dapat dibangun kembali.

Sosiologi Marxis ini selanjutnya dikembangkan oleh tokoh-tokoh abad XX, seperti Gramsci, Adorno, Althusser, dan Habermas.

4. Sosiologi Evolusioner (Herbert Spencer)

Dalam bukunya yang berjudul *Principles of Sociology* Spencer, seorang sosiolog Inggris yang banyak menggunakan bahan etnogafi secara luas dan sistematis mengemukakan teorinya bahwa masyarakat yang merupakan suatu organisme, berevolusi menurut pertumbuhan manusia, seperti tubuh yang hidup, masyarakat bermula seperti kuman, berasal dari massa yang dalam segala hal dapat dibandingkan dengan massa itu sebagian di antaranya akhirnya dapat didekati.

Suku primitif berkembang melalui peningkatan jumlah anggotanya, perkembangan itu mencapai suatu titik di mana suatu suku terpisah menjadi beberapa suku yang secara bertahap timbul beberapa perbedaan satu sama lain. Perkembangan ini bisa terjadi seperti pengulangan maupun terbentuk dalam proses yang lebih luas dalam penyatuan beberapa suku. Penyatuan ini terjadi tanpa melenyapkan pembagian yang sebelumnya disebabkan oleh pemisahan

Pertumbuhan masyarakat tidak sekedar menyebabkan perbanyakan dan penyatuan kelompok, tetapi juga meningkatkan kepadatan penduduk atau meningkatkan solidaritas, bahkan menyebabkan massa yang lebih akrab.

Dalam tahapan masyarakat yang belum beradab (*uncivilised*) itu bersifat homogen, karena mereka terdiri dari kumpulan manusia yang memiliki kewenangan, kekuasaan, dan fungsi yang relatif sama, terkecuali masalah jenis kelamin. Suku nomaden memiliki ikatan, karena dipersatukan oleh ketundukan kepada pemimpin suku. Ikatan ini mengikat hingga mencapai masyarakat beradab yang cukup diintegrasikan bersama selama seribu tahun lebih.

Jenis kelamin pria, diidentikkan dengan simbol-simbol yang menuntut kekuatan fisik seperti keprajuritan, menjadi pemburu, nelayan, dan lain-lain. Sedangkan kepemimpinan muncul sebagai konsekuensi munculnya keluarga yang sifatnya tidak tetap atau nomaden. Wewenang dan kekuasaan seseorang ditentukan oleh kekuatan fisik, kecerdikan seseorang dan selanjutnya kewenangan dan kekuasaan tersebut memiliki sifat yang diwariskan dalam keluarga tertentu.

Peningkatan kapasitas juga menandai proses pertumbuhan masyarakat. Organisasi-organisasi sosial yang mula-mula masih samar-samar pertumbuhannya mulai mantap secara perlahan-lahan, kemudian adat menjadi hukum, hukum menjadi semakin khusus dan institusi sosial semakin terpisah berbeda-beda. Jadi dalam hal memenuhi formula evolusi ada kemajuan menuju ukuran, ikatan, keanekaragaman bentuk dan kepastian yang semakin besar.

Perkembangan juga ditandai oleh adanya pemisahan unsur-unsur religius dan sekuler. Begitu-pun sistem pemerintahan bertambah kompleks, dan diferensiasi juga timbul dalam organisasi sosial termasuk tumbuhnya kelas-kelas sosial dalam masyarakat yang ditandai oleh suatu pembagian kerja.

Herbert Spencer menganjurkan Teori Evolusioner untuk menjelaskan perkembangan sosial. Logika argumen ini adalah bahwa masyarakat berevolusi dari bentuk yang lebih rendah (barbar) ke bentuk yang lebih tinggi (beradab). Ia berpendapat bahwa institusi sosial sebagaimana tumbuhan dan binatang, mampu beradaptasi terhadap lingkungan sosialnya. Dengan berlalunya generasi, anggota masyarakat yang mampu dan cerdas dapat bertahan. Dengan kata lain yang kuat dan layak akan bertahan hidup, sedangkan yang lemah dan tak layak akhirnya pasti akan punah. Konsep ini diistilahkan dengan *survival of the fittest*. Ungkapan ini sering dikaitkan dengan model evolusi dari rekan sejamannya yaitu Charles Darwin. Oleh karena itu teori tentang evolusi

masyarakat ini juga sering dikenal dengan nama Darwinisme Sosial.

Melalui teori evolusioner dan pandangan liberalnya itu, Spencer sangat populer di kalangan para penguasa yang menentang reformasi. Spencer setuju terhadap doktrin *laissez-faire* dengan mengatakan bahwa negara tak harus mencampuri persoalan individual kecuali fungsi pasif melindungi rakyat. Ia ingin kehidupan sosial berkembang bebas tanpa kontrol eksternal. Spencer menganggap bahwa masyarakat itu alamiah, dan ketidakadilan serta kemiskinan itu juga alamiah, karena itu kesejahteraan sosial dianggap percuma. Meski pandangan itu banyak ditentang, namun Darwinisme Sosial sampai sekarang masih terus hidup dalam tulisan-tulisan populer.

5. Sosiologi Weber (Max Weber)

Dalam memahami masyarakat, Weber melihat adanya pembagian kekuasaan dalam masyarakat menurut tingkat efisiensinya. Di sini berarti bahwa individu dapat melakukan sesuatu yang diinginkannya meskipun hal itu ditentang oleh individu lain. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa, seseorang mau melakukan sesuatu karena perintah dari orang lain. Dalam pandangan Weber, konsep dominasi mengacu pada konsepsi pemaksaan kekuasaan.

Weber membagi kekuasaan menjadi tiga jenis kekuasaan, yaitu Otoritas Tradisional, Otoritas Kharismatik dan Otoritas Rasional-Legal. Otoritas Tradisional adalah suatu konsep kekuasaan yang berlandaskan pada suatu kepercayaan akan aturan dan norma yang sudah ada sejak dahulu. Dalam Otoritas Tradisional, muncul suatu ciri khas di mana dalam pelaksanaannya muncul suatu kekuasaan yang bertindak secara sewenang-wenang dengan alasan bahwa aturan yang seperti itu memang sudah ditetapkan.

Sementara itu, Otoritas Kharismatik adalah suatu konsep kekuasaan yang berlandaskan kepada kepribadian seorang pemimpin. Seorang individu yang dianggap sangat

luar biasa diperlakukan sebagai orang yang berhak memiliki kekuasaan beserta dengan kelebihan dan kekuatan-kekuatan khas yang dimilikinya. Sedangkan Otoritas Rasional-Legal adalah suatu konsep kekuasaan yang berdasarkan kepada kebijakan dan norma, di mana seseorang dapat memerintah atau melakukan tugasnya berdasarkan norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku yang tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi, golongan, maupun tradisi. Kekuasaan Rasional-Legal lebih mengedapankan rasionalitas nilai.

Weber berpendapat bahwa dalam masyarakat modern, hanya Otoritas Rasional-Legal yang dapat diterapkan. Otoritas ini kemudian berkembang pula dalam masyarakat kapitalisme modern. Pada sistem kapitalisme modern, kelangsungan hidup Negara tergantung kepada organisasi birokrasi yang memiliki rasionalitas nilai. Berbeda dengan Marx yang menyatakan bahwa masyarakat kapitalis modern mengejar keuntungan dengan menggerogoti moral atau menindas buruh. Weber lebih menekankan masyarakat kapitalisme modern memiliki kewajiban bekerja dengan disiplin yang tegas.

Buku yang sangat terkenal yang ditulis oleh Weber adalah *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* (1904). Dalam buku ini, Weber mengutarakan penjelasannya tentang Etika Protestan yang berkembang seiring dengan kemunculan Kapitalisme di Eropa Barat, di mana saat itu berkembang suatu sekte bernama Sekte Calvinisme dalam agama Protestan. Weber memiliki argumen bahwa ajaran Calvinisme ini mengharuskan umatnya untuk menjadikan dunia sebagai tempat yang makmur, dan harus mendapatkannya dengan kerja keras. Dengan mencapai kemakmuran di dunia itu, mereka akan mendapatkan berkah yang akan menuntun mereka masuk surga. Namun kekayaan tidak boleh digunakan untuk berfoya-foya, karena ajaran Calvinisme mewajibkan umatnya untuk hidup sederhana. Oleh karena itu, kekayaan yang didapatkan tersebut

diinvestasikan kembali dalam usaha mereka. Dengan cara seperti ini, kapitalisme di Eropa Barat berkembang.

Weber, sejatinya, memiliki fokus perhatian pada individu, pola dan regulasi tindakan, dan bukan pada kolektivitas di dalam masyarakat. Weber mengakui untuk beberapa tujuan, kita mungkin harus memperlakukan kolektivitas sebagai individu. Namun untuk menafsirkan tindakan subjektif dalam karya sosiologi, kolektivitas-kolektivitas ini harus diperlakukan semata-mata sebagai resultan dan model organisasi dari tindakan individu tertentu, karena semua itu dapat diberlakukan sebagai agen dalam tindakan yang dapat dipahami secara subjektif.

Max Weber, dalam rumusan konsep sosiologinya, menyatakan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang berupaya memahami pengamatan tindakan sosial. Sosiologi merupakan disiplin ilmu yang mengupayakan pemahaman interpretatif dari aksi sosial dalam rangka untuk mencapai sebuah penjelasan dari aksi tersebut dan efek-efek yang ditimbulkannya. Weber memiliki pandangan yang berbeda dengan Durkheim. Menurutnya tidak semua tindakan manusia dapat dianggap sebagai tindakan sosial. Suatu tindakan hanya dapat dikatakan sebagai tindakan sosial apabila tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain, dan juga berorientasi pada perilaku orang lain.

Dalam pemahamannya terhadap individu di dalam masyarakat, bagi Weber, yang harus dikaji dan menjadi pokok persoalan sosiologi adalah proses pendefinisian sosial yang merupakan akibat-akibat dari suatu aksi karena interaksi sosial. Sosiologi Weber lebih menekankan konsep tentang makna suatu tindakan sosial (*social action*), atau dengan kata lain Weber menganggap bahwa suatu tindakan sosial itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Menurut Weber, seorang individu secara aktif menciptakan kehidupan sosialnya sendiri, sedangkan struktur dan pranata sosial hanya merupakan wadah tempat proses pendefinisian sosial

dan proses interaksi berlangsung. Fokus perhatian Weber menjadi lebih bersifat khusus, bebas, dan personal.

Ada empat tipologi tindakan sosial yang dikonsepsi oleh Max Weber. Pertama, rasionalitas instrumental, yaitu suatu tindakan sosial yang mempertimbangkan tujuan dan alat-alat apa yang digunakan. Apakah suatu alat tertentu memiliki efisiensi yang tinggi dan efektif untuk mencapai tujuan. Rasionalitas tujuan, yaitu suatu tindakan sosial yang didasarkan pada nilai dan tujuan yang sudah ditentukan. Alat hanya sebagai pertimbangan dan perhitungan yang sadar. Dalam tindakan ini, aktor dari tindakan sosial tersebut tidak terlalu memperhitungkan apakah cara-cara yang dipilihnya merupakan cara yang paling tepat atau tidak, yang menjadi utama adalah tujuan.

Pandangan lain yang disampaikan Weber adalah tentang bagaimana perilaku individu dapat mempengaruhi masyarakat secara luas. Inilah yang disebut sebagai memahami tindakan sosial. Menurut Weber, tindakan sosial dapat dipahami dengan memahami niat, ide, nilai, dan kepercayaan sebagai motivasi sosial. Pendekatan ini disebut *verstehen* (pemahaman).

Weber juga mengkaji tentang rasionalisasi. Menurut Weber, peradaban Barat adalah semangat Barat yang rasional dalam sikap hidup. Rasional menjelma menjadi operasional, berpikir sistematis langkah demi langkah. Rasionalisasi adalah proses yang menjadikan setiap bagian kecil masyarakat terorganisir, profesional, dan birokratif. Meski akhirnya Weber prihatin betapa intervensi negara terhadap kehidupan warga kian hari kian besar.

Dalam karyanya yang terkenal lainnya, *Politik sebagai Panggilan*, Weber mendefinisikan negara sebagai sebuah lembaga yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekuatan fisik secara sah, sebuah definisi yang menjadi penting dalam studi tentang ilmu politik.

6. Filsafat Uang (Georg Simmel)

Georg Simmel (1858-1919) sangat terkenal karena karyanya yang spesifik tentang tindakan dan interaksi individual, seperti bentuk-bentuk interaksi, tipe-tipe orang berinteraksi, kemiskinan, pelacuran, dan masalah-masalah berskala kecil lainnya. Karya-karya Simmel ini kemudian menjadi rujukan tokoh-tokoh sosiologi di Amerika.



Georg Simmel (Tahun 1858 - 1918)

Karya yang terkenal dari Simmel adalah tentang Filsafat Uang. Simmel sebagai sosiolog cenderung bersikap menentang terhadap modernisasi dan sering disebut bervisi pesimistik. Pandangannya sering disebut Pesimisme Budaya. Menurut Simmel, modernisasi telah menciptakan manusia tanpa kualitas karena manusia terjebak dalam rasionalitasnya sendiri. Sebagai contoh, begitu teknologi industri sudah mulai canggih, maka keterampilan dan kemampuan tenaga kerja secara individual makin kurang penting. Bisa jadi semakin modern teknologi, maka kemampuan tenaga individu makin merosot bahkan cenderung malas.

Di sisi lain, gejala monetisasi di berbagai faktor kehidupan telah membelenggu masyarakat terutama dalam hal pembekuan kreatifitas orang, bahkan mampu mengubah kesadaran. Sebagai contoh bahwa uang secara ideal memang sebagai alat pembayaran, tetapi karena kekuatannya, uang menjadi sarana pembebasan manusia atas manusia. Artinya uang sudah tidak dipahami sebagai fungsi alat, tetapi sebagai tujuan. Kekuatan kuantitatifnya telah mampu mengukur berbagai jarak sosial yang membentangi antar individu, seperti cinta, tanggung jawab, dan bahkan mampu membebaskan atas kewajiban dan hukuman sosial. Barang siapa memiliki uang dialah yang memiliki kekuatan.

C. Teori Sosiologi Modern

1. Teori Fungsionalisme Struktural

Teori ini menekankan pada keteraturan dan mengabaikan konflik serta perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep-konsep utamanya adalah: fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifes dan keseimbangan (*equilibrium*). Dalam teori ini suatu masyarakat dilihat sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerjasama secara terorganisasi yang bekerja dalam suatu cara yang agak teratur menurut seperangkat peraturan dan nilai yang dianut oleh sebagian besar masyarakat tersebut.²⁸

Dalam teori fungsionalisme struktural masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang stabil dengan suatu kecenderungan ke arah keseimbangan, yaitu suatu kecenderungan untuk mempertahankan sistem kerja yang selaras dan seimbang. Dengan kata lain, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pada bagian yang lain. Asumsi dasarnya adalah setiap struktur dalam sistem sosial,

²⁸ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Rajawali Press, Jakarta 1984, halaman 28

fungsional terhadap yang lain. Para tokoh dalam perspektif fungsionalis antara lain : Talcott Parsons, Kingsley Davis, dan Robert K. Merton.

Talcott Parsons (1902-1979) mensistemasi rumusan-rumusan terdahulu tentang pendekatan fungsionalis terhadap sosiologi. Parsons mengawali dari masalah aturan yang dikemukakan filsuf terdahulu Thomas Hobbes (1585-1679). Hobbes mengatakan bahwa manusia mungkin secara alamiah saling mencakar satu sama lain kecuali jika dikontrol dan dikekang secara sosial.



Talcott Parsons (Tahun 1902 - 1979)

Berpijak dari pandangan itu, Parsons mengembangkan Teori Sistem yang menguraikan panjang lebar tentang apa yang disebut prasyarat fungsional bagi keberlangsungan sebuah masyarakat. Prasyarat tersebut adalah A-G-I-L:

- a. Adaptation (adaptasi): bagaimana sebuah sistem beradaptasi dengan lingkungannya. Konsep ini dikaitkan dengan faktor ekonomi.
- b. Goal Attainment (pencapaian tujuan): menentukan tujuan yang kepadanya anggota masyarakat diarahkan. Konsep ini dikaitkan dengan faktor politik.

- c. Integration (integrasi): kebutuhan untuk mempertahankan keterpaduan sosial. Konsep ini dikaitkan dengan faktor sosial.
- d. Latent Pattern Maintenance (pemeliharaan pola): sosialisasi atau reproduksi masyarakat agar nilai-nilai tetap terpelihara. Konsep ini dikaitkan dengan faktor budaya.

Ide Parsons mengenai Teori Sistem adalah bahwa masyarakat merupakan sistem yang mengatur diri sendiri. Perubahan dalam satu bagian dari sistem akan menghasilkan reaksi dan kompensasi pada bagian yang lain. Agar masyarakat dapat bertahan, diperlukan unsur-unsur prasyarat fungsional yang saling mendukung, yaitu: kontrol sosial, sosialisasi, adaptasi, sistem kepercayaan, kepemimpinan, reproduksi, stratifikasi sosial, dan keluarga.

2. Teori Konflik

Teori ini dibangun untuk menentang secara langsung terhadap Teori Fungsionalisme Struktural. Para teori konflik melihat bahwa masyarakat berada dalam konflik yang terus menerus diantara kelompok dan kelas. Bertentangan dengan para fungsionalis yang melihat keadaan normal masyarakat sebagai suatu keseimbangan yang mantap.

Perspektif konflik secara luas terutama didasarkan pada karya Karl Marx, yang melihat pertentangan dan eksploitasi kelas sebagai penggerak utama kekuatan-kekuatan dalam sejarah. Setelah untuk waktu yang lama perspektif konflik diabaikan oleh para sosiolog, kemudian perspektif tersebut telah dibangkitkan kembali oleh C. Wright Mills (1956-1959), Lewis Coser (1956) dan yang lain Ralph Dahrendorf (1959), Randall Collins, dan Jonathan Turner.

Sekalipun Marx memusatkan perhatiannya pada pertentangan antar kelas untuk pemilikan atas kekayaan yang produktif, para teoretisi konflik modern berpandangan

sedikit lebih sempit. Mereka melihat perjuangan meraih kekuasaan dan penghasilan sebagai suatu proses yang berkesinambungan terkecuali satu hal, dimana orang-orang muncul sebagai penentang kelas, bangsa, kewarganegaraan dan bahkan jenis kelamin.

Para teori konflik memandang suatu masyarakat terikat bersama karena kekuatan dari kelompok atau kelas yang dominan. Mereka mengklaim bahwa nilai-nilai bersama yang dilihat oleh para fungsionalis sebagai suatu ikatan pemersatu tidaklah benar-benar suatu konsensus tersebut adalah ciptaan kelompok atau kelas yang dominan untuk memaksakan nilai-nilai serta peraturan mereka terhadap semua orang.

Pada teori konflik, para fungsionalis gagal mengajukan pertanyaan, secara fungsional bermanfaat untuk siapa. Para teoretisi konflik menuduh para fungsionalis berasumsi bahwa "keseimbangan yang serasi" bermanfaat bagi setiap orang sedangkan hal itu menguntungkan beberapa orang dan merugikan sebagian lainnya.

Pada teori konflik memandang keseimbangan suatu masyarakat yang serasi sebagai suatu khayalan dari mereka yang tidak berhasil mengetahui bagaimana kelompok yang dominan telah membungkam mereka yang dieksploitasi.

3. Teori Kritis

Teori kritis memandang bahwa kenetralan teori tradisional/klasik sebagai kedok pelestarian keadaan yang ada untuk mempertahankan statusquo. Padahal menurut Teori Kritis, realitas yang ada itu adalah realitas semu yang menindas, oleh karena itu harus disibak, dibongkar dengan jalan mempertanyakan mengapa sampai menjadi realitas yang demikian. Teori kritis lahir untuk membuka seluruh selubung ideologis yang tak rasional yang telah menyalakan kebebasan dan kejernihan berpikir manusia modern.

Berpikir kritis adalah berpikir dialektis, yaitu berfikir secara totalitas timbal balik. Totalitas berarti keseluruhan

yang mempunyai unsur-unsur saling bernegasi (mengingkari atau diingkari), berkontradiksi (melawan atau dilawan), dan saling bermediasi (memperantarai atau diperantarai). Pemikiran dialektis menolak kesadaran yang abstrak, misalnya individu dan masyarakat.

Pemanfaatan Teori Kritis dalam pembangunan sebagai wujud dari perubahan sosial tentunya mempunyai prasyarat. Pertama, harus curiga dan kritis terhadap masyarakat. Kedua, harus berpikir secara historis mencari sebab-musababnya. Ketiga, tidak memisahkan antara teori dan praktis. Berbicara teori kritis tidak terlepas dari aliran pemikiran Mazhab Frankfurt. Kelompok teori kritis Jerman ini terabaikan ketika mereka menulis pada tahun 1930-1940-an tetapi mulai diperhatikan sekitar tahun 1960-an. Mereka melibatkan diri dalam persoalan bahwa masyarakat tidak memperlihatkan perkembangan revolusioner sederhana seperti yang diramalkan Marx. Mazhab Frankfurt ini beranggotakan tokoh-tokoh kiri yang terkenal, antara lain: Felix Weil, Friedrich Pollock, Max Horkheimer, Karl Wittfogel, Theodor Adorno, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, dan Erich Fromm.

4. Teori Interaksionisme Simbolik

Teori perspektif ini tidak menyarankan teori-teori besar tentang masyarakat karena istilah masyarakat, negara, dan lembaga masyarakat adalah abstraksi konseptual saja, sedangkan yang dapat ditelaah secara langsung hanyalah orang-orang dan interaksinya saja.

Para ahli interaksi simbolik seperti G.H. Mead, C.H. Cooley, dan John Dewey memusatkan perhatiannya terhadap interaksi antara individu dan kelompok. Mereka menemukan bahwa orang-orang berinteraksi terutama dengan menggunakan simbol-simbol yang mencakup tanda, isyarat, dan yang paling penting, melalui kata-kata secara tertulis dan lisan. Suatu kata tidak memiliki makna yang melekat dalam kata itu sendiri, melainkan hanya suatu bunyi,

dan baru akan memiliki makna bila orang sependapat bahwa bunyi tersebut mengandung suatu arti khusus.

Charles Horton Cooley (1846-1929) memandang bahwa hidup manusia secara sosial ditentukan oleh bahasa, interaksi dan pendidikan. Secara biologis manusia tiada beda, tapi secara sosial tentu sangat berbeda. Perkembangan historislah yang menyebabkan demikian. Dalam analisisnya mengenai perkembangan individu, Cooley mengemukakan teori yang dikenal dengan *Looking Glass-Self* atau Teori Cermin Diri. Menurutnya di dalam individu terdapat tiga unsur: pertama, bayangan mengenai bagaimana orang lain melihat kita, kedua adalah bayangan mengenai pendapat orang lain mengenai diri kita, dan ketiga adalah rasa diri yang bersifat positif maupun negatif.

George Herbert Mead (1863-1931), salah satu tokoh sentra interaksionisme simbolik menggambarkan pembentukan diri atau tahap sosialisasi dalam ilustrasi pertumbuhan anak, dimana terdapat tiga tahap pertumbuhan anak, yakni 1) tahap bermain (*play stage*); 2) tahap permainan (*game stage*); dan 3) tahap mengambil peran orang lain (*taking role the other*).

Manusia tidak bereaksi terhadap dunia sekitar secara langsung, mereka bereaksi terhadap makna yang mereka hubungkan dengan benda-benda dan kejadian-kejadian sekitar mereka, lampu lalu lintas, antrian pada loket karcis, peluit seorang polisi dan isyarat tangan. W.I. Thomas (1863-1947), mengungkapkan tentang definisi suatu situasi, yang mengutarakan bahwa kita hanya dapat bertindak tepat bila kita telah menetapkan sifat situasinya. Bila seorang laki-laki mendekat dan mengulurkan tangan kanannya, kita mengartikannya sebagai salam persahabatan, bila mendekat dengan tangan mengepal situasinya akan berlainan. Kegagalan merumuskan situasi perilaku secara benar dan bereaksi dengan tepat, dapat menimbulkan akibat-akibat yang kurang menyenangkan.

Para ahli dalam bidang perspektif interaksi modern, seperti Erving Goffman dan Herbert Blumer menekankan bahwa orang tidak menanggapi orang lain secara langsung, sebaliknya mereka menanggapi orang lain sesuai dengan bagaimana mereka membayangkan orang itu. Dalam perilaku manusia, kenyataan bukanlah sesuatu yang tampak. Kenyataan dibangun dalam alam pikiran orang-orang sewaktu mereka saling menilai dan menerka perasaan serta gerak hati satu sama lain. Apakah seseorang adalah teman atau musuh, atau seorang yang asing bukanlah karakteristik dari orang tersebut. Baik buruknya dia, diukur oleh pandangan orang lain tentang dia.

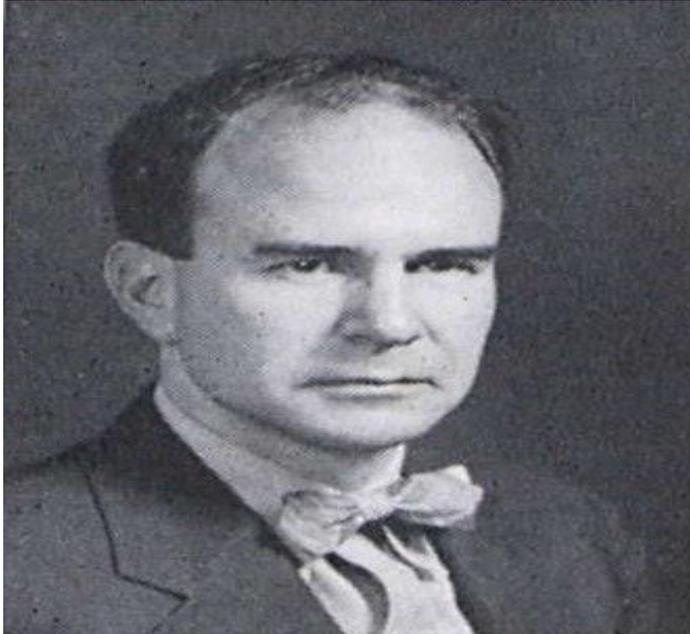
Perspektif interaksionis simbolis memusatkan perhatiannya pada arti-arti apa yang ditemukan orang pada perilaku orang lain, bagaimana arti ini diturunkan dan bagaimana orang lain menanggapinya. Para ahli perspektif interaksi telah banyak sekali memberikan sumbangan terhadap perkembangan kepribadian dan perilaku manusia.

5. Teori Pertukaran Sosial

Dalam esensi, struktur sosial kehidupan manusia saling memerlukan satu sama lain. Seseorang dianggap memberikan kontribusi bagi sesama manusia dalam konteks hubungan sosial ketika ia berpartisipasi dalam transaksi sosial yang kemanusiaan. George C. telah menguraikan konsep transaksi sosial. Homans menguraikan dalam teorinya tentang social exchange mengenai berbagai proposisi sosial manusia, seperti proposisi kesuksesan, stimulus, nilai, deprivasi-satisfikasi, dan hukuman-agresi. Hasilnya, proposisi-proposisi tersebut dapat menjadi pondasi bagi proses belajar sosial manusia.

Tokoh utama teori pertukaran sosial adalah George C. Homans dan Peter M. Blau. Teori ini dibangun sebagai reaksi terhadap paradigma fakta sosial. Homans mengakui menyerang paradigma fakta sosial secara langsung. Tetapi Homans mengakui bahwa fakta sosial berperan penting

terhadap perubahan tingkah laku yang bersifat psikologi yang menentukan bagi munculnya fakta sosial baru berikutnya. Menurut Homans sebenarnya yang menjadi faktor utama dan mendasar adalah variabel yang bersifat psikologi.



George Casper Homans (11 Agustus 1910 - 29 Mei 1989)

Teori pertukaran sosial mendasarkan sistem deduksinya pada prinsip-prinsip psikologi yaitu pertama tindakan sosial dilihat equivalen dengan tindakan ekonomis, kedua dalam rangka interaksi sosial, mempertimbangkan juga keuntungan yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkannya (*cost benefit ratio*). Proposisi yang perlu diperhatikan adalah semakin tinggi ganjaran (*reward*) yang diperoleh maka semakin besar kemungkinan sesuatu tingkah laku akan diulang. Demikian sebaliknya, semakin tinggi biaya atau ancaman hukuman (*punishment*) yang akan diperoleh semakin kecil kemungkinan tingkah laku serupa akan diulang. Adanya hubungan berantai antara berbagai stimulus dan antara berbagai tanggapan.

Dari segi etimologi, teori pertukaran sosial berasal dari kata exchange dan change yang berarti pertukaran atau tukar.²⁹ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pertukaran diartikan sebagai kegiatan menukar atau mempertukarkan barang; serta pergantian atau peralihan. Sedangkan sosial berhubungan dengan masyarakat, mengutamakan kepentingan umum seperti tolong-menolong atau berderma.³⁰

6. Teori Strukturalisme

Teori strukturalisme dipelopori oleh perintis linguistik, yakni Ferdinand de Saussure (1857-1913) yang mengawali teorinya dengan sebuah kajian tentang bahasa tetapi berakhir dengan kajian atas segala sesuatu sebagai struktur. Teori semiotika atau studi atas tanda-tanda dimulai dari aksioma terkenal bahwa bahasa adalah sistem yang terstruktur, kebudayaan kemudian diuji sebagai sistem terstruktur yang sama, dan selanjutnya masyarakat secara keseluruhan.

Pada akhirnya kita semua terjebak dalam bahasa dan kita memperoleh budaya melalui bahasa. Kita adalah makhluk yang berbicara. Oleh karena itu untuk memahami sebuah budaya, kita harus mengerti struktur yang berfungsi di dalamnya dan pola dasar yang membentuknya.

Tokoh strukturalis yang terkenal di antaranya adalah Roland Barthes yang menganalisis tentang tanda-tanda dalam budaya populer. Pentingnya media massa dalam menyebarkan pandangan ideologis tentang dunia didasarkan pada kemampuannya untuk membuat tanda, citra, penanda, bekerja dalam cara tertentu.

²⁹ S. Wojowasito. 2007. *Kamus Lengkap Inggris - Indonesia. Indonesia - Inggris*, (Jakarta: Hasta), hal. 54.

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 4, (Jakarta: Balai Pustaka), hal. 1217.

D. Teori Sosiologi Postmodern

Teori sosiologi Postmodern lahir dari para pemikir aliran postmodernisme. Postmodernisme merupakan kritik atas masyarakat modern dan kegagalan memenuhi janji-janjinya. Pemikir postmodern cenderung menolak apa yang biasanya dikenal dengan pandangan dunia, metanarasi, dan totalitas.

Postmodernisme cenderung menggembar-gemborkan fenomena besar pramodern, seperti: emosi, perasaan, intuisi, refleksi, spekulasi, pengalaman pribadi, kebiasaan, kekerasan, metafisika, tradisi, kosmologi, magis, mitos, sentimen keagamaan, dan pengalaman mistik.

Teori sosiologi postmodernisme dapat dibagi menjadi tiga teori yaitu teori kekuasaan dan wacana, teori simulasi, dan teori narasi besar.

1. Teori Kekuasaan dan Wacana (Michael Foucault)

Dalam teori kekuasaan dan wacana sebagaimana yang disampaikan oleh tokohnya Michael Foucault (1926-1984), Perhatian Foucault terpusat pada bagaimana pengetahuan yang dihasilkan dan digunakan dalam masyarakat, dan bagaimana kekuasaan dan wacana terkait dengan pengetahuan. Radikalisme Foucault adalah bagian dari apa yang disebut kecenderungan posmodern dalam sosiologi, yaitu penolakan atas teori besar (*metanarasi*) tentang masyarakat dan sejarah.



Michael Foucault
(Sumber: Kompasiana. Com)

Foucault melihat bahwa wacana tertentu menghasilkan kebenaran dan pengetahuan tertentu yang menimbulkan efek kuasa. Kebenaran di sini, oleh Foucault tidak dipahami sebagai sesuatu yang datang dari langit, bukan juga sebuah konsep yang abstrak. Akan tetapi ia diproduksi, setiap kekuasaan menghasilkan dan memproduksi kebenaran sendiri melalui sebagaimana khalayak digiring untuk mengikuti kebenaran yang telah ditetapkan. Di sini, setiap kekuasaan berpretensi menghasilkan rezim kebenaran tertentu yang disebarkan lewat wacana yang dibentuk oleh kekuasaan.

2. Teori Simulasi (Jean Baudrillard)

Jean Baudrillard dikenal sebagai seorang ahli dalam teori kebudayaan, sekaligus sebagai seorang filosof, komentator politik, sosiolog, dan fotografer asal Perancis. Karya-karya Baudrillard sering dihubungkan dengan pemikiran postmodernisme dan poststrukturalisme. Jean Baudrillard dilahirkan dalam keluarga yang kurang mampu di Reims pada tanggal 20 Juni 1929.



Jean Baudrillard
(Sumber: Wikipedia)

Dalam hal pemikirannya, pengaruh dari Marshall McLuhan yang menyoroti signifikansi media massa dalam sudut pandang sosiologis turut memengaruhi pikirannya. Dipicu semangat pemberontakan mahasiswa di Universitas Nanterre pada tahun 1968, ia berkolaborasi dengan jurnal bernama *Utopie* yang terinspirasi oleh anarcho-situasionisme, teori media, dan Marxisme struktural. Di sana, ia menulis sejumlah artikel teoritis mengenai kemakmuran kapitalis dan kritik terhadap teknologi.

Pemikiran Baudrillard juga terinspirasi oleh konsep-konsep dari beberapa filsuf lain yang membahas tentang objektivitas dan antarmuka linguistik-sosiologis (Mauss), Surealisme dan Erotisme (Bataille), Psikoanalisis serta Freud, dan khususnya paham Marxisme. Kemudian dia menjadi sosok yang dipuja karena pemahamannya akan situasi yang muncul dalam era posmodernisme. Filosofi Baudrillard berfokus pada dua gagasan utama, yaitu "hyperreality" dan "simulasi". Istilah ini merujuk pada hal-hal yang tidak nyata dan imajiner dalam budaya modern di era komunikasi dan informasi massa.³¹

Menurut Jean Baudrillard, masyarakat itu tidak ada. Jika ada, ia sepenuhnya tersusun dari tanda-tanda atau simulasi yang juga diistilahkan dengan istilah *simulacra* karena kita hidup dalam jenis masyarakat pascaindustri. Hal ini dapat dibuktikan bahwa komunikasi televisual dan tandatandanya telah begitu mendominasi realitas global sehingga orang-orang sangat kesulitan untuk memutuskan mana kenyataan yang sebenarnya.

Baudrillard berpandangan bahwa apa yang disebut realitas tidak lagi stabil dan tidak dapat dilacak dengan konsep saintifik tradisional. Namun masyarakat semakin tersimulasi, tertipu dalam citra dan wacana yang secara cepat dan keras menggantikan pengalaman manusia dan realitas.

³¹ Muhammad Azwar. 2014. *Teori Simulakrum Jean Baudrillard dan Upaya Pustakawan Mengidentifikasi Informasi Realitas*, Jurnal Khizanah Al Hikmah Vol. 2, No. 1, ISSN: 2354-9629, hal. 39-40.

Iklan adalah salah satu kendaraan utama simulasi ini. Simulasi juga cenderung memikirkan hidup untuk mereka sendiri, melebih-lebihkan kenyataan atas sesuatu.

3. Teori Narasi Besar (*Jean Francois Lyotard*)

Lyotard berpandangan bahwa narasi besar atau cerita tentang sejarah dan masyarakat yang diungkap oleh Marxisme dan ahli lain, harus diabaikan dalam dunia postmodern, majemuk, dan polivokal ini. Lyotard lebih menyukai cerita kecil tentang masalah sosial yang dikatakan oleh manusia itu sendiri pada tingkat kehidupan dan perjuangan mereka di tingkat lokal.



Jean Francois Lyotard
(Sumber: Jurnal Post)

Jean Francois Lyotard adalah seorang filsuf poststrukturalisme yang terkenal dengan pemikiran postmodernisme. Ia dikenal dengan gagasannya tentang penolakan Grand Narrative, yaitu narasi besar yang bersifat universal dan total yang memiliki fungsi legitimasi.³² Menurut Lyotard, menolak narasi besar berarti menolak gagasan tentang penyatuan, universalitas, dan totalitas. Menurutnya, perbedaan yang paling mencolok antara filsafat

³² Sedgwick, Peter. 1997. *Descartes to Derrida: an Introduction to European Philosophy*, (London: Blackwell Publisher), hal. 267.

postmodernisme dan filsafat modernisme terletak pada hal tersebut.³³

Dalam pemikiran filosofisnya, Jean Francois Lyotard merasakan pengaruh yang kuat dari pemikiran-pemikiran besar seperti Karl Marx, Nietzsche, Immanuel Kant, dan Sigmund Freud. Pengaruh Karl Marx dapat terlihat jelas dari sikapnya yang tidak mengunggulkan kesadaran universal. Sementara itu, pemikiran Nietzsche berdampak pada pandangan Lyotard bahwa tidak ada perspektif yang mendominasi dalam ilmu pengetahuan. Setiap teori tidak memiliki sifat universal yang obyektif. Dan yang diambil Immanuel Kant berdampak pada gagasan yang membedakan antara domain ilmiah, etis, dan estetis, di mana masing-masing memiliki otonomi, aturan, dan kriteria sendiri.³⁴

Penurunan kepercayaan terhadap narasi besar timbul akibat proses delegitimasi atau krisis legitimasi, yang membuat fungsi legitimasi narasi besar menghadapi tantangan yang kompleks. Sebagai contoh, delegitimasi telah menjadi suatu hal yang umum dalam ilmu pengetahuan sejak akhir abad ke-19 dikarenakan kemajuan teknologi dan penyebaran kapitalisme. Pada zaman masyarakat pasca industri, ilmu saat ini sedang mengalami kehilangan legitimasi karena tidak mampu mempertahankan kepercayaan yang sebelumnya diterimanya.

³³ Lyotard, Jean Francois. 1984. *The Postmodern Condition*, (Manchester: a Report on Knowledge), hal. Xxiv.

³⁴ Yusuf, Akhyar. 2009/2020. *Pengetahuan Ilmiah dan Pengetahuan Naratif pada Posmodernisme Lyotard*. Makalah. Departemen Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 4.

BAB III

STRUKTUR SOSIAL

A. Pengantar

Struktur berasal dari bahasa latin yaitu *structum* yang artinya menyusun. Struktur sosial merupakan suatu bentuk susunan beberapa pola hidup dalam masyarakat yang didalamnya terdapat kelompok sosial, institusi sosial, dan stratifikasi sosial. Adanya pembagian struktur sosial berdasarkan sudut pandang tertentu. Klasifikasi ini dibuat oleh para ahli sosiologi untuk memahami dengan baik pembagian dan jenis struktur sosial sebagai salah satu bagian dari disiplin ilmu sosiologi. Soerjono Soekanto melihat struktur sosial sebagai hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial serta perannya yang dimainkan oleh individu atau kelompok dalam struktur tersebut.

B. Kelompok Sosial

1. Pengertian

Secara sosiologis pengertian kelompok sosial adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai hubungan dan saling berinteraksi satu sama lain dan dapat mengakibatkan tumbuhnya perasaan bersama atau kebersamaan. Disamping itu terdapat beberapa definisi dari para ahli mengenai kelompok sosial. Menurut Josep S Roucek dan Roland S Warren kelompok sosial adalah suatu kelompok yang meliputi dua atau lebih manusia, yang diantara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dipahami oleh para anggotanya atau orang lain secara keseluruhan. Sedangkan menurut Robert Bierstedt kelompok sosial memiliki banyak jenis dan dapat dibedakan berdasarkan ada tidaknya organisasi, hubungan sosial, dan kesadaran sejenis.

2. Proses Terbentuknya Kelompok Sosial

Menurut Abdul Syani, terbentuknya suatu kelompok sosial karena adanya naluri manusia yang selalu ingin hidup bersama. Manusia membutuhkan komunikasi dalam membentuk kelompok, karena melalui komunikasi orang dapat mengadakan ikatan dan pengaruh psikologis secara timbal balik. Ada dua hasrat pokok manusia sehingga ia terdorong untuk hidup berkelompok, yaitu pertama hasrat untuk bersatu dengan manusia lain di sekitarnya, dan kedua hasrat untuk bersatu dengan situasi alam sekitarnya.

3. Syarat Terbentuknya Kelompok Sosial

Kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama dan saling berinteraksi. Untuk itu, setiap himpunan manusia agar dapat dikatakan sebagai kelompok sosial, haruslah memenuhi persyaratan yang antara lain sebagai berikut:

1. Setiap anggota kelompok memiliki kesadaran bahwa mereka merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan.
2. Ada kesamaan faktor yang dimiliki anggota-anggota kelompok tersebut sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor-faktor kesamaan tersebut, antara lain persamaan nasib, Persamaan kepentingan, Persamaan tujuan, Persamaan ideologi politik, dan Persamaan lawan.
3. Kelompok sosial memiliki struktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku.
4. Kelompok sosial memiliki sistem dan berproses.³⁵

4. Macam-macam kelompok sosial

Pada masyarakat yang kompleks, biasanya setiap manusia tidak hanya mempunyai satu kelompok sosial tempat ia menjadi anggotanya. Namun, ia juga menjadi anggota beberapa kelompok sosial sekaligus. Terbentuknya

³⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, 1986, halaman 103

kelompok-kelompok sosial ini biasanya didasari oleh kekerabatan, usia, jenis kelamin, pekerjaan, komunitas, hobby, dan kedudukan. Keanggotaan masing-masing kelompok sosial tersebut akan memberikan kedudukan dan prestise tertentu. Namun yang perlu digarisbawahi adalah sifat keanggotaan suatu kelompok tidak selalu bersifat sukarela, tapi ada juga yang sifatnya keharusan. Misalnya, selain sebagai anggota kelompok di tempatnya bekerja, Pak Tomo juga anggota masyarakat, anggota perkumpulan bulu tangkis, anggota Perhimpunan Advokat Indonesia, anggota keluarga, anggota Paguyuban masyarakat Jawa dan sebagainya.

Menurut Soerjono Soekanto kelompok sosial dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam, yaitu:

- a. Berdasarkan besar kecilnya anggota kelompok.

Menurut George Simmel, besar kecilnya jumlah anggota kelompok akan mempengaruhi kelompok dan pola interaksi sosial dalam kelompok tersebut. Dalam penelitiannya, Simmel memulai dari satu orang sebagai perhatian hubungan sosial yang dinamakan *monad*. Kemudian *monad* dikembangkan menjadi dua orang atau *diad*, dan tiga orang atau *triad*, dan kelompok-kelompok kecil lainnya. Hasilnya semakin banyak jumlah anggota kelompoknya, pola interaksinya juga berbeda.

- b. Berdasarkan derajat interaksi dalam kelompok

Derajat interaksi ini juga dapat dilihat pada beberapa kelompok sosial yang berbeda. Kelompok sosial seperti keluarga, rukun tetangga, masyarakat desa, akan mempunyai kelompok yang anggotanya saling mengenal dengan baik (*face-to-face groupings*). Hal ini berbeda dengan kelompok sosial seperti masyarakat kota, perusahaan, atau negara, di mana anggota-anggotanya tidak mempunyai hubungan erat.

- c. Berdasarkan kepentingan dan wilayah

Sebuah masyarakat setempat (*community*) merupakan suatu kelompok sosial atas dasar wilayah

yang tidak mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu. Sedangkan asosiasi (*association*) adalah sebuah kelompok sosial yang dibentuk untuk memenuhi kepentingan tertentu.

d. Berdasarkan kelangsungan kepentingan

Adanya kepentingan bersama merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terbentuknya sebuah kelompok sosial. Suatu kerumunan misalnya, merupakan kelompok yang keberadaannya hanya sebentar karena kepentingannya juga tidak berlangsung lama. Namun, sebuah asosiasi atau perhimpunan mempunyai kepentingan yang tetap.

e. Berdasarkan derajat organisasi

Kelompok sosial terdiri atas kelompok-kelompok sosial yang terorganisasi dengan rapi seperti negara, TNI, perusahaan dan sebagainya. Namun, ada kelompok sosial yang hampir tidak terorganisasi dengan baik, seperti kerumunan.

Selain berdasarkan ciri-ciri kelompok sosial yang telah dijelaskan di atas, kelompok sosial juga dapat digolongkan kedalam dua kelompok yaitu kelompok sosial yang teratur dan kelompok sosial yang tidak teratur.

1. Kelompok Sosial yang teratur

a. Paguyuban (*Gemeinschaft*) dan Patembayan (*Gesellschaft*)

Konsep paguyuban (*gemeinschaft*) dan patembayan (*gesellschaft*) dikemukakan oleh Ferdinand Tonnies. Pengertian paguyuban adalah suatu bentuk kehidupan bersama, di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah, serta kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang telah dikodratkan. Bentuk paguyuban terutama akan dijumpai di dalam keluarga, kelompok kekerabatan, rukun tetangga, dan sebagainya.

Secara umum ciri-ciri paguyuban adalah pertama, *Intimate*, yaitu hubungan yang bersifat menyeluruh dan mesra. Kedua, *Private*, yaitu hubungan yang bersifat pribadi. Dan ketiga *Exclusive*, yaitu hubungan tersebut hanyalah untuk kita saja dan tidak untuk orang lain di luar kita.

Sedangkan patembayan (*gesellschaft*) adalah ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu tertentu yang pendek. Patembayan bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka (*imaginary*) serta strukturnya bersifat mekanis seperti sebuah mesin. Bentuk *gesellschaft* terutama terdapat di dalam hubungan perjanjian yang bersifat timbal balik. Misalnya, ikatan perjanjian kerja, birokrasi dalam suatu kantor, perjanjian dagang, dan sebagainya.

b. Formal Group dan Informal Group

Menurut Soerjono Soekanto, formal group adalah kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesamanya. Kriteria rumusan organisasi formal group merupakan keberadaan tata cara untuk memobilisasikan dan mengoordinasikan usaha-usaha demi tercapainya tujuan berdasarkan bagian-bagian organisasi yang bersifat khusus.³⁶

Organisasi biasanya ditegakkan pada landasan mekanisme administratif. Misalnya, sekolah terdiri atas beberapa bagian, seperti kepala sekolah, guru, siswa, orang tua murid, bagian tata usaha dan lingkungan sekitarnya. Organisasi seperti itu dinamakan birokrasi. Menurut Max Weber, organisasi yang didirikan secara birokrasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tugas organisasi didistribusikan dalam beberapa posisi yang merupakan tugas-tugas jabatan.
2. Posisi dalam organisasi terdiri atas hierarki struktur wewenang.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, 1986, halaman 122

3. Suatu sistem peraturan memengaruhi keputusan dan pelaksanaannya.
4. Unsur staf yang merupakan pejabat, bertugas memelihara organisasi dan khususnya keteraturan organisasi.
5. Para pejabat berharap agar hubungan atasan dengan bawahan dan pihak lain bersifat orientasi impersonal.
6. Penyelenggaraan kepegawaian didasarkan pada karier.

Sedangkan pengertian informal group adalah kelompok yang tidak mempunyai struktur dan organisasi yang pasti. Kelompok-kelompok tersebut biasanya terbentuk karena pertemuan-pertemuan yang berulang kali. Dasar pertemuan-pertemuan tersebut adalah kepentingan-kepentingan dan pengalaman-pengalaman yang sama. Misalnya klik (*clique*), yaitu suatu kelompok kecil tanpa struktur formal yang sering timbul dalam kelompok-kelompok besar. Klik tersebut ditandai dengan adanya pertemuan-pertemuan timbal balik antaranggota yang biasanya hanya antarakita saja.

c. Membership Group dan Reference Group

Mengutip pendapat Robert K Merton, bahwa *membership group* adalah suatu kelompok sosial di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Batas-batas fisik yang dipakai untuk menentukan keanggotaan seseorang tidak dapat ditentukan secara mutlak. Hal ini disebabkan perubahan-perubahan keadaan. Situasi yang tidak tetap akan memengaruhi derajat interaksi di dalam kelompok tadi sehingga adakalanya seorang anggota tidak begitu sering berkumpul dengan kelompok tersebut walaupun secara resmi dia belum keluar dari kelompok itu.

Reference group adalah kelompok sosial yang menjadi acuan seseorang yang bukan anggota kelompok untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Dengan kata lain, seseorang yang bukan anggota kelompok sosial

bersangkutan mengidentifikasi dirinya dengan kelompok tadi. Misalnya, seseorang yang ingin sekali menjadi anggota TNI, tetapi gagal memenuhi persyaratan untuk memasuki lembaga pendidikan militer. Namun, ia bertingkah laku layaknya seorang perwira TNI meskipun dia bukan anggota TNI.

2. Kelompok Sosial yang Tidak Teratur

a. Kerumunan

Kerumunan adalah sekelompok individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat pada waktu yang bersamaan. Ukuran utama adanya kerumunan adalah kehadiran orang-orang secara fisik. Sedikit banyaknya jumlah kerumunan adalah sejauh mata dapat melihat dan selama telinga dapat mendengarkannya. Kerumunan tersebut segera berakhir setelah orang-orangnya bubar. Oleh karena itu, kerumunan merupakan suatu kelompok sosial yang bersifat sementara (*temporer*).

b. Publik

Berbeda dengan kerumunan, publik lebih merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Interaksi terjadi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi, seperti pembicaraan pribadi yang berantai, desas-desus, surat kabar, televisi, film, dan sebagainya. Alat penghubung semacam ini lebih memungkinkan suatu publik mempunyai pengikut-pengikut yang lebih luas dan lebih besar. Akan tetapi, karena jumlahnya yang sangat besar, tidak ada pusat perhatian yang tajam sehingga kesatuan juga tidak ada.

c. Masyarakat Setempat

Masyarakat setempat adalah suatu masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah dalam arti geografis dengan batas-batas tertentu. Faktor utama yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar di antara anggota dibandingkan dengan interaksi penduduk

di luar batas wilayahnya. Secara garis besar masyarakat setempat berfungsi sebagai ukuran untuk menggaris bawahi kedekatan hubungan antara hubungan sosial dengan suatu wilayah geografis tertentu. Akan tetapi, tempat tinggal tertentu saja belum cukup untuk membentuk suatu masyarakat setempat. Hal ini masih dibutuhkan adanya perasaan komunitas (*community sentiment*).

C. Institusi sosial

1. Pengertian

Pengertian istilah institusi sosial dalam bahasa Inggris adalah *social institution*, namun *social institution* juga diterjemahkan sebagai pranata sosial. Hal ini dikarenakan *social institution* merujuk pada perlakuan mengatur perilaku para anggota masyarakat. Ada pendapat lain mengemukakan bahwa pranata sosial merupakan sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktifitas-aktifitas untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut Koentjaraningrat institusi sosial merupakan satuan norma khusus yang menata serangkaian tindakan yang berpola untuk keperluan khusus manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Istilah lain yang digunakan adalah bangunan sosial yang diambil dari bahasa Jerman *sozialegebilde* dimana menggambarkan dan susunan institusi tersebut.

2. Peranan dan Fungsi Institusi Sosial

Institusi sosial dalam masyarakat sangat berperan untuk melihat dan melakukan kontrol terhadap kesimpang siuran yang terjadi di masyarakat seperti ketidakadilan, ketimpangan sosial, dan kemiskinan. Adanya peran lembaga sosial atau institusi sosial dapat menjadi kontrol, penyeimbang dan problem speaker terhadap kinerja pemerintah pada saat masih banyak masyarakat yang merasakan ketidakadilan dimana pihak pemerintah yang

lebih memihak pada kaum elit dan pemodal semata apalagi tidak ada lembaga sosial yang menampung aspirasi masyarakat bawah. Salah satu contoh lembaga sosial yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Non Government Oorganisation (NGO) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Menurut Soerjono Soekanto, institusi sosial memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan.
2. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan.
3. Memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, yaitu sistem pengawasan masyarakat terhadap anggota-anggotanya.

3. Perkembangan Institusi Sosial

Terbentuknya institusi sosial bermula dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama. Sebagaimana diungkapkan oleh Soerjono Soekanto institusi sosial tumbuh karena manusia dalam hidupnya memerlukan keteraturan. Untuk mendapatkan keteraturan hidup bersama dirumuskan norma-norma dalam masyarakat sebagai panduan bertingkah laku. Mula-mula sejumlah norma tersebut terbentuk secara tidak disengaja. Namun, lama-kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar. Contohnya: Dahulu di dalam jual beli, seorang perantara tidak harus diberi bagian dari keuntungan. Akan tetapi, lama-kelamaan terjadi kebiasaan bahwa perantara tersebut harus mendapat bagiannya, di mana sekaligus ditetapkan siapa yang menanggung itu, yaitu pembeli atautkah penjual.

Ciri dan Karakter Meskipun institusi sosial merupakan suatu konsep yang abstrak, ia memiliki sejumlah ciri dan

karakter yang dapat dikenali. Menurut J.P Gillin di dalam karyanya yang berjudul Ciri-ciri Umum Lembaga Sosial (*General Features of Social Institution*) adalah sebagai berikut :

1. Institusi sosial adalah organisasi pola-pola pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktifitas-aktifitas masyarakat dan hasil-hasilnya. Ia terdiri atas kebiasaan-kebiasaan, tata kelakuan, dan unsur-unsur kebudayaan lain yang tergabung dalam suatu unit yang fungsional.
2. Institusi sosial juga dicirikan oleh suatu tingkat kekekalan tertentu. Oleh karena lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma yang berkisar pada kebutuhan pokok, maka sudah sewajarnya apabila terus dipelihara dan dibakukan.
3. Institusi sosial memiliki satu atau beberapa tujuan tertentu. Lembaga pendidikan sudah pasti memiliki beberapa tujuan, demikian juga lembaga perkawinan, perbankan, agama, dan lain- lain.
4. Terdapat alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan institusi sosial. Misalnya, rumah untuk lembaga keluarga serta masjid, gereja, pura, dan wihara untuk lembaga agama.
5. Institusi sosial biasanya juga ditandai oleh lambang-lambang atau simbol-simbol tertentu. Lambang-lambang tersebut secara simbolis menggambar tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan. Misalnya, cincin kawin untuk lembaga perkawinan, bendera dan lagu kebangsaan untuk negara, serta seragam sekolah dan badge (lencana) untuk sekolah.
6. Institusi sosial memiliki tradisi tertulis dan tidak tertulis yang merumuskan tujuan, tata tertib, dan lain-lain. Sebagai contoh, izin kawin dan hukum perkawinan untuk lembaga perkawinan.

Seorang ahli sosial yang bernama John Conen ikut pula mengemukakan karakteristik dari institusi sosial.

Menurutnya terdapat sembilan ciri atau karakteristik institusi sosial sebagai berikut.

1. Setiap institusi sosial bertujuan memenuhi kebutuhan khusus masyarakat.
2. Setiap institusi sosial mempunyai nilai pokok yang bersumber dari anggotanya.
3. Dalam institusi sosial ada pola-pola perilaku permanen menjadi bagian tradisi kebudayaan yang ada dan ini disadari anggotanya.
4. Ada saling ketergantungan antarlembaga sosial di masyarakat, perubahan institusi sosial satu berakibat pada perubahan institusi sosial yang lain.
5. Meskipun antarlembaga sosial saling bergantung, masing-masing institusi sosial disusun dan di organisasi secara sempurna di sekitar rangkaian pola, norma, nilai, dan perilaku yang diharapkan.
6. Ide-ide institusi sosial pada umumnya diterima oleh mayoritas anggota masyarakat, terlepas dari turut tidaknya mereka berpartisipasi.
7. Suatu institusi sosial mempunyai bentuk tata krama perilaku.
8. Setiap institusi sosial mempunyai simbol-simbol kebudayaan tertentu.
9. Suatu institusi sosial mempunyai ideologi sebagai dasar atau orientasi kelompoknya.

Syarat Institusi Sosial Menurut Koentjaraningrat merupakan aktifitas manusia atau aktifitas kemasyarakatan, untuk menjadi institusi sosial harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

4. Macam-macam Institusi Sosial

Dalam institusi sosial terdapat lima jenis institusi atau lembaga sosial, yaitu pertama, Lembaga Keluarga. Keluarga adalah unit sosial yang terkecil dalam masyarakat dan juga institusi pertama yang dimasuki seorang manusia ketika

dilahirkan. Proses Terbentuknya keluarga, pada umumnya keluarga terbentuk melalui perkawinan yang sah menurut agama, adat istiadat dan pemerintah. Kedua adalah lembaga pendidikan, menurut Horton dan Hunt, lembaga pendidikan berkaitan dengan fungsi yang nyata yaitu mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat, melestarikan kebudayaan, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Adapun fungsi laten lembaga pendidikan adalah mengurangi pengendalian orang tua. Melalui pendidikan, sekolah orang tua melimpahkan tugas dan wewenangnya dalam mendidik anak kepada sekolah. Mempertahankan sistem kelas sosial. Pendidikan sekolah diharapkan dapat mensosialisasikan kepada para anak didiknya untuk menerima perbedaan prestise, privilese, dan status yang ada dalam masyarakat. Sekolah juga diharapkan menjadi saluran mobilitas siswa ke status sosial yang lebih tinggi atau paling tidak sesuai dengan status orang tuanya.

D. Nilai Sosial

1. Pengertian

Nilai sosial adalah konsepsi abstrak tentang apa yang baik sehingga harus dianut dan apa yang buruk harus dihindari. Nilai sosial ada dalam setiap kelompok masyarakat tertentu yang dijadikan sebagai pedoman berperilaku pada masyarakat. Nilai sosial tersebut terus hidup dan berkembang serta terpelihara dalam masyarakat.

2. Contoh nilai sosial

Setiap masyarakat memiliki nilai sosial yang dianut, sebagai contoh ada pada masyarakat adat Lampung, berikut ini adalah contoh nilai sosial yang dimiliki oleh masyarakat adat Lampung

- a. Pii pesenggiri, adalah segala sesuatu yang menyangkut harga diri, berupa sikap perilaku orang lampung yang

- merasa malu apabila melakukan perbuatan yang buruk dan tercela.
- b. Nemui nyimah, adalah sikap ramah tamah dan murah hati terhadap semua orang
 - c. Nengah nyampor, adalah perilaku yang terbuka dan suka bergaul dengan siapa saja, kapanpun dan dimanapun.
 - d. Sakai sambayan, adalah perilaku yang suka tolong menolong dan bekerjasama
 - e. Bejuluk beadok, adalah setiap orang lampung wajib menyandang gelar yang menjadi ciri jati dirinya yang harus selalu dijaga nama baiknya dimanapun ia berada.

E. Norma sosial

1. Pengertian

Secara sosiologis, norma tumbuh dari proses kemasyarakatan dan hasil dari kehidupan bermasyarakat. Individu dilahirkan dalam suatu masyarakat dan disosialisasikan untuk menerima aturan-aturan dari masyarakat yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, norma sosial itu adalah sesuatu yang berada di luar individu, membatasi mereka, dan mengendalikan tingkah laku mereka. Bagi siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap norma sosial akan ada sanksi atau hukuman dari masyarakat.

Oleh karena itu, keberadaan norma sosial dalam masyarakat bersifat memaksa individu atau suatu kelompok agar bertindak sesuai dengan aturan sosial yang telah terbentuk. Norma sosial dibuat oleh manusia agar nilai-nilai sosial yang ada dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua warga masyarakat. Apabila di dalam masyarakat telah menjalankan norma yang berisi nilai-nilai maka di dalam masyarakat akan tercipta suatu tata hubungan yang harmonis tanpa adanya pelanggaran terhadap hak-hak setiap individu dalam masyarakat.

Jadi, dapat ditegaskan bahwa norma sosial adalah aturan-aturan dengan sanksi-sanksi sebagai pedoman untuk

melangsungkan hubungan sosial dalam masyarakat yang berisi perintah, larangan, anjuran agar seseorang dapat bertingkah laku yang pantas guna menciptakan ketertiban, keteraturan, dan kedamaian dalam bermasyarakat. Dalam memberikan sanksi bagi pelanggaran terhadap norma, ada berbagai cara tergantung pada tingkatan norma mana yang dilanggar.

2. Tingkatan Norma Dalam Masyarakat

Tingkatan norma sosial yang ada di masyarakat dibagi menjadi 4 yaitu:

a. Cara (*Usage*)

Proses interaksi yang terus menerus akan melahirkan pola tertentu yang disebut cara (*usage*). Cara (*usage*) adalah suatu bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan individu dalam suatu masyarakat tetapi tidak secara terus-menerus. Sanksi yang diberikan hanya berupa celaan. Norma ini mempunyai kekuatan yang lemah dibanding norma lain. Misalnya, bersendawa dengan keras di kelas, cara berpakaian yang tidak sesuai dengan tempatnya, dan lain-lain.

b. Kebiasaan (*Folkways*)

Kebiasaan adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Hal ini juga menunjukkan bahwa orang tersebut menyukai perbuatan itu. Sanksi terhadap pelanggaran norma ini berupa teguran, sindiran, dan dipergunjingkan. Sebagai contoh: berpamitan kepada orang tua ketika keluar rumah, memberikan salam ketika bertemu dengan orang yang dikenal, dan lain-lain.

c. Tata kelakuan (*Mores*)

Mores adalah sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar guna melaksanakan pengawasan oleh kelompok terhadap anggota-anggotanya. Pelanggaran terhadap norma kebiasaan akan

dianggap aneh tetapi pelanggaran terhadap mores akan dikucilkan atau dikutuk oleh sebagian besar masyarakat. contoh: mempekerjakan anak dibawah umur, suka melakukan perampasan/pemalakan, suka bertindak kekerasan, dan lain-lain.

d. **Adat istiadat (*Customs*)**

Tata kelakuan yang kekal dan kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat dapat mengikat menjadi adat istiadat (*customs*). Adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Pelanggaran terhadap adat istiadat ini akan menerima sanksi yang keras dari anggota lainnya. Misalnya larangan masyarakat Bali untuk mencuri bila ketahuan tangannya kan dipotong, larangan perkawinan antar kerabat, makan daging manusia, dan lain-lain.

3. Peranan Norma dalam Masyarakat

1. Sebagai Pengatur Sistem Dalam Masyarakat

Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap orang dalam masyarakat memiliki kebutuhan yang sangat berbeda-beda dan semua orang menginginkan kebutuhannya dapat terpenuhi secara normal. Dalam konteks seperti ini masyarakat memerlukan adanya sistem pengatur perilaku untuk mewujudkan tertib sosial dalam masyarakat. Sistem pengatur ini dalam sosiologi dinamakan pranata sosial. Pranata sosial pada dasarnya merupakan perangkat masyarakat yang berfungsi untuk menciptakan sistem keteraturan dalam rangka melindungi agar semua kebutuhan warga masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu masyarakat akan saling tergantung satu dengan yang lain sehingga membentuk rantai sistem ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhan. Dalam konteks seperti inilah nilai

dan norma benar-benar berfungsi sebagai pengatur sistem dalam masyarakat.

2. Sebagai Khasanah Budaya Masyarakat

Sebagaimana kita ketahui bahwa norma struktur budaya suatu masyarakat dalam arti luas. Dalam peranannya untuk memberikan ciri khusus terhadap suatu masyarakat norma dan nilai berperan sebagai pengatur perilaku antara warga masyarakat termasuk sistem komunikasi yang dapat memberikan corak khas masyarakat tertentu sehingga berbeda dengan masyarakat yang lain. Pada konteks inilah norma dan nilai berfungsi sebagai etos budaya masyarakat. Ditinjau dari lapangan hukum norma dan nilai suatu masyarakat merupakan kausa prima yang menjadi cikal bakal dan tatanan kehidupan pada masyarakat itu. Norma dan nilai ini mempunyai perkembangan yang sangat panjang sepanjang sejarah keberadaan umat manusia atau suku bangsa tersebut.

3. Sebagai Pelindung Bagi Yang Lemah

Norma sosial seringkali bersumber dari nilai-nilai yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat yang kemudian diaktualisasikan dalam bentuk kaidah-kaidah yang bersifat konkret. Dalam perkembangan selanjutnya norma sosial ditulis secara eksplisit serta dilengkapi dengan sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Dalam konteks ini norma sosial berfungsi sebagai pelindung bagi mereka yang lemah dan tak berdaya terhadap keganasan dan keperkasaan pihak-pihak lain termasuk para penjahat dan para penguasa yang bercorak tirani. Oleh karena itu, penyusunan norma-norma terutama norma hukum harus mendapatkan kesepakatan antara wakil-wakil rakyat serta penguasa yang ada (*rulling class*). Nilai dan norma dikatakan sebagai pelindung karena di belakang norma dan nilai dicantumkan sanksi terhadap pelanggaran norma itu. Peraturan akan menjadi pelindung bagi mereka yang lemah.

4. Sebagai Petunjuk Perilaku Yang Benar

Secara tidak kita sadari bahwa norma dan nilai yang ada di dalam masyarakat terus menerus mengalami seleksi tentang kebenarannya. Selanjutnya nilai-nilai yang telah mengakar kuat kebenarannya dipaksakan untuk dapat berlaku dan ditiru oleh semua warga masyarakat sebagai pedoman perilaku. Dalam konteks ini nilai dan norma berfungsi sebagai rel terhadap perilaku-perilaku yang harus diperbuat oleh setiap masyarakat pada setiap kegiatan dari kepentingan, sehingga norma dan nilai benar-benar berfungsi sebagai petunjuk perilaku yang dianggap benar.

Setiap masyarakat yang memiliki struktur budaya yang berbeda mempunyai pola perilaku dan sistem nilai yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tidak tepat jika kita memaksakan semua orang untuk berperilaku seperti tatanan sistem perilaku dan tata nilai yang ada di dalam masyarakat kita. Sebagai salah satu pedoman yang dapat dikaji kebenarannya adalah bahwa dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung, artinya bahwa tatanan nilai dan norma itu sebaiknya hanya diberlakukan pada wilayah yang bersifat khusus pada daerah tersebut dan tidak berlaku di daerah lain. Sehingga di daerah lain yang memiliki struktur budaya yang berbeda adalah sistem tata nilai yang ada di daerah tersebut

5. Macam-macam Norma Sosial

Norma sosial dalam masyarakat dibedakan menjadi beberapa aspek yang saling berkaitan satu sama dengan yang lain. Adapun macam-macam norma sosial yang ada di masyarakat ada dua macam yaitu norma pribadi dan norma antar pribadi. Norma pribadi adalah norma yang berlaku untuk seseorang dalam hubungannya dengan Tuhan, sedangkan norma antar pribadi adalah norma yang berlaku untuk seseorang dengan hubungannya dengan orang lain. Norma pribadi terdiri dari dua macam yaitu norma agama dan norma

kesusilaan. Sedangkan norma antar pribadi ada dua macam yaitu norma kesopanan dan norma hukum. Adapun pengertian pada masing-masing norma adalah sebagai berikut.

a. **Norma Agama**

Merupakan norma yang berfungsi sebagai petunjuk dan pegangan hidup bagi umat manusia yang berasal dari Tuhan yang berisikan perintah dan larangan. Pelanggaran terhadap norma ini mendapatkan sanksi dosa dan di masukkan ke dalam neraka ketika di akhirat nanti.

b. **Norma Kesusilaan**

Adalah peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak sehingga seseorang dapat membedakan apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Pada dasarnya norma ini merupakan norma untuk melaksanakan nilai moral yaitu dalam rangka menghargai harkat dan martabat orang lain. Sebagai contoh: telanjang di depan umum atau berpakaian minim.

c. **Norma Hukum**

Adalah suatu rangkaian aturan yang ditunjukkan kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan, agar dalam masyarakat tercipta suatu ketertiban dan keadilan yang biasanya dibuat oleh lembaga tertentu. Aturan ini lazimnya tertulis yang diklasifikasikan dalam berbagai bentuk kitab undang-undang atau tidak tertulis berupa keputusan hukum pengadilan adat. Karena sebagian besar norma hukum adalah tertulis maka sanksinya adalah yang paling tegas jika dibandingkan dengan norma lain dari mulai denda sampai hukuman fisik (penjara atau hukuman mati).

d. **Norma Kesopanan**

Adalah petunjuk untuk berperilaku yang mengatur bagaimana seseorang harus bertingkah laku dalam

masyarakat. Sebagai contoh: tidak meludah di depan orang, tidak menyerobot antrian, tidak membuang sampah sembarangan, dan lain-lain.

F. Stratifikasi Sosial

1. Pengertian

Stratifikasi sosial berasal dari kata bahasa latin yaitu *stratum* (tunggal) atau *strata* (jamak) yang berarti lapisan. Dalam Sosiologi, stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Berikut ini ada beberapa definisi Stratifikasi Sosial menurut para ahli:

a) Pitirim A. Sorokin

Mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat (hierarki).

b) Max Weber

Mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, privilege dan prestise.

c) Cuber

Mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai suatu pola yang ditempatkan di atas kategori dari hak-hak yang berbeda

d) Drs. Robert. M.Z. Lawang

Stratifikasi sosial adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hirarkis menurut dimensi kekuasaan, privilese, dan prestise.

Pemahaman antara stratifikasi sosial dan kelas sosial sering kali disamakan, padahal di sisi lain pengertian antara stratifikasi sosial dan kelas sosial terdapat perbedaan. Penyamaan dua konsep pengertian stratifikasi sosial dan kelas sosial akan melahirkan pemahaman yang rancu. Stratifikasi sosial lebih merujuk pada pengelompokan orang

kedalam tingkatan atau strata dalam heirarki secara vertikal. Membicarakan stratifikasi sosial berarti mengkaji posisi atau kedudukan antar orang/sekelompok orang dalam keadaan yang tidak sederajat. Adapun pengertian kelas sosial sebenarnya berada dalam ruang lingkup kajian yang lebih sempit, artinya kelas sosial lebih merujuk pada satu lapisan atau strata tertentu dalam sebuah stratifikasi sosial. Kelas sosial cenderung diartikan sebagai kelompok yang anggota-anggota memiliki orientasi politik, nilai budaya, sikap dan perilaku sosial yang secara umum sama.

Pelapisan sosial atau stratifikasi sosial adalah proses pembedaan anggota masyarakat ke dalam kelas sosial secara bertingkat dari terendah hingga tertinggi dengan dasar tertentu. Secara sosiologis, setiap masyarakat akan menunjukkan adanya pelapisan sosial. Masyarakat Indonesia yang memiliki ciri masyarakat agraris, juga menunjukkan kecenderungan tersebut. Munculnya stratifikasi sosial dalam setiap masyarakat dimungkinkan karena adanya sesuatu yang dihargai. Sesuatu tersebut dapat berupa uang, kepemilikan atas suatu benda, tanah, kekuasaan, keturunan, ilmu pengetahuan dan ketaatan beragama. Terbentuknya pelapisan sosial telah diawali sejak manusia mengenal adanya kehidupan bersama dalam organisasi sosial. Pada masyarakat sejarah awal, taraf kebudayaannya masih sederhana. Pelapisan sosial yang disusun didasarkan pada jenis kelamin, usia, kepandaian atau kekayaan. Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang makin kompleks, maka pelapisan sosial yang terbentuk juga makin beragam.

2. Faktor Penyebab Stratifikasi Sosial

Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Tetapi ada pula yang dengan sengaja disusun untuk

mengejar suatu tujuan bersama.³⁷ Yang biasa menjadi alasan terbentuknya lapisan masyarakat yang terjadi dengan sendirinya adalah kepandaiaan, tingkat umur atau senioritas, sifat keaslian keanggotaan kerabat seorang kepala masyarakat, dan mungkin juga harta dalam batas-batas tertentu. Alasan-alasan yang digunakan bagi tiap-tiap masyarakat diantaranya : Pada masyarakat yang hidupnya dari berburu hewan alasan utama adalah kepandaian berburu. Sedangkan pada masyarakat yang telah menetap dan bercocok tanam, maka kerabat pembuka tanah (yang dianggap asli) dianggap sebagai orang-orang yang menduduki lapisan tinggi. Hal ini dapat dilihat misalnya pada masyarakat Batak, di mana marga tanah, yaitu marga yang pertama-tama membuka tanah, dianggap mempunyai kedudukan yang tinggi.

Mengenai sumber dasar dari terbentuknya stratifikasi dalam masyarakat adalah suku bangsa atau etnis dan unsur sosial. Stratifikasi yang terbentuk bersumber dari etnis apabila ada dua atau lebih grup etnis, di mana grup etnis yang satu menguasai grup etnis yang lainnya dalam waktu yang relatif lama. Sedangkan stratifikasi yang terbentuk dari sumber sosial, karena adanya tuntutan masyarakat terhadap faktor-faktor sosial tertentu. Faktor-faktor sosial itu merupakan ukuran yang biasanya ditetapkan masyarakat berdasarkan sistem nilai yang dipandang berharga. Faktor-faktor sosial yang berharga itu kemudian dimasukkan pada level tertentu sesuai dengan tinggi rendahnya suatu daya guna yang dibutuhkan masyarakat pada umumnya.

Faktor-faktor penyebab terbentuknya stratifikasi sosial dalam masyarakat didukung oleh Perbedaan ras dan kebudayaan, adanya spesialisasi dalam bidang pekerjaan, dan adanya kelangkaan dalam masyarakat menyangkut pembagian hak dan kewajiban.

³⁷ Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko, *Pengantar Konsep dan Teori Sosiologi*, Universitas Lampung Press, 1984, halaman 21

3. Kriteria Stratifikasi Sosial

Diantara lapisan atasan dengan yang terendah, terdapat lapisan yang jumlahnya relatif banyak. Biasanya lapisan atasan tidak hanya memiliki satu macam saja dari apa yang dihargai oleh masyarakat. Akan tetapi, kedudukannya yang tinggi itu bersifat kumulatif. Artinya, mereka yang mempunyai uang banyak akan mudah sekali mendapatkan tanah, kekuasaan dan juga mungkin kehormatan. Ukuran atau kriteria yang bisa dipakai untuk menggolong-golongkan anggota-anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan adalah sebagai berikut:

1. Ukuran kekayaan, barang siapa memiliki kekayaan paling banyak, ia akan menempati pelapisan di atas. Kekayaan tersebut misalnya dapat dilihat dari bentuk rumah, mobil pribadinya, cara berpakaian serta jenis bahan yang dipakai, kebiasaan atau cara berbelanja dan seterusnya.
2. Ukuran kekuasaan, barang siapa yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai wewenang terbesar akan menempati pelapisan yang tinggi dalam pelapisan sosial masyarakat yang bersangkutan.
3. Ukuran kehormatan, orang yang disegani dan dihormati akan mendapat tempat atas dalam sistem pelapisan sosial. Ukuran semacam ini biasanya dijumpai pada masyarakat yang masih tradisional. Misalnya, orangtua atau orang yang dianggap berjasa dalam masyarakat atau kelompoknya. Ukuran kehormatan biasanya bisa terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan dan kekuasaan.
4. Ukuran ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan digunakan sebagai salah satu faktor atau dasar pembentukan pelapisan sosial didalam masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan.

Ukuran-ukuran tersebut di atas tidaklah bersifat limitif. Oleh karena itu, masih ada ukuran lain yang dapat dipergunakan. Namun, ukuran di atas lah yang paling

banyak digunakan sebagai dasar pembentukan pelapisan sosial.

4. Sifat Stratifikasi Sosial

1. Stratifikasi Tertutup

Sistem pelapisan yang jalan masuk menjadi anggota atau warga suatu pelapisan tertentu hanyalah melalui kelahiran. Contoh Pelapisan pada masyarakat berkasta, pada masyarakat dengan sistem feodal, atau pada masyarakat yang masih menggunakan kriteria ras sebagai dasar pelapisan sosialnya.

Dalam masyarakat dengan sistem stratifikasi sosial tertutup seorang individu atau kelompok kemungkinan untuk pindah dari satu golongan atau kelas sosial ke golongan atau kelas sosial lain sangat kecil. Di dalam sistem yang demikian, satu-satunya jalan untuk menjadi anggota suatu lapisan dalam masyarakat adalah kelahiran atau keturunan, sehingga masyarakat lebih bersifat statis, terutama golongan atau kelas bawah, di antara mereka kurang menunjukkan cita-cita yang tinggi.

Contoh masyarakat dengan sistem stratifikasi sosial tertutup dapat ditunjukkan dengan sistem kasta pada masyarakat India. Apabila ditelaah pada masyarakat India, sistem lapisan di sana sangat kaku dan menjelma dalam sistem kasta. Kasta di India mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu:

- a. Keanggotaan pada kasta diperoleh karena warisan atau kelahiran. Anak yang lahir akan memperoleh kedudukan secara otomatis dari orang tuanya.
- b. Keanggotaan yang diwariskan tadi berlaku seumur hidup, oleh karena seseorang tak mungkin mengubah kedudukannya, kecuali bila ia dikeluarkan dari kastanya.
- c. Perkawinan bersifat endogami, artinya harus dipilih dari orang yang sekasta.

- d. Hubungan dengan kelompok-kelompok sosial lainnya bersifat terbatas.
- e. Kesadaran pada keanggotaan suatu kasta, sangat nyata terutama dari nama kasta, identifikasi anggota pada kastanya, penyesuaian diri yang ketat terhadap norma-norma kasta dan lain sebagainya.
- f. Kasta diikat oleh kedudukan-kedudukan yang secara tradisional telah ditetapkan.

2. Stratifikasi Terbuka

Setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk naik ke pelapisan sosial yang lebih tinggi karena kemampuan dan kecakapannya sendiri, atau turun ke pelapisan sosial yang lebih rendah bagi mereka yang tidak cakap dan tidak beruntung. Dalam masyarakat dengan sistem stratifikasi terbuka seorang atau kelompok anggota masyarakat memiliki peluang atau kemungkinan yang besar untuk berpindah ke kelompok, kelas atau lapisan sosial lainnya. Anggota masyarakat dapat masuk atau keluar, dapat naik atau turun ke kelas atau lapisan yang lebih rendah.

Stratifikasi terbuka lebih dinamis dan anggota-anggotanya mempunyai cita-cita hidup yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kehidupan anggota-anggotanya lebih bersifat kompetitif, bahkan tidak jarang di antara mereka sering mengalami kehidupan yang selalu diwarnai oleh rasa tegang dan kekhawatiran. Contohnya seorang anak presiden belum tentu dapat mencapai kedudukan sebagai presiden. Tetapi sebaliknya, warga masyarakat pada umumnya ada kemungkinan dapat mencapai kedudukan sebagai presiden. Contoh lainnya Masyarakat di negara industri maju atau masyarakat pertanian yang telah mengalami gelombang modernisasi.

3. Stratifikasi Campuran

Dua sifat utama dari *stratifikasi sosial* telah dikemukakan di atas, yakni terbuka dan tertutup. Walaupun demikian, dalam kenyataan sehari-hari

stratifikasi sosial dalam masyarakat tidak hanya selalu bersifat terbuka atau tertutup, akan tetapi juga bersifat campuran atau gabungan di antara keduanya.

Dalam masyarakat terdapat unsur-unsur yang menggabungkan antara sifat yang terbuka dan tertutup. Misalnya dalam suatu kelompok mungkin dalam sistem politiknya menerapkan sistem stratifikasi sosial tertutup, namun dalam bidang-bidang atau unsur-unsur sosial lainnya seperti ekonomi, budaya, dan lain-lain menggunakan sistem stratifikasi sosial terbuka. Contohnya dalam masyarakat Bali. Dalam bidang budaya dikenal sistem atau budaya kasta yang tertutup dan tidak memungkinkan anggota masyarakat berpindah kedudukan sosialnya. Namun di bidang lain, misalnya bidang ekonomi, masyarakat Bali tidak mengenal kasta dan bersifat terbuka, artinya tinggi rendahnya kedudukan sosial yang dimiliki oleh anggota masyarakat tergantung pada kemampuan dan kecakapannya.

Stratifikasi gabungan antara stratifikasi terbuka dan tertutup.

BAB IV KEBUDAYAAN DAN MASYARAKAT

A. Kebudayaan

1. Pengertian

Manusia pada dasarnya adalah makhluk budaya yang harus membudayakan dirinya. Kebudayaan adalah gaya hidup suatu pergaulan hidup. Gaya hidup ini adalah kesatuan jiwa dan bentuk materiil, hubungan yang organis dan yang tak dapat diduga. Manusia sebagai makhluk budaya bisa melepaskan diri dari ikatan nalurinya serta mampu menguasai alam sekitarnya dengan alat pengetahuan yang dimilikinya. Hal tersebut berbeda dengan hewan yang mereka pada dasarnya tidak bisa melepaskan dari ikatan naluri dan alam sekitarnya.

Budaya dan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari konsep Dwi Tunggal, yaitu tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Budaya adalah suatu cara hidup yang hidup dan berkembang dan diturunkan pada generasi-generasinya. Kebudayaan erat hubungannya dengan masyarakat. Segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat itu diatur oleh kebudayaan itu sendiri. Hampir seluruh kebudayaan yang kita miliki adalah warisan dari nenek moyang kita. Amat sedikit tindakan manusia yang dilakukan tanpa proses belajar karena dia menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang terus berlangsung akan menghasilkan suatu kebudayaan.

Koentjaraningrat menarik kesimpulan bahwa kata kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta *buddhayah*, yaitu bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti "budi" atau "akal". Sehingga kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Adapun kata "culture" yang merupakan kata asing yang sama artinya dengan "kebudayaan" berasal dari kata latin *colere* yang berarti

mengolah atau mengerjakan, terutama mengolah tanah atau bertani. Atau upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan merubah alam.

Kebudayaan sebagaimana diterangkan dimiliki oleh setiap masyarakat. Perbedaannya terletak pada kebudayaan masyarakat yang satu lebih sempurna daripada kebudayaan yang lain, di dalam perkembangannya untuk memenuhi segala keperluan masyarakatnya. Dalam hal ini kebudayaan akan melahirkan suatu peradaban dan peradaban tersebut akan terus berkembang sehingga menjadi peradaban yang tinggi.

Geertz secara jelas mendefinisikan Kebudayaan adalah suatu sistem makna dan simbol yang disusun dalam pengertian dimana individu-individu mendefinisikan dunianya, menyatakan perasaannya dan memberikan penilaian-penilaiannya, suatu pola makna yang ditransmisikan secara historik diwujudkan di dalam bentuk-bentuk simbolik melalui sarana dimana orang-orang mengkomunikasikan, mengabadikannya, dan mengembangkan pengetahuan dan sikap-sikapnya ke arah kehidupan, suatu kumpulan peralatan simbolik untuk mengatur perilaku, sumber informasi yang ekstrasomatik. Karena kebudayaan merupakan suatu sistem simbolik, maka proses budaya haruslah dibaca, diterjemahkan, dan diinterpretasikan.

Konsep kebudayaan simbolik yang dikemukakan oleh Geertz diatas adalah suatu pendekatan yang sifatnya hermeneutic. Suatu pendekatan yang lazim dalam dunia seniotik. Pendekatan hermeunetik inilah yang kemudian menginspirisasikannya untuk melihat kebudayaan sebagai teks-teks yang harus dibaca, ditranslasikan, dan diinterpretasikan. Pengaruh hermeunetic dapat kita lihat dari beberapa tokoh sastra dan filsafat yang mempengaruhinya, seperti Kenneth Burke, Susanne Langer, dan Paul Ricoeur. Seperti Langer dan Burke yang mendefinisikan keistimewaan manusia sebagai kapasitas mereka untuk berperilaku

simbolik. Dari Paul Ricouer, ia mengambil gagasan bahwa bangunan pengetahuan manusia yang ada, bukan merupakan kumpulan laporan rasa yang luas tetapi sebagai suatu struktur fakta yang merupakan simbol dan hukum yang mereka beri makna. Sehingga demikian tindakan manusia dapat menyampaikan makna yang dapat dibaca, suatu perlakuan yang sama seperti kita memperlakukan teks tulisan.

Geertz memfokuskan konsep kebudayaan kepada nilai-nilai budaya yang menjadi pedoman masyarakat untuk bertindak dalam menghadapi berbagai permasalahan hidupnya. Sehingga pada akhirnya konsep budaya lebih merupakan sebagai pedoman penilaian terhadap gejala-gejala yang dipahami oleh si pelaku kebudayaan tersebut. Makna berisi penilaian-penilaian pelaku yang ada dalam kebudayaan tersebut. Dalam kebudayaan, makna tidak bersifat individual tetapi publik, ketika sistem makna kemudian menjadi milik kolektif dari suatu kelompok.

Kebudayaan menjadi suatu pola makna yang diteruskan secara historis terwujud dalam simbol-simbol. Kebudayaan juga menjadi suatu sistem konsep yang diwariskan yang terungkap dalam bentuk-bentuk simbolik yang dengannya manusia berkomunikasi, melestarikan, dan memperkembangkan pengetahuan mereka tentang kehidupan dan sikap-sikap terhadap kehidupan.

Aspek individu dapat dikatakan sebagai manusia, sehingga definisi manusia adalah secara bahasa manusia berasal dari kata "*manu*" (bahasa Sanskerta), "*mens*" (bahasa Latin), yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi yang berarti mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau seorang individu.

Definisi manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dan dianugerahiNya akal, hati, fisik. Yang

membedakan antara manusia dengan hewan adalah akal. Maka ada yang berpendapat bahwa manusia itu hewan yang berakal. Karena dari segi fisik memang tidak ada beda dengan hewan tetapi yang membedakannya adalah akal. Terbentuknya pribadi seseorang dipengaruhi oleh lingkungan bahkan secara ekstrim dapat dikatakan, setiap orang berasal dari satu lingkungan, baik lingkungan vertikal (genetika, tradisi), horizontal (geografik, fisik, sosial), maupun kesejarahan.

Individu manusia, masyarakat dan kebudayaan adalah aspek-aspek sosial yang tidak bisa dipisahkan. Ketiganya mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Tidak akan pernah ada masyarakat maupun kebudayaan apabila tidak ada individu, karena individu yang selanjutnya mengelompok dan menjadi masyarakatlah yang merupakan pencipta dari suatu kebudayaan. Sementara di pihak lain untuk mengembangkan eksistensinya sebagai manusia, maka individu membutuhkan keluarga dan masyarakat, yaitu media di mana individu dapat mengekspresikan aspek sosialnya.

Di samping itu, individu juga membutuhkan kebudayaan yakni wahana bagi individu untuk mengembangkan dan mencapai potensinya sebagai manusia. Dimana ide-ide seni yang kemudian menciptakan sebuah kebudayaan baru di dalam masyarakat, yang kemudian di akulturasikan dengan budaya yang sebelumnya sehingga menciptakan budaya yang unik dan khas. Lingkungan sosial yang pertama kali dijumpai individu dalam hidupnya adalah lingkungan keluarga. Di dalam keluargalah individu mengembangkan kapasitas pribadinya. Di samping itu, melalui keluarga pula individu bersentuhan dengan berbagai gejala sosial dalam rangka mengembangkan kapasitasnya sebagai anggota keluarga.

Sementara itu, masyarakat merupakan lingkungan sosial individu yang lebih luas. Di dalam masyarakat, individu menjejantahkan apa-apa yang sudah dipelajari

dari keluarganya. Individu belum bisa dikatakan sebagai individu apabila dia belum dibudayakan. Artinya hanya individu yang mampu mengembangkan potensinya sebagai individu yang bisa disebut individu. Untuk mengembangkan potensi kemanusiaannya ini atau untuk menjadi berbudaya dibutuhkan media keluarga dan masyarakat.

Apa yang menjadi kesepakatan bersama warga masyarakat adalah kebudayaan, yang antara lain diartikan sebagai pola-pola kehidupan di dalam komunitas. Kebudayaan di sini dimengerti sebagai fenomena yang dapat diamati yang wujud kebudayaannya adalah sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari serangkaian tindakan yang berpola yang bertujuan untuk memenuhi keperluan hidup. Serangkaian tindakan berpola atau kebudayaan dimiliki individu melalui proses belajar yang terdiri dari proses internalisasi, sosialisasi, dan enkulturasi. Karena di dalam masyarakat orang-orang yang hidup bersama menghasilkan kebudayaan, sehingga masyarakat sebagai pendukung, pemelihara, dan pelestari dari budaya yang telah mereka miliki yang kemudian di wariskan kepada anak cucunya.

Keterkaitan anatara individu, masyarakat dan kebudayaan sangatlah erat dalam kehidupan individu itu sendiri maupun orang banyak. Individu harus bersosialisai dalam masyarakat sehingga melestarikan kebudayaan dan menimbulkan kebudayaan baru yang mencirikan budaya Bangsa Indonesia sendiri. Dimana yang kita ketahui bahwa budaya bangsa Indonesia memiliki budaya yang sangat banyak karena antara masyarakat yang di pisahkan oleh suatu batas wilayah ataupun batas antar pulau juga memiliki budaya yang khas, antara satu dengan yang lain. Sehingga ciri kebudayaan ada karena terdapat pada pendukung kebudayaan tersebut, yakni individu ataupun sekelompok orang bahkan masyarakat dimana diantara mereka membawa kebudayaannya masing-masing sehingga membedakan dengan kebudayaan masyarakat yang lainnya.

Selain itu terdapat tiga wujud kebudayaan yaitu :

1. Wujud pikiran, gagasan, ide-ide, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Wujud pertama dari kebudayaan ini bersifat abstrak, berada dalam pikiran masing-masing anggota masyarakat di tempat kebudayaan itu hidup.
2. Aktifitas kelakuan berpola manusia dalam masyarakat. Sistem sosial terdiri atas aktifitas-aktifitas manusia yang saling berinteraksi, berhubungan serta bergaul satu dengan yang lain setiap saat dan selalu mengikuti pola-pola tertentu berdasarkan adat kelakuan. Sistem sosial ini bersifat nyata atau konkret.
3. Wujud fisik, merupakan seluruh total hasil fisik dari aktifitas perbuatan dan karya manusia dalam masyarakat.

Berdasarkan penggolongan wujud budaya di atas kita dapat mengelompokkan budaya menjadi dua, yaitu: Budaya yang bersifat abstrak dan budaya yang bersifat konkret. Budaya yang Bersifat Abstrak adalah budaya yang letaknya ada di dalam alam pikiran manusia, misalnya terwujud dalam ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan, dan cita-cita. Jadi budaya yang bersifat abstrak adalah wujud ideal dari kebudayaan. Ideal artinya sesuatu yang menjadi cita-cita atau harapan bagi manusia sesuai dengan ukuran yang telah menjadi kesepakatan.

Budaya yang bersifat konkret berpola dari tindakan atau peraturan dan aktifitas manusia di dalam masyarakat yang dapat diraba, dilihat, diamati, disimpan atau diphoto. Koencaraningrat menyebutkan sifat budaya dengan sistem sosial dan fisik, yang terdiri atas perilaku, bahasa dan materi.

Perilaku adalah cara bertindak atau bertingkah laku dalam situasi tertentu. Setiap perilaku manusia dalam masyarakat harus mengikuti pola-pola perilaku (*pattern of behavior*) masyarakatnya. Bahasa adalah sebuah sistem simbol-simbol yang dibunyikan dengan suara dan ditangkap dengan telinga. Ralp Linton mengatakan salah satu sebab

paling penting dalam memperlambangkan budaya sampai mencapai ke tingkat seperti sekarang ini adalah pemakaian bahasa. Bahasa berfungsi sebagai alat berpikir dan berkomunikasi. Tanpa kemampuan berpikir dan berkomunikasi budaya tidak akan pernah ada.

Budaya materi adalah hasil dari aktivitas atau perbuatan manusia. Bentuk materi misalnya pakaian, perumahan, kesenian, alat-alat rumah tangga, senjata, alat produksi, dan alat transportasi.

2. Peranan Dan Fungsi Kebudayaan

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Kebutuhan masyarakat bidang spiritual dan materiil sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Hasil karya masyarakat melahirkan teknologi atau kebudayaan kebendaan yang mempunyai kegunaan utama di dalam melindungi masyarakat terhadap lingkungan alamnya. Pada taraf permulaan, manusia semata-mata bertindak dalam batas-batas untuk melindungi dirinya. Taraf tersebut, masih banyak dijumpai pada masyarakat yang hingga kini masih rendah tahap kebudayaannya. Keadaannya sangat berlainan dengan masyarakat yang sudah kompleks, dimana taraf kebudayaannya lebih tinggi. Hasil kebudayaannya yang berupa teknologi memberikan kemungkinan-kemungkinan yang sangat luas untuk memanfaatkan hasil-hasil alam dan apabila mungkin menguasai alam.

Hasil karya masyarakat melahirkan teknologi atau kebudayaan kebendaan yang mempunyai kegunaan utama di dalam melindungi masyarakat terhadap lingkungan. masyarakat yang memiliki peradaban rendah biasanya belum memiliki tempat tinggal yang menetap karena mereka bergantung pada lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tingkat teknologi mereka juga sama sekali belum mengalami kemajuan. Karenanya pendidikan untuk

mengolah dan menguasai kemampuan alam sangatlah kurang. Perkembangan teknologi di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Jerman, dan sebagainya, merupakan beberapa contoh negara yang masyarakatnya tidak lagi pasif menghadapi tantangan alam sekitar.

Karsa masyarakat yang merupakan perwujudan norma dan nilai-nilai sosial yang dimana dapat menghasilkan tata tertib dalam pergaulan kemasyarakatan. Karsa merupakan daya upaya manusia untuk melindungi diri terhadap kekuatan-kekuatan lain yang ada di dalam masyarakat. Untuk menghadapi kekuatan-kekuatan yang buruk, manusia terpaksa melindungi diri dengan cara menciptakan kaidah-kaidah yang pada hakikatnya merupakan petunjuk-petunjuk tentang bagaimana manusia harus bertindak dan berlaku di dalam pergaulan hidup.

Karsa masyarakat mewujudkan nilai dan norma-norma dan nilai-nilai sosial sangat diperlukan untuk mengadakan tata tertib dalam pergaulan kemasyarakatan. Karsa merupakan daya upaya manusia untuk melindungi diri terhadap kekuatan-kekuatan lain yang ada dalam masyarakat. Kekuatan-kekuatan yang tersembunyi dalam masyarakat tidak selamanya baik. Untuk menghadapi kekuatan-kekuatan yang buruk manusia terpaksa melindungi diri dengan cara menciptakan kaidah-kaidah yang pada hakikatnya merupakan petunjuk-petunjuk tentang bagaimana manusia harus bertindak dan berlaku di dalam pergaulan hidupnya.

Kebudayaan mengatur bagaimana kita melakukan tindakan, perbuatan, juga menentukan sikapnya apabila akan berhubungan dengan orang lain. Kebudayaan juga menjadi peraturan dalam berperilaku. Setiap orang bagaimanapun kehidupannya, mereka akan melakukan suatu kebiasaan yang mungkin akan membedakan mereka dengan masyarakat lain. Kebiasaan mereka itu merupakan suatu perilaku pribadi. Pribadi dalam artian, setiap orang

memiliki kebiasaan sendiri. Meski dalam satu lingkungan yang sama mungkin setiap penghuninya memiliki kebiasaan yang berbeda. Jadi setiap orang akan membentuk kebiasaan yang khusus bagi dirinya sendiri agar dapat dibedakan dengan orang lain.

Kebiasaan yang baik pada dasarnya akan diakui dan dilakukan oleh masyarakat. Lebih jauh lagi, kebiasaan tersebut akan mendapat pengakuan dari masyarakat sehingga kebiasaan itu dijadikan menjadi patokan bagi masyarakat untuk bertindak. Kebiasaan yang teratur dilakukan oleh seseorang, kemudian dijadikan dasar bagi hubungan antara orang-orang tertentu sehingga menimbulkan norma atau kaidah. Kaidah yang timbul dari masyarakat biasanya dinamakan sebagai adat istiadat. Adat istiadat masyarakat yang pada dasarnya berbeda-beda. Adat-istiadat itu bersifat tidak tertulis dan dipelihara secara turun temurun.

Di samping adat-istiadat, ada kaidah yang dinamakan sebagai peraturan hukum. Peraturan ini sengaja dibuat dan bersifat tegas dalam pelaksanaannya. Peraturan disini mengatur hal secara batiniyah maupun lahiriah agar tercapai suatu keserasian antara keduanya. Peraturan ini dibuat oleh lembaga negara yang diberi wewenang oleh presiden. Peraturan ada yang bersifat tertulis dan ada yang tidak, di Indonesia peraturan ini dinamakan sebagai hukum adat.

Dalam kehidupan masyarakat pasti ada pola-pola perilaku yang merupakan cara-cara masyarakat untuk bertindak atau berkelakuan yang sama dan harus diikuti oleh semua anggota masyarakat. Pola-pola perilaku tadi sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakatnya. Dalam mengatur hubungan antarmanusia, kebudayaan dinamakan juga dengan normatif yaitu kebudayaan adalah suatu garis-garis pokok tentang perilaku atau *blue print for behaviour* yang menetapkan peraturan-peraturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan, apa yang dilarang, dan lain sebagainya.

Apabila manusia sudah dapat hidup berdampingan dengan masyarakat lain, sehingga timbul rasa tentram dan timbul keinginan untuk menciptakan sesuatu untuk menyatakan gagasan atau perasaan kepada orang lain, maka itu juga termasuk fungsi dari kebudayaan. Misalnya, seni musik. Musik tercipta tidak hanya untuk mengatur hubungan antara manusia, namun juga untuk mewujudkan perasaan kepada seseorang. Dengan demikian sama halnya dengan kebudayaan, fungsi kebudayaan sangat besar bagi manusia, yaitu untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia dan sebagai wadah segala perasaan.

3. Proses Terbentuknya Kebudayaan

Kebudayaan setiap bangsa atau masyarakat terdiri dari unsur-unsur besar maupun unsur-unsur kecil yang merupakan bagian suatu kebulatan yang bersifat sebagai kesatuan. Misalnya dalam kebudayaan Indonesia dijumpai unsur besar seperti umpamanya Majelis Permusyawaratan Rakyat, di samping adanya unsur-unsur kecil seperti sisir, kucing, atau hal-hal lain yang lebih kecil pengaruhnya terhadap kebudayaan.

Beberapa orang sarjana telah mencoba merumuskan unsur-unsur pokok kebudayaan. Misalnya, Melville J. Herskovits mengajukan empat unsur pokok pembentuk kebudayaan. Yaitu:

1. Alat-alat teknologi
2. Sistem Ekonomi
3. Keluarga
4. Kekuasaan Politik

Sedangkan Malinowski, yang terkenal sebagai salah seorang pelopor teori fungsional dalam antropologi, menyebut unsur-unsur pokok kebudayaan antara lain:

1. Sistem norma yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat

2. Di dalam upaya menguasai alam sekelilingnya
3. Organisasi ekonomi
4. Alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan; perlu diingat bahwa keluarga merupakan lembaga pendidikan yang utama
5. Organisasi kekuatan

Masing-masing dari unsur pembentuk tersebut, dapat dikelompokkan sehingga berunsur ilmiah dan diklasifikasikan ke dalam unsur-unsur pokok atau besar kebudayaan, yang lazim disebut *cultural universal*, universal dapat di mengerti dengan istilah lain yaitu budaya dapat di jumpai di setiap dan dimanapun di penjuru dunia. Unsur-unsur kebudayaan yang dianggap sebagai *cultural universal* sebagai berikut:

- a. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transpor, dan sebagainya);
- b. Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi (pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi dan sebagainya);
- c. Sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan);
- d. Bahasa (lisan maupun tertulis);
- e. Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya);
- f. Sistem pengetahuan
- g. Religi (sistem kepercayaan).

Sedangkan terkait dengan budaya sebuah perusahaan, beberapa unsur pembentukan budaya perusahaan antara lain sebagai berikut:

1. Lingkungan usaha, lingkungan dimana perusahaan itu beroperasi akan menentukan apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan tersebut untuk mencapai keberhasilan

2. Nilai-nilai (*values*), merupakan konsep dasar dan keyakinan dari suatu organisasi
3. Panutan/keteladanan, orang-orang yang menjadi panutan atau teladan karyawan lainnya karena keberhasilannya
4. Upacara-upacara (*rites* dan *ritual*), acara-acara ritual yang diselenggarakan oleh perusahaan dalam rangka memberikan penghargaan pada karyawannya.
5. Network, jaringan komunikasi informal di dalam perusahaan yang dapat menjadi sarana penyebaran nilai-nilai dari budaya perusahaan.

Eugene Mc Kenna dan Nic Beech (2000) membagi budaya organisasi atau budaya perusahaan atas beberapa komponen pembentuk, yaitu :

1. Filosof, yang menjadi panduan penetapan kebijakan organisasi baik yang berkenaan dengan karyawan ataupun klien
2. Nilai-nilai dominan yang dipegang oleh organisasi
3. Norma-norma yang diterapkan dalam bekerja
4. Aturan main untuk berelasi dengan baik dalam organisasi yang harus dipelajari oleh anggota baru agar dapat diterima oleh organisasi
5. Tingkah laku khas tertentu dalam berinteraksi yang rutin dilakukan. Perasaan atau suasana yang diciptakan dalam organisasi.

Istilah dalam pola-pola budaya pengertian Pola Budaya Karakteristik dari suatu budaya. Pola budaya adalah tatanan dari unsur kebudayaan yang menjadi dasar keutuhan suatu kebudayaan tertentu. Pola budaya adalah konsep menggambarkan interelasi dari sebuah kelompok berdasarkan orientasi kultural. Nilai adalah sebuah kepercayaan yang didasarkan pada sebuah kode etik di dalam masyarakat, efektifitas komunikasi antar

manusia, termasuk komunikasi antar budaya, sangat tergantung pada pemahaman tentang makna dalam nilai.

Bahasa adalah kebudayaan ditemukan hanya dalam masyarakat manusia sebab hanya manusialah yang dapat mengembangkan sistem simbol dan simbol dan menggunakannya secara lebih baik.

Sanapiah, S (1967) menarik kesimpulan bahwa Komplek-komplek kebudayaan juga saling berpadu untuk membentuk unit-unit yang lebih dari kebudayaan. Unit-unit yang terakhir ini disebut sebagai istilah pola-pola atau konfigurasi-konfigurasi kebudayaan. Suatu pola kebudayaan olahraga nasional lahir bila sepak bola, bola basket, dan atletik yang masing-masing adalah komplek-komplek kebudayaan digabungkan menjadi satu untuk membentuk sebuah pola olahraga. Demikian juga halnya, mobil-mobil dan komplek-komplek kebudayaan mekanis lainnya adalah merupakan tanda-tanda dari suatu pola kebudayaan teknologi di dalam suatu masyarakat tertentu.

Pola budaya menurut Edward T. Hall bahwa Setiap kebudayaan mengajarkan cara-cara tertentu untuk memproses informasi yang masuk dan keluar dari dan ke sekeliling mereka. Misalnya mengatur bagaimana setiap anggota budaya memahami proses pertukaran informasi maupun kemas informasi itu sendiri. Sebuah kebudayaan dimana suatu prosedur pengalihan informasi menjadi lebih sukar dikomunikasikan disebut Budaya Kontek Tinggi (*High Context Culture*) sedangkan sebuah kebudayaan dimana suatu prosedur pengalihan informasi menjadi lebih gampang dikomunikasikan disebut Budaya Kontek Rendah (*Low Context Culture*). Keseragaman-keseragaman utama diantara kebudayaan-kebudayaan itu berpusat kepada kemampuan-kemampuan dan kebutuhan-kebutuhan pokok dari manusia.

Di dalam setiap masyarakat terdapat jenis-jenis tingkah laku khusus yang berkaitan dengan aspek komunikasi, proses memperbanyak keturunan yang

dianggap sah, pemerintahan, aktifitas di bidang perekonomian, rekreasi, dan agama. Ini semua adalah unsur-unsur serta bentuk-bentuk dari kebudayaan (struktur-struktur institusional) yang membentuk serta dapat dianggap sebagai pola-pola kebudayaan yang universal. Berhubung pola-pola kebudayaan yang universal itu dipandang serta tampak sebagai apa yang bisa disebut sebagai suatu tahap pertumbuhan (*generic level*) dari analisa, maka penting juga bahwa ada juga variabilitas yang besar di dalam cara orang mewujudkan pola-pola kebudayaan tersebut.

B. Masyarakat

1. Pengertian

Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antarmanusia. Biasanya anggota-anggota masyarakat menghuni suatu wilayah geografis yang mempunyai kebudayaan-kebudayaan dan lembaga-lembaga yang sama.³⁸ Seperti yang sudah pernah disinggung pada bab awal tentang masyarakat yang merupakan objek kajian dari sosiologi, berikut ini adalah beberapa pengertian masyarakat menurut para tokoh.

1. Emile Durkheim

Masyarakat adalah suatu kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggotanya.

2. Karl Max

Masyarakat adalah suatu struktur yang menderita ketegangan organisasi ataupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah secara ekonomis.

3. Max Weber

Masyarakat adalah suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya.

³⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2019, halaman 46

4. Selo Soemardjan

Masyarakat merupakan orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.

Menurut Marion Levy, ada empat kriteria yang perlu dipenuhi agar suatu kelompok dapat disebut sebagai masyarakat yaitu:

1. Kemampuan bertahan yang melebihi masa hidup anggotanya.
2. Perekrutan seluruh atau sebagian anggotanya melalui reproduksi atau kelahiran.
3. Adanya sistem tindakan utama.
4. Kesetiaan pada suatu sistem tindakan utama secara bersama-sama.

2. Unsur-Unsur Masyarakat

Menurut Soerjono Soekanto, unsur-unsur dalam suatu masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Terdapat sekurang-kurangnya dua orang manusia yang hidup bersama.
2. Mereka berhubungan dalam waktu yang cukup lama.
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Charles P. Loomis, mengemukakan bahwa masyarakat sebagai suatu sistem sosial memiliki sejumlah unsur, di antaranya :

1. Kepercayaan dan Pengetahuan

Perilaku anggota masyarakat sangat dipengaruhi oleh hal yang mereka yakini dan ketahui tentang kebenaran, sistem religi, serta cara-cara penyembahan pada Yang Maha Kuasa.

2. Perasaan

Perasaan adalah keadaan jiwa manusia yang berkenaan dengan situasi alam sekitarnya, termasuk sesama manusia.

3. Tujuan

Tujuan adalah hasil akhir atas suatu tindakan dan perilaku seseorang yang harus dicapai, baik melalui perubahan-perubahan maupun dengan cara mempertahankan suatu keadaan yang sudah mantap.

4. **Kedudukan dan peran**

Kedudukan adalah posisi seseorang secara umum pada masyarakat dalam hubungan dengan orang lain. Peran ialah perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan statusnya.

5. **Kaidah atau Norma**

Kaidah atau norma merupakan pedoman tentang perilaku yang diharapkan atau pantas menurut kelompok atau masyarakat.

6. **Tingkat atau Pangkat**

Tingkat atau pangkat seseorang dalam masyarakat terkait dengan hak dan kewajiban tertentu. Tingkat/pangkat diperoleh setelah melalui penilaian terhadap perilaku seseorang.

7. **Kekuasaan**

Kekuasaan adalah setiap kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Kekuasaan dapat diperoleh melalui pewarisan atau pemilihan.

8. **Sanksi**

Sanksi merupakan suatu bentuk ganjaran yang diperoleh seseorang karena perilakunya. Sanksi dapat berupa *reward* atau *punishment*.

9. Fasilitas atau Sarana

Fasilitas atau sarana adalah semua bentuk cara, metode, dan benda-benda yang digunakan manusia untuk mencapai tujuan.

3. Ciri-ciri Masyarakat

Menurut Soerjono Soekanto masyarakat pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri atas 2 orang.
2. Bercampur atau bergaul dalam waktu yang cukup lama sehingga menciptakan system komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia.
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan.
4. Merupakan suatu sistem hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.

Berbicara mengenai ciri-ciri masyarakat, maka dapat disimpulkan mengenai ciri-ciri masyarakat sebagai berikut :

1. Masyarakat adalah manusia yang hidup bersama. Ciri masyarakat yang pertama adalah manusia yang hidup secara bersama dan membentuk kelompok. Kelompok kelompok tersebut kemudian yang nantinya membentuk suatu masyarakat. Antar kelompok saling mengenali antara yang satu dengan yang lain dan saling ketergantungan, karena setiap manusia tidak mungkin dapat meneruskan hidupnya tanpa bergantung dengan manusia lain.
2. Masyarakat melahirkan kebudayaan. Ciri masyarakat yang berikutnya ialah melahirkan kebudayaan. Dalam konsepnya tidak ada masyarakat maka tidak ada budaya, begitupun sebaliknya. Masyarakatlah yang akan melahirkan kebudayaan dan budaya itu pula diwarisi dari generasi ke generasi berikutnya dengan berbagai proses penyesuaian dengan perkembangan zaman.

3. Masyarakat selalu mengalami perubahan. Ciri masyarakat yang berikutnya adalah selalu mengalami perubahan. Sebagaimana yang terjadi dalam kebudayaan, masyarakat juga selalu mengalami perubahan. Suatu perubahan yang terjadi karena faktor-faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Contohnya : dalam setiap penemuan baru mungkin saja akan mengakibatkan perubahan dalam masyarakat.
4. Masyarakat adalah manusia yang berinteraksi. Ciri masyarakat yang berikutnya adalah manusia yang berinteraksi. Salah satu syarat perwujudan dari masyarakat ialah terdapatnya hubungan dan bekerja sama di antara ahli dan ini akan melahirkan interaksi. Interaksi ini boleh saja berlaku secara lisan maupun tidak dan komunikasi berlaku apabila masyarakat bertemu baik secara langsung maupun tidak langsung di antara satu dengan yang lain.
5. Masyarakat terdapat Kepimpinan, Ciri-ciri masyarakat yang berikutnya yaitu terdapat kepemimpinan. Dalam hal ini pemimpin yang terdiri dari kepala keluarga, kepala kampung, kepala negara dan lain sebagainya. Dalam suatu masyarakat tertentu di Indonesia terdapat pola kepemimpinan yang bercorak tertutup, hal ini disebabkan karena pemilihan berdasarkan faktor keturunan.
6. Masyarakat terdapat Stratifikasi Sosial, Ciri-ciri masyarakat yang terakhir ialah adanya stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial yaitu meletakkan seseorang pada kedudukan dan juga peranan yang harus dimainkannya di dalam masyarakat.

BAB V INTERAKSI SOSIAL

A. Pengantar

Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang memiliki banyak dimensi serta kompleksitas. Manusia merupakan makhluk sosial sekaligus makhluk budaya. Manusia selalu merasa tertarik untuk bekerja sama dan berinteraksi dalam kehidupan sosial. Interaksi tersebut timbul bukan hanya karena dorongan kebutuhan ekonomis, biologis, emosional, dan lain sebagainya yang mengaitkan individu, tetapi juga sebagai fitrah yang tak terbantahkan pada dirinya.

Kehidupan manusia senantiasa dihadapi oleh berbagai fenomena keberagaman, mulai dari warna kulit, etnis, agama, dan bahasa.³⁹ Manusia memang terlahir sebagai makhluk yang sosial, sehingga keberadaan manusia lain sangatlah penting untuk menjalani kehidupan secara normal. Hubungan yang seperti itu dapat dianggap sebagai bentuk interaksi sosial.

Interaksi sosial dapat terjalin ketika terdapat kontak sosial dan komunikasi antara dua individu atau kelompok. Interaksi sosial adalah langkah awal dalam terbangunnya hubungan antar individu, sementara proses komunikasi melibatkan penuangan informasi serta tanggapan dan penafsiran terhadap informasi yang disampaikan.

Karp dan Yoels mengidentifikasi beberapa faktor sebagai potensi sumber inspirasi bagi memulai proses komunikasi atau interaksi sosial. Sumber informasi tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu ciri fisik dan penampilan. Ciri fisik merujuk pada atribut yang dimiliki seseorang sejak lahir, seperti jenis kelamin, usia, bentuk wajah, dan ras. Sementara itu, penampilan di sini mencakup daya tarik fisik, bentuk tubuh, gaya berbusana, serta cara berkomunikasi dan bertutur kata.

³⁹ M. Amin Abdullah. 2000. *Dinamika Islam Kultur; Pemetaan atas Wacana Keislaman Kontemporer, Cet. 1*, (Bandung: Mizan), hal. 68.

Interaksi sosial mengikuti aturan yang bisa teramati melalui dimensi ruang maupun dimensi waktu. Robert T Hall bersama dengan W. I. Thomas. Hall mengelompokkan ruang dalam interaksi sosial menjadi empat kategori jarak yang berbeda, yakni jarak intim, jarak pribadi, jarak sosial, dan jarak publik. Selain penjelasan mengenai ruang, Hall juga menyebutkan peraturan tentang waktu. Pada konteks waktu ini, terlihat bahwa terdapat batasan toleransi waktu yang dapat memengaruhi interaksi yang terjalin. Aturan final yang dijelaskan oleh W. I. adalah dimensi situasi. Penafsiran situasi adalah hal yang dilakukan seseorang sebelum memberikan reaksi. Definisi situasi ini dibuat bersama oleh individu dan masyarakat.

B. Pengertian Interaksi Sosial

Interaksi sosial bisa dipahami sebagai rangkaian hubungan sosial yang selalu berubah. Hubungan sosial yang dimaksud bisa berupa interaksi antara individu, antara kelompok, atau antara individu dengan kelompok lainnya.⁴⁰ Dalam setiap interaksi, simbol-simbol pun hadir, yang mana makna dan nilai diberikan kepada mereka, yakni oleh para penggunanya.

Menurut pandangan W. A. Gerungan dalam Soetarno memandang interaksi sosial sebagai hubungan antara dua manusia atau lebih di mana tindakan individu yang satu dapat memengaruhi individu yang lain, begitu pun sebaliknya.⁴¹ Menurut Herbert Blumer, interaksi sosial terjadi ketika manusia berperilaku terhadap sesuatu karena nilai atau maknanya bagi manusia. Kemudian makna itu diperoleh melalui proses interaksi antara individu dengan individu lainnya. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa makna tidaklah bersifat tetap, melainkan dapat berubah seiring dengan proses penafsiran yang

⁴⁰ Yesmir Anwar dan Adang. 2013. *Sosiologi Untuk Universitas*, Cet. 1, (Bandung: Refika Aditama), hal. 194.

⁴¹ Soetarno. 1989. *Psikologi Sosial*, Cet. 1, (Yogyakarta: Kanisius), hal. 20.

dilakukan oleh individu ketika mereka menemui sesuatu. Penafsiran itu juga sering disebut dengan proses interpretatif.

Interaksi Sosial sendiri memiliki macam-macam definisi, berikut ini Pengertian atau definisi Interaksi Sosial Menurut Para Ahli.

1. Menurut Gilin

Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu dengan kelompok atau antar kelompok dengan kelompok.

2. Menurut Macionis

Interaksi sosial adalah proses bertindak dan membalas tindakan yang dilakukan seseorang dalam hubungan dengan orang lain.

3. Menurut Soerjono Soekanto

Interaksi sosial adalah proses sosial mengenai cara-cara berhubungan yang dapat dilihat jika individu dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu serta menentukan sistem dan hubungan sosial.

4. Menurut Broom dan Selznick

Interaksi sosial adalah proses bertindak yang dilandasi oleh kesadaran adanya orang lain dan proses menyesuaikan respon atau tindak balasan sesuai dengan tindakan orang lain kepadanya.

5. Menurut Kimball Young dan Raymond W. Mack

Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis dan menyangkut hubungan antara individu, antara individu dengan kelompok maupun antara kelompok dengan kelompok lainnya.

6. Menurut Homans

Interaksi sosial adalah suatu kejadian ketika suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang terhadap individu lain diberi ganjaran atau hukuman dengan menggunakan suatu tindakan oleh yang menjadi pasangannya.

Beberapa definisi interaksi sosial menurut para ahli tersebut pada dasarnya memiliki persamaan. Dari semua

penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Interaksi sosial melibatkan hubungan antara individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Tanpa interaksi sosial, kehidupan bersama tidak akan dapat berkembang secara dinamis.

C. Unsur dan Ciri Interaksi Sosial

Dalam interaksi sosial, terdapat makna mengenai komunikasi saling berpengaruh antara individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Dalam hubungan sosial, ada dua faktor penting yang terlibat, yaitu perilaku dan saling terkaitnya perilaku sosial tersebut. Tindakan sosial menjadi bagian penting dalam pembentukan interaksi sosial karena interaksi tersebut melibatkan aktivitas saling bertindak yang terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tindakan memiliki peran krusial dalam dinamika interaksi sosial.

Saat berkomunikasi, seseorang atau kelompok sebetulnya sedang berusaha atau belajar memahami perilaku sosial individu atau kelompok lain. Umumnya, tindakan manusia dipengaruhi oleh orientasi yang menjadi latar belakangnya. Setiap individu yang melakukan suatu tindakan pasti memiliki orientasi. Di sini, orientasi berkaitan dengan upaya yang selalu diarahkan untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Charles P Loomis menyampaikan bahwa ciri penting dari interaksi sosial adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pelaku lebih dari seorang, bisa dua orang atau lebih.
2. Adanya komunikasi antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol.
3. Adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lampau, masa kini dan masa yang akan datang, yang menentukan sifat dari aksi yang sedang berlangsung.
4. Adanya tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh pengamat.

Untuk mencapai ketertiban dan harmonisasi dalam interaksi sosial diperlukan bukan hanya kemampuan untuk bertindak sesuai dengan konteks sosialnya, tetapi perlu kemampuan untuk menilai secara objektif perilaku kita sendiri dari sudut pandang orang lain. Sudah pantaskah perbuatan tersebut dilakukan terhadap orang lain.

Untuk memahami secara objektif tindakan seseorang dalam interaksi sosial diperlukan kemampuan berempati atau kemampuan untuk menempatkan diri dalam kerangka berpikir orang lain serta kemampuan untuk melakukan introspeksi atau muhasabah diri terhadap setiap tindakan sosial.

D. Syarat-syarat Interaksi Sosial

Interaksi sosial merupakan kunci rotasi semua kehidupan sosial, tanpa adanya interaksi sosial maka tidak mungkin ada kehidupan bersama. Jika hanya fisik yang saling berhadapan antara satu sama lain, tanpa adanya interaksi maka tidak akan dapat menghasilkan suatu kelompok sosial atau individu yang dapat saling menanggapi. Oleh sebab itu interaksi sosial tidak mungkin dapat terjadi tanpa adanya dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi.⁴²

1. Kontak Sosial

Kontak sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena memungkinkan interaksi antar individu, berbagai pengalaman, serta mengambil pelajaran dari orang lain. Kontak sosial terjadi ketika individu bertemu dengan individu lainnya, individu berinteraksi dengan kelompok, maupun kelompok berhubungan dengan kelompok lainnya, yang semuanya memfasilitasi terjadinya komunikasi.

Kontak sosial asal-usul katanya berasal dari bahasa latin yaitu *Cum* dan *Tanggo* yang berarti bersama-sama menyentuh. Kontak sosial adalah bentuk sentuhan yang tidak semata melalui fisik, melainkan juga melalui bentuk lain yang bermakna keterlibatan individu-individu atau

⁴² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, 1986, halaman 54

kelompok seperti mengobrol, pidato, menyapa, tersenyum, dan orasi. Sentuhan atau kontak juga dapat terjadi melalui perantara seperti media sosial dan alat komunikasi lain seperti telpon, *video call*, kontak melalui media sosial facebook, instagram dan lain-lain.



**Ilustrasi gambar Kontak Sosial (Sumber gambar:
<https://kids.grid.id>)**

Berbagai macam jenis kontak sosial biasanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di antaranya:

a. Kontak sosial positif

Interaksi sosial yang positif dapat memberikan manfaat bagi seseorang, misalnya meningkatkan kebahagiaan dan membantu memperkuat keyakinan diri. Sebagai contoh, tindakan seperti memberikan pujian, memberikan dukungan emosional, dan bersikap ramah.

b. Kontak sosial negatif

Kontak sosial yang dapat memengaruhi individu secara negatif, misalnya menimbulkan perasaan sedih atau cemas. Contoh-contoh dari kategori ini meliputi perlakuan yang merendahkan, upaya menakut-nakuti, dan perilaku yang agresif.

c. Kontak sosial netral

Kontak sosial itu tidak begitu berpengaruh bagi individu. Contoh dari kategori ini meliputi pertukaran sapaan atau senyum.

d. Kontak sosial formal

Kontak sosial yang terjalin dalam situasi formal, seperti interaksi antara pengajar dan siswa atau pimpinan dan karyawan. Sebagai contoh lain dalam kategori ini, terdapat pertemuan bisnis dan acara formal lainnya.

e. Kontak sosial informal

Kontak sosial di lingkungan informal, seperti berkumpul dengan teman atau keluarga. Salah satu contoh lain dari tipe ini yaitu berbagi cerita di kafe atau restoran.

f. Kontak sosial individual

Interaksi antarpersonal antara individu dan orang lain. Contoh dari jenis ini meliputi percakapan antara dua orang atau komunikasi pesan menggunakan media sosial.⁴³

2. Komunikasi

Komunikasi ditinjau dari asal-usul katanya berasal dari kata *Communicare* yang berarti berhubungan. Komunikasi melibatkan pengiriman dan penerimaan pesan. Komunikasi terjadi apabila terjadi secara berkesinambungan terjadi pertukaran pesan. Komunikasi biasanya terjadi setelah sebelumnya adanya kontak sosial. Perlu digarisbawahi bahwa terjadinya kontak sosial tidak selalu diikuti oleh komunikasi. Namun terjadinya komunikasi selalu didahului oleh kontak sosial. Sebagai contoh, kita menyapa teman kita dikerumunan, lalu berjabat tangan dan kemudian mengobrol.

⁴³ Pengertian Kontak Sosial beserta Contohnya, Sejarah dan Sosial, 27 April 2023, (Sumber: <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/>) Diakses 25 November 2024.

Proses komunikasi lebih panjang daripada kontak sosial karena melibatkan pertukaran pesan secara intensif. Pesan ini dapat berbentuk verbal atau non verbal. Bentuk verbal berupa kata-kata seperti yang disampaikan pada pembicaraan dan diskusi. Bentuk non verbal berupa simbol-simbol, misalnya memberikan senyum pada orang lain.

E. Bentuk-bentuk Interaksi Sosial

Interaksi sosial dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti kerja sama, akomodasi, dan asimilasi. Kerja sama melibatkan upaya bersama antara individu dengan individu atau antara kelompok-kelompok untuk mencapai satu atau beberapa tujuan. Akomodasi bisa dimengerti sebagai suatu situasi di mana terjadi keseimbangan dalam hubungan antara individu atau kelompok manusia terkait dengan norma dan nilai sosial dalam masyarakat. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan mencapai keadaan yang stabil. Sementara itu, Asimilasi adalah sebuah proses di mana individu yang saling berinteraksi mengidentifikasi diri mereka dengan kepentingan dan tujuan kelompok.

Interaksi sosial juga bisa terjadi dalam bentuk persaingan, kontravensi, atau pertentangan. Persaingan adalah sebuah proses sosial di mana individu atau kelompok manusia bersaing untuk mendapatkan keuntungan melalui berbagai bidang kehidupan. Jenis kontravensi adalah bentuk interaksi sosial yang terletak di tengah-tengah persaingan dan pertentangan. Pertentangan adalah suatu proses kehidupan bersama di mana individu atau kelompok saling berupaya mencapai tujuan mereka dengan cara menantang pihak lain dengan ancaman dan kekerasan.

Menurut Gillin and Gillin, bentuk interaksi sosial dapat terjadi melalui proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial ada dua macam, yaitu proses Asosiatif (*processes of association*) dan proses sosial Disasosiatif (*processes of disassociation*).

1. Proses Asosiatif

Adalah suatu proses yang mendorong terbentuknya persatuan atau integrasi sosial. Mendorong terbentuknya pranata, lembaga, atau organisasi sosial. Proses ini dapat terbentuk antara lain sebagai berikut :

a). Kerjasama

Kerja sama adalah usaha bersama antar individu, antarkelompok, atau antara individu dan kelompok, fungsi kerja sama antara lain adalah untuk mendorong terbentuknya persatuan atau integrasi sosial yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kerjasama akan dapat bertambah kuat apabila ada bahaya dari luar yang menyinggung kesetiaan yang tertanam di dalam kelompoknya.

Bentuk-bentuk kerja sama menurut pelaksanaannya dapat berupa pertama gotong royong, yaitu suatu bentuk kerjasama dengan ikatan ketulusan antara individu atau kelompok. Kedua, Koalisi adalah suatu bentuk kerjasama kombinasi dua organisasi atau lebih yang memiliki tujuan yang sama, namun suatu saat bisa saja berubah karena perbedaan sebuah kepentingan. Ketiga Joint Venture adalah suatu bentuk kerjasama yang semata-mata untuk bertujuan materi seperti kerja sama dalam suatu proyek tertentu, misalnya pertambangan.

b). Akomodasi

akomodasi adalah suatu cara untuk menyelesaikan pertikaian tanpa menghancurkan pihak lawan. Akomodasi memiliki dua arti, yaitu sebagai keadaan dan sebagai proses yang sedang berlangsung. Akomodasi sebagai keadaan merujuk pada keseimbangan interaksi sosial. Akomodasi sebagai suatu proses mengacu pada usaha-usaha manusia untuk meredakan atau menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan lawan.

Adapun akomodasi memiliki tujuan antara lain untuk pertama mengurangi pertentangan antara

kelompok, kedua mencegah meledaknya konflik, dan ketiga memungkinkan terjadinya kerjasama. Sedangkan untuk memungkinkan terjadinya sebuah kerjasama akomodasi memiliki bentuk atau cara antara lain sebagai berikut :

1. Toleransi

Toleransi adalah suatu bentuk akomodasi yang bersifat non formal tanpa disadari karena norma dan nilai yang telah mengakar. Toleransi sering juga dinamakan toleran partisipasi yaitu suatu bentuk akomodasi tanpa adanya persetujuan formal. Contohnya: beberapa orang atau kelompok menyadari akan pihak lain dalam rangka menghindari pertikaian. Dalam masyarakat Jawa dikenal dengan istilah *tepa selira* atau tenggang rasa agar hubungan sesamanya bisa saling menyadari kekurangan diri sendiri masing-masing.

2. Kompromi

Kompromi adalah suatu bentuk akomodasi dimana pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutananya agar tercapai suatu penyelesaian. Contoh : Bunga dan Budi masing-masing berusaha untuk mengurangi tuntutananya terhadap hal-hal yang diinginkan pasangan masing-masing.

3. Konsiliasi

Konsiliasi adalah suatu bentuk akomodasi dengan jalan mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian. Contoh dari konsiliasi adalah sengketa yang terjadi antara Thailand dan Perancis, kedua belah pihak sepakat untuk membentuk Komisi Konsiliasi.

4. Mediasi

Mediasi adalah suatu bentuk akomodasi penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang

bersengketa mencapai penyelesaian atau solusi yang diterima oleh kedua belah pihak. Misalnya ketegangan yang terus-meneru terjadi antara pemerintah RI dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) akhirnya dapat diselesaikan secara damai setelah melibatkan pihak ketiga, yakni negara Swedia yang memberikan fasilitas bagi terselenggaranya pertemuan antara perwakilan dua kelompok tersebut untuk saling menjalin kesepakatan damai. Upaya perdamaian yang demikian ini disebut mediasi.

5. Arbitasi

Arbitrasi adalah suatu bentuk akomodasi untuk mencapai sebuah kompromi melalui pihak ketiga, sebab pihak-pihak yang bertikai tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Pihak ketiga ini dipilih oleh kedua belah pihak atau badan berwenang yang memiliki keputusan yang berkekuatan hukum.

6. Ajudikasi

Ajudikasi adalah suatu bentuk akomodasi melalui proses penyelesaian perkara atau sengketa melalui jalur pengadilan. Hal ini dilakukan apabila proses-proses akomodasi sebelumnya tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang tengah terjadi.⁴⁴

2. Proses Disosiatif

Interaksi sosial melalui proses disosiatif adalah proses yang mengarah pada konflik. Proses ini merupakan cara bertentangan dengan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Proses disosiatif terdiri dari tiga bentuk, yaitu persaingan, kontravensi, dan konflik.

1. Persaingan atau kompetisi

Persaingan atau kompetisi adalah sebuah proses interaksi sosial yang terjadi karena adanya persaingan antara individu atau antar kelompok.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, 1986, halaman 65-66

2. Kontravensi

Kontravensi adalah sebuah proses interaksi sosial yang ditandai dengan adanya ketidakpastian tentang diri seseorang ataupun sesuatu yang terdapat dalam perasaan yang tidak bisa disembunyikan.

3. Konflik

Konflik adalah suatu proses interaksi melalui pertentangan antar individu atau antar kelompok yang berusaha untuk memenuhi tujuannya yang disertai dengan benturan fisik, ancaman atau kekerasan.

Untuk memahami bagaimana interaksi sosial terjadi melalui proses asosiatif dan disosiatif, kita dapat merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Mark L. Knapp menjelaskan bahwa ada beberapa tahapan interaksi sosial yang dapat digunakan untuk mendekatkan atau merenggangkan hubungan. Proses mendekatkan diri melibatkan serangkaian tahapan yang dimulai dengan tahap memulai, dilanjutkan dengan tahap menjajaki, kemudian tahap meningkatkan, diikuti dengan tahap menyatupadukan, dan diakhiri dengan tahap mempertalikan. Proses untuk mengakhiri hubungan meliputi langkah-langkah membedakan, membatasi, memacetkan, menghindari, dan akhirnya memutuskan.

Salah satu pendekatan lain yang dimaksud adalah pendekatan dramaturgi, seperti yang dijelaskan oleh Erving Goffman. Melalui cara ini, Erving Goffman menggunakan bahasa dan imajinasi teater untuk menggambarkan realitas subjektif dan objektif dari interaksi sosial. Pendekatan ini memuat konsep-konsep mengenai berbagai tempat di mana interaksi sosial berlangsung. Ada yang disebut sebagai *social establishment*, yaitu tempat dimana interaksi tersebut terjadi. *Back region* atau *backstage* merujuk pada lokasi persiapan interaksi sosial. *Front region* adalah tempat dimana ekspresi dalam interaksi sosial disampaikan. Individu yang menyaksikan interaksi tersebut disebut sebagai *audience*.

Pihak yang terlibat langsung dalam interaksi disebut *team of performers*. Sementara yang tidak terlibat disebut sebagai *outsider*.

F. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Interaksi Sosial

Menurut Bimo Walgito, terdapat sejumlah faktor yang menjadi dasar dari perilaku dalam interaksi sosial, antara lain⁴⁵:

a. Imitasi

Imitasi adalah keinginan untuk meniru orang lain. Menurut Terde dalam Bimo Walgito, faktor imitasi menjadi satu-satunya pondasi yang memicu interaksi sosial. Sebagai contoh, terdapat imitasi positif ketika seorang siswa mencontoh perilaku seorang guru yang disiplin, datang tepat waktu, dan sopan. Sementara itu, contoh dari imitasi negatif adalah ketika seorang siswa meniru gaya rambut dan mode seorang artis yang terlalu berlebihan dan tidak cocok untuk usianya.

b. Sugesti

Sugesti adalah pengaruh psikis yang bisa berasal dari diri sendiri atau dari orang lain, yang umumnya diterima tanpa kritik dari individu yang bersangkutan. Contoh, dengan ucapan dan pidatonya saat Hari Kemerdekaan, Soekarno berhasil menginspirasi semangat perjuangan bangsa.

c. Identifikasi

Ada faktor lain yang ikut berperan dalam interaksi. Identifikasi sosial melibatkan pengenalan individu dalam suatu kelompok atau masyarakat. Mengidentifikasi adalah sebuah pendorong untuk menjadi identik (sama) dengan orang lain. Sebagai contoh, ketika seorang penggemar K-Pop begitu memuja-muja artis idolanya, maka ia akan meniru gaya hidup yang sama seperti idol mereka.

d. Simpati

Di samping hal-hal tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa simpati juga memberikan pengaruh dalam hubungan

⁴⁵ Bimo Walgito. 1999. *Psikologi Sosial*, Cet. 1, (Yogyakarta: Andi), hal. 66-73.

sosial. Simpati adalah perasaan tertarik pada orang lain. Pada zaman digital sekarang, media sosial sangat penting untuk mengekspresikan empati kepada orang lain meskipun kita tidak mengenal mereka secara personal, contohnya dengan membagikan informasi tentang korban bencana.

e. Empati

Empati dan simpati memiliki makna yang mirip. Namun, empati adalah ketulusan dalam merasakan dan memahami perasaan orang lain. Contohnya: Seluruh dunia sangat sedih ketika bencana tsunami terjadi di Aceh pada tahun 2004. Mereka tidak hanya mengungkapkan kesedihan dan kehilangannya tetapi juga datang membantu para korban.

f. Motivasi

Sama halnya dengan simpati dan empati, makna sugesti dan motivasi hampir serupa. Walaupun keduanya memberikan pengaruh, tapi motivasi lebih banyak dipengaruhi oleh pikiran yang rasional. Saat seseorang mentranfer pengaruh terhadap dirinya sendiri, maka akan terjadi proses refleksi terhadap hal-hal yang diterima dan kemudian dijadikan sebagai sumber motivasi.

Beberapa faktor dan contoh interaksi sosial di atas masih terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi sosial penting untuk menjalin hubungan dekat dengan orang lain. Selain itu, agar manusia dapat bertahan hidup, interaksi dapat menciptakan institusi dan norma untuk hidup dalam lingkungan yang nyaman.

BAB VI PERUBAHAN SOSIAL

A. Pengantar

William F. Ogburn dalam Moore (2002), berusaha memberikan suatu pengertian tentang perubahan sosial. Ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun immaterial. Penekannya adalah pada pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial. Perubahan sosial diartikan sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.

Definisi lain dari perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya. Tekanan pada definisi tersebut adalah pada lembaga masyarakat sebagai himpunan kelompok manusia dimana perubahan mempengaruhi struktur masyarakat lainnya. Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat seperti misalnya perubahan dalam unsur geografis, biologis, ekonomis dan kebudayaan.

Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan budaya. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagian, yang meliputi kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat dan lainnya. Akan tetapi perubahan tersebut tidak mempengaruhi organisasi sosial masyarakatnya. Ruang lingkup perubahan kebudayaan lebih luas dibandingkan perubahan sosial. Namun demikian dalam prakteknya di lapangan kedua jenis perubahan tersebut sangat sulit untuk dipisahkan.

Perubahan kebudayaan bertitik tolak dan timbul dari organisasi sosial. Pendapat tersebut dikembalikan pada pengertian masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat adalah sistem hubungan dalam arti hubungan antar organisasi dan

bukan hubungan antar sel. Kebudayaan mencakup segenap cara berfikir dan bertingkah laku, yang timbul karena interaksi yang bersifat komunikatif seperti menyampaikan buah pikiran secara simbolik dan bukan warisan karena keturunan. Apabila diambil definisi kebudayaan menurut Taylor dalam Soekanto, kebudayaan merupakan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat istiadat dan setiap kemampuan serta kebiasaan manusia sebagai warga masyarakat, maka perubahan kebudayaan adalah segala perubahan yang mencakup unsur-unsur tersebut. Soemardjan mengemukakan bahwa perubahan sosial dan perubahan kebudayaan mempunyai aspek yang sama yaitu keduanya bersangkutan paut dengan suatu cara penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan dalam cara suatu masyarakat memenuhi kebutuhannya.

Untuk mempelajari perubahan pada masyarakat, perlu diketahui sebab-sebab yang melatari terjadinya perubahan itu. Apabila diteliti lebih mendalam sebab terjadinya suatu perubahan masyarakat, mungkin karena adanya sesuatu yang dianggap sudah tidak lagi memuaskan. Menurut Soerjono Soekanto penyebab perubahan sosial dalam suatu masyarakat dibedakan menjadi dua macam yaitu faktor dari dalam dan luar. Faktor penyebab yang berasal dari dalam masyarakat sendiri antara lain bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk, penemuan baru, pertentangan dalam masyarakat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Sedangkan faktor penyebab dari luar masyarakat adalah lingkungan fisik sekitar, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain.

Perubahan sosial dapat dikatakan sebagai suatu perubahan dari gejala-gejala sosial yang ada pada masyarakat, dari yang bersifat individual sampai yang lebih kompleks. Perubahan sosial dapat dilihat dari segi terganggunya kesinambungan di antara kesatuan sosial walaupun keadaannya relatif kecil. Perubahan ini meliputi struktur, fungsi, nilai, norma, pranata, dan semua aspek yang dihasilkan dari interaksi

antarmanusia, organisasi atau komunitas, termasuk perubahan dalam hal budaya.

Perubahan sosial terbagi atas dua wujud sebagai berikut :

1. Perubahan dalam arti kemajuan (*progress*) atau menguntungkan.
2. Perubahan dalam arti kemunduran (*regress*) yaitu yang membawa pengaruh kurang menguntungkan bagi masyarakat.

Jika perubahan sosial dapat bergerak ke arah suatu kemajuan, masyarakat akan berkembang. Sebaliknya, perubahan sosial juga dapat menyebabkan kehidupan masyarakat mengalami kemunduran.

B. Hal-hal Yang Mendorong Dan Menghambat Perubahan

Ada dua faktor yang dapat menyebabkan terjadi perubahan sosial, yaitu faktor yang berasal dari dalam masyarakat dan juga faktor yang berasal dari luar masyarakat. Faktor yang bersumber dari masyarakat itu sendiri meliputi bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan-pertentangan dalam masyarakat, dan terjadinya pemberontakan atau resolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Sedangkan, faktor yang berasal dari luar masyarakat meliputi sebab-sebab yang berasal dari lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia seperti peperangan antar negara, dan pengaruh budaya lain.

Selain adanya faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial, adapula faktor yang mendorong dan juga menghambat perubahan sosial. Faktor yang mendorong terjadinya perubahan yaitu kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan yang lebih maju, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju, toleransi, sistem lapisan masyarakat yang terbuka, penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, orientasi masa depan, dan keinginan untuk meningkatkan taraf hidup.

Faktor yang menghambat terjadinya perubahan sosial adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang tradisional, adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat, rasa takut akan terjadinya kegoyahan kebudayaan, prasangka terhadap hal-hal yang baru, hambatan ideologis, dan kebiasaan untuk mempertahankan suatu kepercayaan.

1. Faktor Penyebab Perubahan

a. Perubahan Penduduk

Jumlah penduduk yang terus meningkat akan menambah kebutuhan terhadap beberapa fasilitas yang mendukung kehidupan mereka. Contohnya, fasilitas pendidikan, kesehatan, atau lapangan kerja. Jika jumlah anak dalam sebuah keluarga cukup besar, hak atas warisan akan semakin berkurang karena terbagi berdasarkan jumlah anak. Oleh karena itu, pemilikan tanah di pedesaan akan semakin berkurang.

Penduduk yang terus bertambah memerlukan lapangan kerja baru sedangkan lapangan kerja utama yang ada di desa hanya berkisar pada bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Desa tidak mampu menyediakan lapangan kerja baru dan sumber daya alam pedesaan yang terbatas membuat desa tidak mampu menampung tenaga kerja. Dengan demikian, banyak penduduk desa yang mengadu nasib ke kota untuk bekerja.

b. Penemuan-Penemuan Baru

Penemuan baru merupakan proses sosial dan kebudayaan yang terjadi dalam jangka waktu relatif cepat yang sering disebut inovasi. Penemuan tersebut kemudian memiliki daya guna dan manfaat bagi masyarakat sehingga tata kehidupan masyarakat mengalami perubahan. Di samping inovasi terdapat pula discovery yang artinya penemuan dari unsur-unsur kebudayaan yang baru, baik berupa alat baru maupun

berupa ide baru atau suatu rangkaian ciptaan-ciptaan dari warga masyarakat.

Discovery merupakan pengembangan dari penemuan yang sudah ada kemudian disempurnakan. Jika hasil penyempurnaan atau pengembangan penemuan tersebut diakui manfaatnya oleh masyarakat, penemuan tersebut dinamakan inovasi. Ditemukannya mesin cetak membawa perubahan bagi masyarakat, terutama dalam hal penggandaan buku-buku ilmu pengetahuan. Hal tersebut menyebabkan masyarakat mengetahui akan kebenaran-kebenaran ilmiah dan mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak dikenal.

Penemuan internet misalnya menyebabkan perubahan yang sangat radikal dalam masyarakat, pola pikir, pola perilaku dan tindakan menjadi berubah drastis hal ini menyebabkan perubahan dalam perilaku berbisnis, berniaga, berkomunikasi bahkan merambat kepada perubahan pola pengajaran, sistem politik, proses penegakan hukum bahkan kepada bidang pertahanan dan keamanan.

Penemuan tersebut dinamakan inovasi. Contoh awal seperti alat cetak yang awalnya sifatnya kaku karena huruf yang ada pada mesin cetak tidak dapat diubah-ubah, satu lempengan untuk satu halaman. Dengan demikian, orang berusaha menemukan alat pencetak yang hurufnya dapat diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan agar pencetakan dapat dengan mudah diperbanyak. Hal tersebut disebut dengan *discovery*. Penemuan yang sudah ada tersebut dapat juga dikombinasikan dengan berbagai alat bantu agar pencetakan-pencetakan berbagai buku, surat kabar, dan lain-lain lebih mudah. Alat percetakan ini tidak hanya digunakan oleh penemunya, tetapi juga dipasarkan ke berbagai tempat atas permintaan masyarakat. Jika masyarakat telah mengetahui manfaat dari penemuan alat cetak tersebut, proses ini dinamakan *invention*.

Jika orang mengamati perkembangan penemuan baru, tampak ada faktor-faktor pendorong yang memengaruhi masyarakat atau individu untuk lebih menyempurnakannya. Hal tersebut bertujuan agar penemuan tersebut menjadi lebih berguna dan bermanfaat dan diharapkan dapat berpengaruh terhadap bidang-bidang kehidupan yang lain.

c. Pertentangan

Pertentangan dalam masyarakat dapat menimbulkan perubahan sosial. Pertentangan dapat terjadi antara kelompok tua yang konservatif dan kelompok muda yang dinamis. Pertentangan ini sering terjadi pada masyarakat yang sedang berkembang menuju masyarakat modern yang lebih kompleks dari masyarakat tradisional.

Pertentangan juga terjadi antar individu, antarkelompok, serta antara individu dan kelompok. Misalnya, seorang yang membawa nilai-nilai baru mengenai penundaan usia perkawinan. Gagasan tersebut diutarakan pada masyarakat tradisional yang menjunjung tinggi pelaksanaan perkawinan di usia muda. Tentu saja gagasan tersebut ditentang karena tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Usaha agar masyarakat dapat menerima pemikiran tersebut memerlukan waktu yang lama. Kesadaran akan penundaan perkawinan umumnya pendidikan di masyarakat tinggi, perkawinan dilakukan setelah mencapai hal-hal tertentu tanpa memandang usia.

d. Terjadinya Pemberontakan atau Revolusi dalam Masyarakat

Pemberontakan yang terjadi di masyarakat dapat diketahui melalui pemberitaan di media massa, seperti surat kabar, radio, dan televisi akan membawa perubahan-perubahan politik di negara bersangkutan. Contohnya, pemberontakan yang terjadi di Sri Lanka yang dilakukan oleh Suku Tamil atau pemberontakan di India yang dilakukan di daerah Kashmir.

e. Perubahan yang Diakibatkan oleh Lingkungan Fisik

Gejala yang terjadi di lingkungan alam dapat menyebabkan perubahan sosial. Misalnya, gempa bumi terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Gempa bumi tersebut menyebabkan masyarakat kehilangan banyak harta benda dan keluarga. Keadaan tersebut memaksa masyarakat membentuk kehidupan kembali melalui lembaga atau organisasi sosial yang baru karena kehidupan lama telah rusak atau hilang. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat seperti perubahan mata pencaharian, perubahan keluarga, atau perubahan kekayaan.

f. Peperangan

Peperangan yang terjadi antara satu negara dan negara lain menyebabkan terjadinya perubahan karena kehancuran akibat perang. Contohnya, hancurnya harta benda, kehilangan anggota keluarga, atau bencana kelaparan. Negara yang kalah perang biasanya akan tunduk dengan menerima ideologi dan kebudayaan dari pihak yang memenangkan peperangan.

g. Pengaruh Kebudayaan Masyarakat Lain

Pengaruh kebudayaan dari masyarakat lain terutama kebudayaan Barat, dapat berasal dari film, televisi, radio, surat kabar, internet, media sosial dan media lainnya. Kadang-kadang media tersebut memberikan pengaruh negatif yang tidak sesuai dengan gaya hidup masyarakat Indonesia.

Akan tetapi, ada pula pengaruh luar yang positif, contohnya dalam hal pendidikan. Mereka yang menerima beasiswa belajar di luar negeri membawa pulang teori dan pandangan dari luar ke tanah air sehingga ilmu yang mereka dapat digunakan dan disesuaikan dengan budaya Indonesia, meski tidak menutup kemungkinan apabila ada beberapa orang setelah kepulangannya lebih memilih untuk tetap berideologi yang sudah ia dapatkan dari luar.

2. Faktor Penghambat Perubahan

- a. Kurang berhubungan dengan masyarakat lain

Masyarakat yang kurang memiliki hubungan dengan masyarakat lain umumnya adalah masyarakat terasing atau terpencil. Dengan keadaan seperti ini, mereka tidak mengetahui perkembangan-perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain.

- b. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat.

Keterlambatan perkembangan ilmu pengetahuan di suatu kelompok masyarakat dapat disebabkan karena masyarakat tersebut berada di wilayah yang terasing, sengaja mengasingkan diri atau lama dikuasai atau dijajah oleh bangsa lain sehingga mendapat pembatasan-pembatasan dalam segala bidang.

- c. Sikap masyarakat yang sangat tradisional.

Suatu sikap yang mengagung-agungkan tradisi lama serta anggapan bahwa tradisi tidak dapat diubah akan sangat menghambat jalannya proses perubahan, keadaan tersebut akan menjadi lebih parah apabila masyarakat yang bersangkutan dikuasai oleh golongan konservatif.

- d. Adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam kuat.

Dalam suatu masyarakat, selalu terdapat kelompok-kelompok yang menikmati kedudukan tertentu. Biasanya, dari kedudukan itu mereka mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu dan hak-hak istimewa.

- e. Rasa takut akan terjadi kegoyahan pada integrasi sosial yang telah ada.

Integrasi sosial mempunyai derajat yang berbeda. Unsur-unsur luar dikhawatirkan akan menggoyahkan integrasi sosial dan menyebabkan perubahan-perubahan pada aspek tertentu dalam masyarakat.

f. Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis.

Di dalam masyarakat mengganggu pandangan hidup atau keyakinan yang telah menjadi ideologi dan dasar integrasi mereka dalam waktu lama dapat terancam oleh setiap usaha perubahan unsur-unsur kebudayaan.

g. Prasangka pada hal-hal baru atau asing.

Prasangka seperti ini umumnya terdapat pada masyarakat yang pernah dijajah oleh bangsa-bangsa asing, mereka menjadi sangat curiga terhadap hal-hal yang datang dari luar sebab memiliki pengalaman pahit sebagai bangsa yang pernah dijajah, umumnya unsur-unsur baru yang masuk berasal dari dunia barat.

h. Adat istiadat.

Adat istiadat atau kebiasaan merupakan pola perilaku anggota masyarakat dalam memenuhi semua kebutuhan pokoknya. Jika kemudian pola-pola perilaku tidak lagi efektif memenuhi kebutuhan pokok, maka akan muncul krisis adat atau kebiasaan, yang mencakup bidang kepercayaan, sistem pencaharian, pembuatan rumah dan cara berpakaian.

3. Teori-teori Tentang Perubahan Sosial

Perubahan sosial biasanya memiliki proses, setiap proses perubahan biasanya ada yang berjalan secara cepat dan ada pula yang berjalan secara lambat. Perubahan dapat terjadi karena terdapat modifikasi terhadap beberapa pola kehidupan dari berbagai kondisi. Kondisi penyebab terjadi perubahan sosial dapat diketahui dengan teori-teori terjadi perubahan sosial. Adapun terkait dengan teori-teori tentang perubahan sosial dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Teori Evolusi

Teori evolusi menjelaskan perubahan sosial memiliki arah tetap dan dialami setiap masyarakat. Arah tetap yang dimaksud adalah perubahan sosial akan terjadi bertahap, mulai dari awal hingga akhir. Saat telah tercapainya perubahan terakhir maka tidak terjadi

perubahan lagi. Teori Evolusi pada dasarnya berpijak dari teori Evolusi yang dipengaruhi dari pemikiran teori Evolusi Herbert Spencer. Sedangkan dalam teori evolusi dalam perubahan sosial terdapat dua tokoh yang paling berpengaruh yaitu Emile Durkheim, dan Ferdinand Tonnies.

Menurut Emile Durkheim, adanya perubahan karena suatu evolusi mempengaruhi pengorganisasian masyarakat, terutama dalam menjalin hubungan kerja. Sedangkan menurut Ferdinand Tonnies, bahwa masyarakat berubah dari yang sebelum masyarakat sederhana yang mempunyai hubungan erat dan komperatif menjadi masyarakat besar yang menjalin hubungan secara terspesialisasi dan impersonal. Kelemahan teori ini, tidak bisa menjelaskan pertanyaan "*Mengapa Masyarakat Berubah*" ? dimana teori ini hanya menjelaskan perubahan yang terjadi.

b. Teori Konflik

Teori Konflik menjelaskan bahwa perubahan sosial dapat berbentuk konflik. Konflik berasal dari pertentangan kelas antara kelompok penguasa dengan kelompok yang masyarakat tertindas sehingga melahirkan perubahan sosial yang mengubah sistem sosial tersebut. Dalam Teori Konflik, tokoh yang berpengaruh adalah Karl Marx dan Ralf Dahrendorf. Menurut Karl Marx, konflik sosial merupakan sumber yang paling penting dan paling berpengaruh terhadap semua perubahan sosial terjadi. Pernyataan Marx kemudian didukung oleh Ralf Dahrendorf, ia menyatakan bahwa setiap perubahan sosial merupakan hasil konflik dalam kelas masyarakat.

c. Teori Fungsionalis

Teori Fungsionalis menjelaskan bahwa perubahan sosial merupakan suatu yang konstan dan tidak memerlukan penjelasan. Oleh karena itu perubahan sosial bisa saja mengacaukan suatu keseimbangan dalam

masyarakat. jadi teori fungsional hanya menerima perubahan yang menguntungkan atau bermanfaat untuk masyarakat, sedangkan bagi perubahan yang tidak bermanfaat tidak akan digunakan.

Dalam Teori Fungsional, tokoh yang berpengaruh adalah William Ogburn. Menurutnya, biarpun unsur-unsur masyarakat saling berkaitan satu sama lain, namun kecepatan dalam perubahan setiap unsur tidaklah sama. Ada unsur yang berubah dengan cepat, ada juga yang perubahannya lambat.

d. Teori Siklus

Dalam teori siklus, perubahan sosial terjadi secara bertahap dengan perubahan yang tidak akan berhenti walau pada tahapan terakhir yang sempurna, tetapi perubahan tersebut akan kembali keawal untuk peralihan ke tahap selanjutnya. Sehingga tergambar sebuah siklus.

Dalam teori siklus, tokoh yang berpengaruh adalah Oswald Spenger dan Arnold Toynbee. Menurut pendapat Oswald bahwa setiap masyarakat berkembang dengan 4 tahap, contohnya adalah pertumbuhan manusia dari masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa ke masa tua. Sedangkan menurut pendapat Arnold Toynbee, perubahan sosial baik itu kemajuan ataupun kemunduran dapat dijelaskan dalam konsep-konsep kemasyarakatan yang berhubungan satu dengan yang lainnya, yaitu tantangan dan tanggapan.

4. Dampak Perubahan Sosial

Perubahan sosial secara otomatis pasti akan membawa dampak bagi kehidupan masyarakat. Dampak perubahan sosial ada yang positif dan adapula yang berdampak negatif. Dampak positif mengarah pada kemajuan dengan menuju terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Hal inilah yang dijadikan harapan oleh masyarakat. Dampak negatif perubahan sosial mengarah pada rusaknya keteraturan sosial, nilai dan norma hingga pada ancaman integrasi.

Berikut ini akan diuraikan mengenai Dampak positif dari berlangsungnya perubahan sosial.

1. Munculnya Nilai dan Norma Baru

Adakalanya suatu nilai dan norma dirasa tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Dengan adanya perubahan sosial diharapkan mampu mendorong munculnya nilai maupun norma baru yang lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

2. Adanya Struktur dan Hubungan Sosial Baru

Struktur dan hubungan sosial baru ini biasanya lebih menekankan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.

3. Adanya Upaya Memberdayakan Perempuan Kesetaraan Gender

Bentuk pemberdayaan perempuan harus diletakkan dalam kerangka gender *related development* yaitu dengan menambah anggaran kesehatan dan pendidikan. Memastikan bahwa perempuan sudah mendapatkan porsi yang layak, terutama terkait dengan peningkatan pelayanan kesehatan dan beasiswa bagi pelajar perempuan.

4. Terjadinya Diferensiasi Struktural

Diferensiasi struktural yaitu berkembangnya lembaga-lembaga sosial baru, sehingga lebih memungkinkan anggota masyarakat untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan yang semakin kompleks. Dengan demikian, diharapkan fungsi pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

5. Munculnya Budaya Ilmiah

Setiap gejala sosial maupun non-sosial dilakukan dengan mengacu pada deskripsi ilmiah. Itulah sebabnya, penelitian penalaran dan observasi harus dilakukan secara tepat agar dapat berfungsi sebagai sarana pencarian pengetahuan ilmiah.

6. Kesadaran Politik Semakin Tinggi

Tingginya kesadaran politik ditandai dengan meningkatnya partisipasi dalam politik praktis. Pendidikan politik mulai menyentuh lapisan bawah masyarakat, sehingga berkembang kesadaran tentang pentingnya penggunaan hak politik.

7. Meningkatnya Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Munculnya penelitian ilmiah semakin menyadarkan manusia terhadap pentingnya penguasaan iptek dengan peningkatan taraf hidupnya.

8. Berkembangnya Industrialisasi

Perkembangan ini memunculkan produktivitas dan nilai tambah yang signifikan, sehingga menyerap banyak tenaga kerja serta meningkatkan peluang ekspor.

9. Terbukanya Peluang Mobilitas

Hambatan untuk melakukan mobilitas sosial kini semakin berkurang. Semakin terbukanya kesempatan untuk mengadakan mobilitas sosial pada semua strata.

10. Perlindungan dan Penghormatan terhadap Kebebasan dalam Beragama

Perlindungan dan penghormatan ini mencakup penanaman cara hidup saling menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman agama yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat yang plural. Dengan demikian diharapkan akan tercipta kerukunan antar umat beragama yang bermuara pada terwujudnya kebebasan beragama secara hakiki.

11. Masyarakat Semakin Menghargai Waktu

Dalam orientasinya ke masa depan, anggota masyarakat berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai aktivitas.

Selain dampak positif perubahan sosial juga menyebabkan adanya dampak negatif. Dampak negatif mengarah pada kemunduran yang ditandai dengan adanya tindak kriminalitas, konflik sosial, deviasi sosial,

serta berbagai masalah sosial lainnya. Hal inilah yang menjadi titik jenuh dari perubahan sosial dalam masyarakat. berikut ini adalah Dampak Negatif dari Perubahan Sosial.

1. Adanya Disorientasi Nilai dan Norma
Norma dan nilai terkadang diabaikan seiring semakin tingginya kebutuhan akan kebebasan maupun independensi dari otoritas tradisional
2. Perubahan Tingkah Laku
Perubahan tingkah laku yang mungkin menjurus pada perilaku menyimpang. Suatu perilaku dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.
3. Budaya Konsumtif yang Semakin Besar
Individu mengonsumsi suatu barang karena dianggap sebagai simbol status.
4. Berkembangnya Sifat Individualisme
Saat ini, masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi, sehingga sering mengesampingkan kepentingan hukum. Hubungan antar manusia bersifat sekunder, serba terbatas pada bidang kehidupan tertentu saja.
5. Munculnya Konflik Sosial Vertikal maupun Horizontal
Konflik dan kekerasan muncul sebagai akibat adanya perbedaan sikap dan kepentingan dalam menghadapi perubahan sosial.
6. Lembaga-Lembaga Sosial yang ada Tidak Dapat Berfungsi Maksimal
Ketidakmampuan lembaga sosial berfungsi secara maksimal dikarenakan adanya konflik antara kelompok pendukung dan penentang perubahan sosial.
7. Tingginya Angka Pengangguran
Di masa industrialisasi seharusnya tercipta banyak peluang usaha dan kesempatan kerja. Namun,

sebagian anggota masyarakat tidak siap untuk menyesuaikan diri dengan pola industrialisasi, sehingga dapat meningkatkan jumlah pengangguran.

8. Adanya Kesenjangan Sosial

Anggota masyarakat yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tentu akan mampu meningkatkan taraf hidupnya. Namun sebaliknya, apabila masyarakat tidak mampu melakukan penyesuaian, maka lama kelamaan akan semakin terbelakang dan mengalami penurunan kualitas hidup. Sehubungan bergulirnya perubahan, semakin lebar pula kesenjangan sosial yang tercipta dalam hubungan antara dua keadaan yang saling bertolak belakang ini.

9. Terjadinya Berbagai Bentuk Kerusakan Lingkungan dan Bencana Alam

Pemanasan global atau *global warming* merupakan sebagai salah satu bentuk kerusakan lingkungan dan bencana alam yang diakibatkan oleh perubahan pola kehidupan masyarakat. Hal ini telah menjadi sorotan masyarakat dunia, terutama negara yang mengalami industrialisasi dan pola konsumtif tinggi.

BAB VII PENYIMPANGAN SOSIAL

A. Pengantar

Dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu mengikuti aturan dan norma untuk memastikan ketenangan dan kedamaian bersama terjaga. Namun, tidak jarang kita menyaksikan perilaku individu yang keluar dari batas-batas norma yang berlaku, menimbulkan keributan dan kerugian bagi orang lain.

Akar masalah yang muncul yang membuat sekelompok orang menjadi menyimpang adalah cara yang dipilih oleh manusia itu sendiri untuk mencapai tujuannya. Setiap individu dalam masyarakat memiliki tujuan dan keinginan yang akan mereka capai demi meraih kepuasan pribadi. Sayangnya, tidak semua individu mematuhi nilai dan norma yang ada saat mereka memenuhi kebutuhannya. Banyak orang merasa bahwa nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, kadang dianggap sebagai pembatasan terhadap kebebasan individu. Faktor yang mendorong sekelompok orang untuk melakukan penyimpangan adalah motif dan motivasi untuk mencapai tujuan dengan cara yang disesuaikan dengan keinginan mereka sendiri, tanpa memperhitungkan nilai dan norma sosial yang berlaku.

Saat ini, tingkat kesadaran bahwa perilaku menyimpang dan tindak kriminal memicu reaksi negatif dari masyarakat, hal itu mencerminkan pentingnya pengakuan setiap individu dalam sebuah komunitas untuk mematuhi etika sosial dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku yang melanggar norma sosial dan menimbulkan reaksi negatif disebut sebagai penyimpangan. Beberapa perilaku dianggap amat riskan, sehingga pemerintah menerapkan undang-undang yang melarangnya. Hal tersebut terjadi karena unsur-unsur masyarakat tidak beroperasi dengan efektif sehingga menghasilkan rasa kecewa dan penderitaan.

Tentang penyimpangan dan kejahatan, penting bagi masyarakat untuk memastikan bahwa anggotanya selalu mematuhi norma sosial dalam kehidupan sehari-hari, mengingat kedua perilaku ini menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat. Meski ada pandangan yang mengatakan bahwa penyimpangan dan ketidaksesuaian ditentukan oleh bagaimana tanggapan masyarakat terhadap perilaku tersebut.

Karenanya, dibutuhkan suatu bentuk kontrol sosial yang mengarah pada upaya masyarakat dalam mencegah dan memberi sanksi terhadap perilaku yang melanggar norma. Teori kontrol sosial ini berasal dari keyakinan bahwa setiap individu dalam kelompok masyarakat memiliki kemungkinan yang sama untuk menjadi "baik" atau "jahat". Sejauh mana seseorang dianggap baik atau buruk sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Dia akan menjadi lebih baik jika masyarakatnya memperlakukannya dengan baik.

Kontrol sosial yang berlangsung di tengah masyarakat begitu istimewa adalah cara untuk mencegah kemungkinan masyarakat menyimpang, serta mengajak mereka untuk berperilaku dan bersikap sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Harapan agar kontrol sosial yang berkualitas dapat membantu mengarahkan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang atau memberontak.

B. Pengertian Penyimpangan Sosial

Penyimpangan sosial adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan norma sosial di lingkungan mereka. Norma tersebut telah disepakati oleh masyarakat atau kelompok. Norma itu sendiri adalah pedoman yang memandu, standar yang dijunjung, prinsip yang dipegang, dan kaidah yang telah diterima serta diamalkan dalam sistem masyarakat yang bertugas untuk mengawasi tingkah laku dalam menjalani rutinitas sehari-hari, agar individu-individu merasakan

kehidupan yang aman dan menyenangkan.⁴⁶ Dalam ilmu sosiologi, norma fokus pada kekuatan aturan umum, baik yang tertulis maupun tak tertulis, mengenai sikap dan perilaku yang dianggap baik atau buruk oleh mayoritas masyarakat, serta yang diperbolehkan dan dianggap tabu.

Dalam penelitian mengenai penyimpangan, terdapat variasi pandangan dalam menetapkan individu, tindakan, atau situasi yang dianggap sebagai perilaku menyimpang. Ada perbedaan pendapat dalam hal contoh-contoh yang umumnya diakui sebagai bentuk-bentuk penyimpangan, seperti kejahatan, bunuh diri, keterbelakangan mental, homoseksualitas, dan alkoholisme. Contohnya, bagi sebagian individu, menganggapnya lumrah untuk menikmati minuman keras atau menggunakan narkoba seperti ganja atau kokain. Bahkan homoseksual dan lesbian di beberapa negara dianggap sebagai hal yang biasa, bukan suatu penyimpangan.

Hal ini dapat diperoleh informasinya dari kajian-kajian sosiologis yang meneliti tentang perilaku yang beragam yang menjadi fokus penelitiannya. Pada mulanya, para ahli di Inggris fokus pada kategori perilaku yang dianggap negatif seperti ketidakjujuran, kecurangan, ketidakadilan, kejahatan, kelicikan, pengkhianatan, suap, korupsi, tenung, dan dosa (Cohen, 1966). Bahkan Davis (1961) meneliti orang berkulit hitam sebagai perilaku yang berbeda dan Schur (1984) berbicara tentang diskriminasi ras dan gender yang dialami oleh perempuan.⁴⁷

Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, menyatakan bahwa tidak ada penyimpangan yang berdiri sendiri. Kondisi penyimpangan ditentukan oleh apa yang disebut sebagai definisi penyimpangan itu sendiri. Penjelasan tentang penyimpangan sangat tergantung pada lokasi penyimpangannya dan situasi sosiokultural serta ideologi politik yang ada di masyarakat. Selain itu, kenyataan sejarah

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo. 2006. *Penemuan Hukum*, Cet. I, (Yogyakarta: Liberty), hal. 11.

⁴⁷ Schur, E.M 19984. *Capling Women Deviant: Gender, Stigma, and Social Control*, New York: Random House, hal. 78.

sebuah kelompok masyarakat juga menentukan definisi dari penyimpangan.⁴⁸

Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan penyimpangan sosial adalah sebagai tindakan, perilaku, atau respons individu yang tidak sejalan dengan norma dan hukum yang berlaku dalam lingkungan sosial mereka. Robert MZ Lawang, seorang sosiolog dari Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa perilaku menyimpang adalah segala tindakan yang melanggar norma-norma yang diterima dalam suatu masyarakat, yang kemudian menuntut campur tangan pihak berwenang dalam rangka memperbaiki perilaku tersebut.

Bruce J. Cohen turut menjelaskan bahwa perilaku yang dianggap tidak sesuai atau menyimpang secara sosial ialah apabila individu tidak dapat beradaptasi dengan norma atau peraturan yang berlaku dalam masyarakat atau kelompoknya. Kartasapoetra, menyatakan bahwa perilaku yang ditunjukkan oleh individu atau kelompok orang, baik dengan kesadaran atau tanpa sadar, yang tidak sesuai dengan norma-norma yang diakui oleh sebagian besar masyarakat disebut sebagai penyimpangan sosial.

Sedangkan menurut penelitian yang disebutkan oleh Paulus Tangdilintin (2007), dalam Robert Merton, dan Naisbitt (1961), untuk melihat perilaku penyimpangan, penting kiranya mempertimbangkan bahwa masalah sosial bisa muncul akibat dari tindakan yang tidak biasa, dan bahwa nilai-nilai sosial seseorang dapat berkaitan dengan kedudukannya dalam masyarakat. Hal ini menentukan apakah perilaku yang dilakukan seseorang dianggap menyimpang atau tidak, sangat bergantung pada status sosial individu tersebut. Perilaku yang menyimpang bukanlah sesuatu yang abstrak, melainkan terkait dengan aturan kebiasaan yang telah diakui secara sosial,

⁴⁸ Horton, P. B & Hunt, C. L. 1991. *Sosiologi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga), hal. 8.

diterima, dan dianggap sebagai kewajiban moral bagi individu dengan tingkatan tertentu.⁴⁹

Masrhall B. Clinard dan Robert F. Meier telah menjelaskan bahwa perilaku yang dianggap menyimpang dalam masyarakat bisa dipahami dengan bantuan empat sudut pandang yang berbeda, yaitu: statistik, absolutisme, reaktivis, dan normatif. Sudut pandang ini diperincikan dalam buku mereka yang bertajuk *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* yang telah diterbitkan pada tahun 2004.

a) Statistik

Sudut pandang statistik menyebutkan bahwa perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial sebagai perilaku yang tidak biasa dibandingkan dengan yang umumnya dilakukan orang. Dilihat dari statistik, perilaku yang menyimpang bukanlah hal yang umum terjadi. Pandangan ini berasumsi bahwa semua perilaku adalah benar. Penyimpangan bukan terkait dengan konsep benar atau salah, baik atau buruk, melainkan lebih berfokus pada kecenderungan pada angka statistik semata. Penyimpangan tidak selalu memiliki makna negatif secara moral, melainkan sebuah tindakan yang terjadi secara jarang.

b) Absolutisme

Dalam pandangan Absolutisme, penyimpangan ialah tindakan yang tidak sejalan dengan norma dan peraturan dalam masyarakat atau kumpulan tertentu. Absolutisme yakin bahwa masyarakat telah mencapai kesepakatan atas norma yang jelas sebagai pedoman dalam berperilaku yang umumnya diterima. Karena adanya peraturan tersebut, mereka semua sepakat untuk menetapkan definisi mengenai perilaku yang dianggap tidak sesuai. Mereka berpandangan bahwa penyimpangan adalah suatu kondisi yang terkait dengan masalah kesehatan, seperti kanker, kejahatan, masalah psikologis, perilaku bunuh diri, dan ketergantungan pada obat-obatan terlarang, di mana ini dianggap sebagai

⁴⁹ Merton, Robert K. 1967. *Social Theory and Social Structure*, (New York: The Free Press), hal. 70.

suatu kondisi yang menunjukkan kesulitan individu dalam beradaptasi.

Pandangan absolutisme ini sedikit memperhatikan aspek-aspek sosial dalam perkembangan individu. Perspektif ini mengabaikan dampak dari variasi norma budaya serta subkebudayaan individu. Bagi mereka yang sangat teguh pendiriannya (absolutis), orang yang menyimpang akan tetap dianggap sebagai orang yang menyimpang. Mereka melupakan perihwal peluang bagi potensi individu untuk berkembang menjadi diri yang seutuhnya.

c) Reaktifis

Menurut para reaktifis, perilaku yang dianggap menyimpang dipandang sebagai hasil dari tindakan individu yang menimbulkan reaksi dari masyarakat sekitarnya. Mereka yakin bahwa apakah sesuatu dianggap menyimpang atau tidak bergantung pada respons masyarakat terhadap perilaku itu. Para reaktifis berusaha mengartikan penyimpangan sosial sebagai perilaku atau keadaan yang dianggap aneh oleh orang lain dalam hubungan antara individu yang menyimpang dengan masyarakat, dan hal tersebut merupakan hasil dari interaksi yang terjalin di antara mereka. Penyimpang ialah cap yang diberikan kepada seseorang. Maka perilaku menyimpang adalah perilaku yang diberi label oleh orang lain sebagai perilaku yang tidak sesuai.⁵⁰

d) Normatif

Dalam prespektif normatif menganggap perilaku yang menyimpang adalah sebagai tindakan yang dilakukan seseorang karena melanggar norma atau aturan masyarakat. Norma telah menjadi panduan tentang apa yang dianggap dapat atau tidak dapat dipikirkan, dikatakan, atau dilakukan dalam situasi tertentu.

⁵⁰ Becker, H.S. 1996. Outsiders. In E. Rubington, & M. S. Weinberg, Deviance: The Interactionist Perspective (pp. 10-13). Needham Heights, MA: Allyn and Bacon.

Norma memberikan dasar untuk menanggapi penyimpangan. Namun, hanya melalui respons masyarakat bahwa norma-norma ditampilkan dan penyimpangan diidentifikasi. Norma tidak selalu mengontrol, sebab ia menjadi milik bersama yang dimiliki oleh setiap individu dalam masyarakat. Inti dari definisi normatif ini adalah tentang norma. Jadi, para normatilis menganggap perilaku yang tidak sesuai dengan norma sebagai penyimpangan yang tidak boleh dilakukan, dan jika diketahui melakukan, akan dikenai sanksi negatif.

Dari segi sosiologi, kajian mengenai perilaku menyimpang atau perilaku yang tidak mengikuti norma dikategorikan sebagai topik yang menarik, penting, dan relevan. Penyebabnya adalah karena studi ini mengalami kemajuan dalam pemikiran tentang fenomena sosial, yang kemudian menjadi suatu bidang studi yang akan menghasilkan periode studi baru. Sebagai kajian yang penting, perilaku menyimpang merujuk pada tindakan yang dianggap telah melewati batas norma yang berlaku yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang menandakan kesan terhadapnya. Meskipun mustahil bagi setiap anggota masyarakat untuk mematuhi semua norma sosial yang ada, tapi ketika satu individu berperilaku menyimpang, hal tersebut dapat merusak reputasi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan, sehingga kontrol sosial yang berfungsi akan terbukti efektif.

C. Bentuk Penyimpangan Sosial dan Contohnya

Dalam ilmu sosiologi, para ahli mengklasifikasikan perilaku yang dianggap tidak sesuai atau menyimpang terbagi menjadi dua jenis berdasarkan karakteristik (sifat) dan perilakunya, yaitu penyimpangan positif dan penyimpangan negatif. Berikut ini adalah penjelasan mengenai bentuk penyimpangan sosial.

1. Penyimpangan berdasarkan sifat

a. Penyimpangan positif

Penyimpangan positif dipelajari dalam ilmu sosiologi guna memahami perilaku masyarakat yang berbeda dari norma. Masyarakat diberi pelajaran untuk melaksanakan tindakan positif dengan cara yang positif juga. Terkadang, situasi tidak begitu memungkinkan, jadi seseorang mungkin memilih untuk melakukan tindakan dengan niat yang baik tapi tanpa memperhatikan metodenya. Seringkali orang-orang menilai perilaku orang lain terlalu cepat dari tindakannya, tanpa memberi kelonggaran pada orang tersebut untuk memberikan penjelasan. Oleh sebab itu, penting bagi masyarakat untuk memahami mengenai keberadaan konsep penyimpangan positif.

Penyimpangan yang bersifat positif ialah bentuk ketidakpatuhan yang memiliki dampak positif pada struktur sosial karena mengusung elemen-elemen inovatif, kreatif, serta memperluas pemahaman individu. Pada umumnya, penyimpangan semacam ini diterima oleh masyarakat karena sejalan dengan perubahan zaman. Sebagai contoh, emansipasi wanita telah membawa kemajuan bagi peran wanita dalam masyarakat, termasuk dalam bidang karir.⁵¹

Kebanyakan penyimpangan positif selalu dapat diterima oleh masyarakat, meskipun mereka mungkin merasa heran melihat perilaku tersebut karena dianggap tak lazim atau tak biasa. Malahan dalam banyak keadaan, penyimpangan itu tidak sinkron dengan norma sosial atau aturan yang berlaku pada umumnya. Walaupun begitu, ada kalanya, penyimpangan positif mampu menjadi sumber motivasi bagi masyarakat dalam mempromosikan perubahan positif atau meningkatkan kondisi sosial yang kurang memuaskan. Seiring itu, hal

⁵¹ Julyati Hisyam. 2015. *Sosiologi Perilaku Menyimpang*, (Jakarta: LPPS Press Universitas Negeri Jakarta), hal. 1-2.

tersebut juga membantu masyarakat untuk memunculkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam menemukan solusi terhadap masalah sosial yang dihadapi.

Di bawah ini adalah contoh penyimpangan positif:

- Seseorang yang awalnya berasal dari keluarga yang kurang mampu telah berhasil mencapai kesuksesan dan memiliki dampak yang besar dalam masyarakat.
- Saat berjuang meraih kemerdekaan, pejuang Indonesia melanggar hukum penjajah Belanda dengan berjuang gigih. Walaupun bertentangan dengan hukum, tindakan mereka memberikan kemerdekaan bagi Indonesia.
- Perempuan menjalani profesi sebagai sopir ojek online.
- Perempuan bergelut dalam dunia olahraga angkat besi.
- Ibu yang mencari nafkah sampai ke luar negeri.
- Perempuan masuk ke angkatan bersenjata baik Polri maupun TNI.
- Berada di rumah namun tetap berkekayaan, contohnya dengan bekerja dari jauh dalam bidang digital.
- Anak seorang pengemudi becak berhasil mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi ke luar negeri.
- Seseorang yang memiliki kekurangan fisik berhasil meraih gelar sebagai juara atlet dunia.
- Dan lain sebagainya.

Sebuah perilaku tidak akan dinilai sebagai sesuatu yang menyimpang ke arah positif jika masyarakat sudah terbiasa dengan varian dan berpikiran positif. Dalam berbagai bidang kehidupan, terkadang perlu melangkah keluar dari zona nyaman atau kebiasaan yang sudah terbiasa agar tetap bisa berubah atau memberikan dukungan kepada sesama.

b. Penyimpangan negatif

Penyimpangan negatif merujuk pada perilaku yang berdampak negatif pada kehidupan sosial. Tindakan-tindakan ini dapat membuat sistem komunitas merosot, terutama ketika melibatkan tindakan-tindakan merugikan seperti pencurian, perampokan, pengrusakan, penganiayaan, bullying, dan tindak kejahatan serius lainnya seperti pemerkosaan. Penyimpangan negatif seperti ini tidak bisa dinegosiasi karena sangat merugikan orang lain.

Menurut Ilmawati Fahmi Imron dan Kukuh Andri Aka dalam buku *Fenomena Sosial* (2018), berikut adalah definisi dari penyimpangan sosial yang bersifat negatif: "Penyimpangan sosial negatif adalah tindakan yang dianggap rendah, melanggar norma sosial, dan dikecam oleh masyarakat." Penyimpangan jenis ini dapat menimbulkan dampak negatif yang merugikan masyarakat, termasuk pelakunya sendiri. Berikut adalah contoh penyimpangan negatif yang terjadi dalam masyarakat, yaitu:

1. Pencurian

Pencurian adalah bentuk penyimpangan negatif yang sangat merugikan korbannya, karena mengambil barangnya tanpa diketahui pemiliknya. Dan jika seseorang tertangkap sedang mencuri, ia berisiko berhadapan dengan kemarahan warga, akan dilaporkan kepada pihak berwajib, dan terancam hukuman penjara yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

2. Pembunuhan

Tindakan yang dilakukan adalah merampas nyawa seseorang yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik sengaja dengan spontan atau dengan pembunuhan berencana.

3. Perampasan

Melakukan perampasan barang atau harta orang lain dengan cara menjembret atau merampok yang jelas-jelas merugikan korbannya secara signifikan.

4. Narkoba

Mengonsumsi narkoba merupakan tindakan negatif yang dilakukan oleh sekelompok orang maupun individu. Saat seseorang mulai mengonsumsi narkoba, ada potensi untuk terjadi ketergantungan dan meningkatnya kemungkinan keterlibatan dalam tindak kejahatan yang lebih besar.

5. Korupsi

Korupsi merupakan perbuatan melanggar hukum yang ditujukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau mengakibatkan kerugian bagi negara atau ekonomi negara. Tindak pidana korupsi berdampak negatif pada berbagai segi kehidupan masyarakat dan negara.

Penyimpangan negatif juga dapat diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan sifatnya, yaitu penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer merujuk pada perilaku menyimpang yang dilakukan untuk pertama kalinya oleh seseorang. Sedangkan pelanggaran sekunder merupakan tindakan menyimpang yang terjadi sebagai pengulangan dari perilaku menyimpang sebelumnya.⁵²

Pertama, penyimpangan primer merupakan bentuk perilaku yang keluar dari norma. Tindakan-tindakan ini hanya bersifat sesaat dan tidak berulang-ulang sehingga masih dapat diterima oleh masyarakat, misalnya melanggar peraturan lalu lintas, membuang sampah tidak pada tempatnya, dan lain sebagainya. Penyimpangan

⁵² Sunarto, Kamanto. 2007. *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*, Cet. I, (Jakarta: Erlangga), hal. 157.

primer timbul dari berbagai sumber sosiokultural dan psikologi yang beragam.

Namun, pada poin ini, orang yang melakukan pelanggaran sering mencoba untuk membuat perilakunya tampak masuk akal sebagai sebuah kesalahan yang sementara atau melihatnya sebagai sesuatu yang biasa dalam peran sosial yang dijalani. Pelaku pelanggaran tidak merasa sebagai seseorang yang berbuat penyimpangan atau tidak mengarahkan kehidupannya sesuai dengan identitas yang ada.⁵³ Sebagai contoh, seorang siswa terlambat masuk ke sekolah karena ban sepedanya bocor tak terduga, sehingga memperlambat di dalam perjalanannya. Contoh lainnya, ketika seseorang mengendarai sepeda motor dan melanggar peraturan lalu lintas tanpa disengaja.

Kedua, penyimpangan sekunder, yaitu perilaku yang secara nyata kerap terjadi dan cenderung memberikan dampak yang cukup parah, serta mengganggu orang lain. Hal ini muncul ketika orang lain merespon tindakan yang pertama. Respons masyarakat semakin kuat secara berangsur-angsur terhadap setiap perlakuan penyimpangan, individu yang melakukan penyimpangan mulai kehilangan label negatif melalui penamaan, stereotaip atau stigmatisasi.⁵⁴ Sumber awal dari penyimpangan tidak lagi menonjol ketika reaksi orang lain lebih mengarah ke kehidupan seseorang dan menuntut penanganan. Seringkali para pelanggar menyelesaikan masalah ini dengan mengambil 'status menyimpang' itu sebagai cara untuk menata kehidupan mereka dan membangun identitas mereka seputar fakta penyimpangan tersebut.

Penyimpangan ini tidak bisa ditoleransi karena bertentangan dengan norma atau aturan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 di

⁵³ Lemert, E.M. 1951. *Social Pathology*, (New York: Mc Graw-Hill), hal. 75.

⁵⁴ Lemert, E.M. *Ibid*, hal. 76-77.

Indonesia. Seperti contoh sebelumnya, yakni mencakup keadaan di mana seseorang sering minum minuman beralkohol dan kemudian pulang dengan kendaraan pribadi, yang kemudian berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas di mana dapat membahayakan dirinya sendiri dan lainnya yang mungkin terkena dampak negatifnya.

Menurut konsep Teori Labeling yang jelaskan Edwin Lemert, ketika seseorang terlibat dalam penyimpangan primer (penyimpangan pertama), sehingga membuatnya dilabeli sebagai penyimpang primer, pada akhirnya ia melakukan penyimpangan sekunder (penyimpangan terus menerus), yakni melakukan tindakan penyimpangan yang lebih serius.

2. Penyimpangan berdasarkan perilaku

Ada tiga jenis bentuk penyimpangan berdasarkan pelakunya, yaitu:

a. Penyimpangan individual (individual deviation)

Adalah tindakan menyimpang yang umumnya dilakukan oleh satu individu yang tidak mengikuti nilai dan norma yang berlaku di lingkungan tersebut. Sebagai contoh dari perilaku penyimpangan individu adalah ketika seorang siswa di sekolah melakukan kecurangan selama ujian, entah itu dengan menyontek dari temannya atau dengan cara membuat contekan sendiri.

Selain itu, penyimpangan individu berdasarkan kadar penyimpangannya dibagi menjadi lima, yaitu⁵⁵ : Pertama, Pembandel, yakni mengabaikan diri dari saran orang tua untuk memperbaiki sikapnya yang kurang baik. Kedua, Pembangkang, yaitu penyimpangan yang terjadi ketika seseorang tidak mengindahkan peringatan dari orang lain. Ketiga, Pelanggar, yaitu penyimpangan saat melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang umumnya diikuti. Misalnya orang yang

⁵⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku_menyimpang

melanggar rambu-rambu lalu lintas pada saat di jalan raya. Keempat, Perusuh atau penjahat, yaitu sosok yang menimbulkan kerugian baik pada harta benda maupun jiwa. Seperti pencuri, penjambret, penodong dan lainnya. Kelima, Munafik, yaitu perilaku yang keluar dari kebenaran seperti tidak memenuhi janji, mengutarakan kebohongan, mengkhianati, dan berpura-pura.

b. Penyimpangan kelompok (*group deviation*)

Penyimpangan kelompok adalah tindakan yang terjadi saat sekelompok orang tidak bisa mengikuti nilai dan norma yang berlaku di lingkungan mereka, seringkali dipengaruhi oleh perasan dan dorongan bersama. Kelompok yang menyimpang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti protes dan pergerakan pengacauan. Penyimpangan ini biasanya memberikan dampak yang signifikan dan meluas terhadap lingkungan. Contohnya, sekelompok orang membawa masuk narkoba atau obat terlarang lainnya untuk diperjual belikan.

Tim Ganesha Opration (2014: 62), menjelaskan bahwa penyimpangan kelompok adalah tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang melanggar nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Penyimpangan itu berlaku disebabkan oleh dominasi sub kebudayaan yang melanggar norma di dalam kumpulan tersebut. Umumnya, anggota kelompok cenderung mematuhi pada norma yang berseberangan dengan norma yang diikuti oleh masyarakat. Kelompok penyimpang umumnya telah terstruktur dengan baik dan menggunakan strategi yang hati-hati, sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk melacak atau mengungkap kejahatan mereka.

Aktivitas kolektif yang tidak sejalan dengan nilai-nilai sosial kerap menimbulkan berbagai konflik dalam dinamika kehidupan bersama. Di bawah ini adalah

contoh perilaku penyimpangan kelompok yang perlu diketahui⁵⁶ :

A. Mafia

Sebagai contoh pertama penyimpangan kelompok adalah golongan mafia. Kelompok ini adalah sebuah gejala rahasia yang melakukan kegiatan dan melaksanakan tugas kriminal. Mafia juga dikenal sebagai perkumpulan kriminal.

B. Pengedar

UU No. 35 tahun 2009 telah menegaskan mengenai penyalahgunaan narkotika, dimana dijelaskan bahwa terdapat dua klasifikasi tindak kriminal terkait narkoba. Yakni, kelompok yang terkait dengan penyelundupan dan penyalahgunaan.

C. Kawan Pencopet

Kawan pencopet adalah salah satu bentuk penyimpangan yang sering terjadi. Menyerobot hak orang lain demi kepentingan sendiri, baik diketahui maupun tidak. Masalah ini masih berlanjut hingga saat ini.

D. Pengguna narkoba

Mereka yang menggunakan narkoba bisa dianggap sebagai contoh penyimpangan kelompok jika dilakukan secara bersama-sama. Dalam situasi tertentu, penggunaan narkoba bisa dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan dorongan dari teman. Pengguna narkoba dan pengedar dikenai sanksi hukum pidana. Bagi pengguna, hukuman penjara ringan sedangkan bagi pengedar hukuman penjara berat bahkan diancam hukuman mati.

E. Geng begal motor

Umumnya, pelaku begal tidak hanya melibatkan satu individu. Dengan beberapa individu yang tergabung, kelompok begal akan merancang

⁵⁶ Riyana. 2023. 7 Contoh Penyimpangan Kelompok Lengkap dengan Pengertian, (Sumber: <https://kumparan.com/>) Diakses 19 November 2024.

strategi terlebih dahulu sebelum melaksanakan aksinya. Ini tentu saja merugikan pihak korban. Terlebih lagi bukan hanya hartanya yang dirampas, tapi juga merampasa nyawanya.

F. Teroris

Teorisme bukan sekedar sebagai contoh kelompok yang menyimpang. Isu global itu telah meluas serta memberikan dampak yang besar bagi seluruh dunia. Tindakan teror telah mengakibatkan ketidaknyamanan bagi masyarakat.

G. Tawuran kelompok remaja

Pertikaian antar kelompok pelajar dalam tawuran sering kali dianggap sebagai perilaku yang menyimpang, karena melanggar norma dan nilai-nilai yang mendorong hidup rukun.

c. **Penyimpangan campuran (*combined deviation*)**

Penyimpangan seperti itu seringkali dilakukan oleh kelompok sosial tertentu yang terstruktur dengan baik, sehingga anggotanya cenderung patuh dan menghormati norma internal kelompok, sementara mengesampingkan norma yang berlaku di masyarakat umum. Contohnya, ada remaja yang putus sekolah dan pengangguran yang merasa frustrasi dengan kehidupan masyarakat. Mereka kemudian dipimpin oleh seorang ketua dan membentuk kelompok dalam sebuah organisasi rahasia yang menyimpang dari aturan umum (*geng*). Contoh lainnya, yaitu kelompok organisasi atau sekte yang tersesat dengan pemikiran yang menyimpang. Ini melibatkan kesadaran individu serta doktrin kelompok atau organisasi tersebut. Tentu saja, keberadaan ini membuat resah dan mengganggu masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

D. Faktor Penyebab Penyimpangan Sosial

Saat hidup bersama masyarakat, tiap orang harus memperhatikan tindakannya. Segala tindakan harus selaras

dengan norma yang dihormati dan terikat pada nilai atau peraturan yang dianggap positif oleh masyarakat. Meski begitu, tetap ada orang yang berperilaku di luar norma. Perilaku semacam itu sebenarnya tidak terjadi tanpa sebab. Namun, ada faktor atau situasi yang memicunya.

Penyimpangan sosial ialah sikap yang tidak sejalan dengan norma serta nilai yang berlaku dalam masyarakat. Tindakan negatif ini telah terjadi sejak zaman dahulu dan terus berlanjut hingga kini. Penyimpangan moral dan etika akan berpotensi menimbulkan kerusakan. Hal ini disebabkan oleh faktor penyebab yang berasal dari faktor internal seperti tingkat kecerdasan, kurangnya kepekaan terhadap perasaan, kesulitan dalam mengontrol dorongan, hasil belajar yang kurang memuaskan, serta kelemahan dalam membentuk kepribadian. Kemudian faktor eksternal, meliputi hal-hal tentang kehidupan keluarga, pergaulan, pendidikan, dan media massa.⁵⁷

Berikut adalah beberapa faktor umum yang menjadikan penyebab penyimpangan sosial:

1. Perubahan nilai dan norma sosial

Semakin berkembangnya zaman, terkadang ada kelompok masyarakat yang tidak mampu mengikuti perkembangan zaman, sehingga nilai atau norma yang mereka anut berbeda dari yang lain dan sering dianggap sebagai perilaku menyimpang. Contohnya, ada orang-orang yang semakin banyak mengungkapkan pendapat mereka tentang emansipasi wanita, namun tetap ada kelompok yang tidak sependapat. Sehingga kelompok yang semula mendominasi, namun seiring berjalannya waktu, mereka menjadi minoritas dan dianggap sebagai kelompok yang menyimpang.

2. Proses sosialisasi yang tidak sempurna

Adalah penyimpangan yang dialami seseorang karena kurangnya pengetahuan atau pengalaman dalam memahami norma-norma yang benar dan positif. Misalnya, ketika

⁵⁷ Nandang Burhanudin. 2011. *Al-Qur'an Mushaf al-Burhan Edisi Tajwid*, (Bandung: Media Fitrah Rabbani), hal. 123.

seorang anak tidak diberi arahan yang jelas oleh orang tua mereka tentang perilaku yang benar dan yang sebaiknya dihindari.

Keluarga memegang peranan penting sebagai agen utama dalam proses sosialisasi yang dapat memengaruhi perkembangan sikap anak. Oleh karena itu, ketika anak tidak memiliki pemahaman yang kuat terhadap nilai atau norma yang diterapkan, maka nilai-nilai-nilai yang menyimpang dapat dengan mudah tertanam dalam dirinya karena kurangnya informasi yang diberikan.

3. Teori *Labelling*

Teori ini dikemukakan oleh Edwin M. Lemert (1912:12), dalam teori ini dijelaskan bagaimana seseorang dianggap menyimpang ketika mereka telah diberi label terlebih dahulu oleh orang-orang di sekitarnya. Misalnya, di tengah masyarakat terdapat persepsi negatif bahwa individu dengan tato dianggap memiliki sifat buruk, walau sebenarnya hal tersebut tidak selalu benar. Akibatnya, karena adanya stigma semacam itu, segala tindakan individu tersebut dianggap negatif, sehingga menyebabkan dirinya kurang memperhatikan nilai dan norma yang berlaku, sebab apa pun yang dilakukannya selalu dianggap buruk.

4. Teori *Anomie*

Adalah teori yang menerangkan tentang kemungkinan adanya penyimpangan ketika individu atau kelompok tidak memiliki nilai dan norma yang dianut dan dijadikan panduan dalam kehidupan di lingkungan sosial, sehingga ada potensi perilaku yang menyimpang atau menyimpang sosial.

Sebagai contohnya, seseorang yang berpindah dari satu tempat ke lokasi yang lain. Di tempat lama, terdapat peraturan yang jelas terkait jam pulang malam. Namun, di lingkungan baru tersebut, aturan serupa tidak diterapkan. Hal ini dapat menyebabkan seseorang tidak mengerti akan batasan yang membuatnya melakukan penyimpangan sosial.

5. Teori Differential Association

Merupakan pandangan yang menjelaskan tentang bagaimana seseorang dapat terdorong untuk melakukan perilaku menyimpang ketika ia terus menerus bersosialisasi dengan seseorang yang memiliki kecenderungan serupa. Contohnya, saat seorang yang konsisten datang ke sekolah pada waktunya melakukan interaksi dengan teman sekelas yang sering bolos dengan berbagai alasan. Hal tersebut berpotensi mengubah pandangan siswa yang biasa rajin dan menganggap bolos sebagai perilaku negatif, menjadi mulai mempertimbangkan bahwa bolos sekolah itu tidak selalu buruk sesuai dengan sudut pandangnya.

Selain itu, ada tiga elemen yang menyebabkan tindakan menyimpang atau perilaku yang menyimpang menurut Casare Lombroso, yang merupakan seorang kriminolog Italia dan pencetus Mazhab Kriminologi Positivita Italia, yaitu faktor biologis, psikologis, dan sosiologis. Penjelasan untuk ketiga faktor yang menyebabkan perilaku menyimpang adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Biologis ini menjelaskan tentang seseorang yang memiliki sifat sebagai penjahat sejak lahir. Menurut Casare Lombroso, ada tanda-tanda khusus yang bisa menandai apakah seseorang akan menjadi penjahat berdasarkan ciri fisik mereka. Fisik yang dimaksud adalah bagaimana bentuk muka seseorang, cara kedua alisnya bertemu, dan aspek lainnya yang berkaitan.
- b. Faktor Psikologi seringkali memainkan peran yang signifikan dalam perilaku penyimpangan sosial, sebab cenderung terkait erat dengan karakter individu. Perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kepribadian yang retak atau cenderung melakukan perilaku menyimpang, serta dampak dari trauma yang dialami.
- c. Faktor Sosiologi menyatakan bahwa perilaku menyimpang seseorang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam bersosialisasi dengan kelompok

yang kurang sesuai. Di mana seseorang yang telah terlibat dalam perilaku menyimpang akan menghadapi kesulitan dalam perubahan, karena kurangnya norma yang diterapkan dalam masyarakat. Ia perlu belajar kembali cara menghindari perilaku menyimpang.

E. Dampak Penyimpangan Sosial

Setiap tindakan melanggar akan membawa akibat, baik akibat positif maupun negatif, yang dapat memengaruhi situasi secara keseluruhan. Hal yang sama juga berlaku untuk penyimpangan sosial, di mana perilaku semacam itu dapat menyebabkan dampak yang dirasakan di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Dengan perilaku yang melanggar norma-norma dalam sistem sosial, akan timbul perubahan di sekitarnya.

Perilaku menyimpang dapat memiliki konsekuensi negatif, baik bagi individu maupun komunitas secara menyeluruh. Beberapa konsekuensi dari perilaku menyimpang, antara lain:⁵⁸

1. Dampak terhadap individu

- Pengucilan sosial

Pengucilan sosial sering kali dialami oleh individu yang melakukan penyimpangan sosial. Sebagai contoh, mereka yang melakukan kejahatan biasanya menerima hukuman dan dipisahkan dari masyarakat sekitarnya.

- Gangguan kejiwaan

Gangguan kejiwaan dapat terjadi pada pelaku penyimpangan sosial karena tekanan sosial yang mereka akibatkan penolakan dari masyarakat.

- Rasa bersalah

Walaupun melakukan perilaku yang tidak menyimpang, seseorang masih memiliki kesadaran dan

⁵⁸ Muallif. 2024. Penyimpangan Sosial: Penyebab, Bentuk, dan Dampaknya, Universitas Islam An-Nur Lampung, (Sumber: <https://an-nur.ac.id/>) Diakses 18 November 2024.

nurani yang pada akhirnya dapat menghasilkan perasaan menyesal.

2. Dampak terhadap masyarakat

- **Kriminalitas**

Penyimpangan sosial bisa mengakibatkan lonjakan kejahatan di kalangan masyarakat. Contohnya, kelompok kriminal yang terus makin besar bisa mengancam kedaiamian masyarakat.

- **Terganggunya stabilitas sosial**

Penyimpangan sosial berpotensi mengganggu keseimbangan sosial yang telah terbentuk, peningkatan kemungkinan konflik, dan ketidakstabilan di antara anggota masyarakat.

F. Cara Mencegah Penyimpangan Sosial

Agar dapat mencegah serta menangani penyimpangan sosial, diperlukan tindakan yang terarah baik dari tingkat individu maupun sebagai komunitas. Merujuk pada buku karya M. Noor Syaid, *Penyimpangan Sosial dan Pencegahannya*, dijelaskan ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah penyimpangan sosial, di antaranya:

1. Memupuk nilai dan norma yang kukuh

Sosialisasi yang efektif dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat sangatlah diperlukan dalam membentuk nilai dan norma yang kuat pada setiap individu. Oleh karena itu, mereka akan memiliki arahan moral yang kuat dalam bertindak.

2. Penerapan aturan secara konsisten

Pentingnya tetap memiliki konsistensi dalam menegakkan aturan agar mengurangi peluang terjadinya penyimpangan sosial. Ketidakadilan atau kelonggaran saat menerapkan peraturan hanya akan mendorong terjadinya lebih banyak pelanggaran.

3. Hukuman yang Maksimal

Pemberian sanksi yang tepat dan tegas kepada individu yang melakukan tindakan negatif akan memberikan pelajaran berharga, baik bagi orang tersebut maupun masyarakat secara umum.

4. Penyuluhan dan pendidikan

Kegiatan penyuluhan yang berkelanjutan tentang arti pentingnya mematuhi norma sosial dan menjauhi perilaku yang tidak benar harus tetap dijalankan. Pendidikan yang bermutu membantu individu dalam membentuk kepribadian sesuai dengan nilai dan norma sosial.

BAB VIII PENGENDALIAN SOSIAL

A. Pengantar

Idealnya, dalam tatanan kehidupan, baik berkeluarga maupun bermasyarakat, kita berharap ada keharmonisan dan terhindar dari penyimpangan. Namun, dalam masyarakat yang majemuk, seringkali kita tidak dapat mencegah terjadinya berbagai bentuk perilaku menyimpang.

Di masyarakat terdapat larangan yang berbeda-beda, tentunya tidak hanya berupa rambu-rambu dan hal-hal sederhana seperti dalam kehidupan lalu lintas di jalan raya. Rambu-rambu yang telah ada dalam masyarakat diperlukan agar kehidupan sehari-hari masyarakat dapat berlangsung secara tertib dan aman. Rambu-rambu yang ada dalam masyarakat dapat berupa norma, nilai, aturan, hukum, aturan informal, dan lain-lain. Semuanya mempunyai tujuan yang sama yaitu mengatur dan membimbing tingkah laku dan hubungan antar anggota masyarakat agar tidak saling merugikan atau menyimpang dari kesepakatan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, upaya pengendalian sosial diperlukan untuk menciptakan ketertiban dan keharmonisan dalam kehidupan manusia. Pengendalian sosial merupakan suatu cara dan proses, baik terencana maupun tidak terencana, dari upaya manusia untuk mengendalikan individu, kelompok atau masyarakat agar berperilaku harmonis atau sesuai dengan standar dan nilai-nilai yang diterapkan. Kontrol sosial bertujuan untuk menjamin nilai dan norma sosial dapat dilaksanakan oleh masyarakat sehingga tercipta suasana aman, nyaman, tertib, dan tenteram dalam masyarakat.

B. Pengertian dan Tujuan Pengendalian Sosial

1. Definisi Pengendalian Sosial

Menurut Soerjono Soekanto , pengendalian sosial adalah suatu proses, baik terencana maupun tidak terencana, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa anggota masyarakat untuk mematuhi nilai dan aturan yang ada. Peter L. Berger mengungkapkan pengendalian sosial merujuk pada beragam metode yang digunakan oleh masyarakat untuk menegakkan ketaatan di antara anggotanya yang melakukan perilaku menyimpang. Sedangkan menurut Joseph S. Roucek, pengendalian sosial diartikan sebagai suatu proses, baik yang terencana maupun tidak terencana, yang bersifat mendidik, mengajak bahkan mewajibkan anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan sosial yang berlaku.



Pengendalian Preventif : Kementerian Hukum dan HAM RI melalui BPHN bekerja sama dengan LBH Manggarai Raya-NTT menyelenggarakan penyuluhan hukum bagi siswa dan siswa SMA di Manggarai Timur, NTT (Sumber: Kompas. Com)

Selanjutnya, Bruce J. Cohen menjelaskan bahwa pengendalian sosial merupakan strategi yang digunakan untuk mengarahkan individu agar berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Sementara Z. Lawang mengemukakan bahwa pengendalian sosial adalah

berbagai cara yang digunakan oleh masyarakat untuk membimbing individu yang melakukan pelanggaran kembali ke norma atau kepada keadaan yang seharusnya.

Perilaku masyarakat sendiri adalah objek yang menjadi sasaran dalam pengendalian sosial. Maksud pengawasan ialah untuk memastikan kehidupan masyarakat terus berjalan mengikuti corak dan tata tertib yang telah disepakati bersama. Dengan kata lain, pengendalian sosial berpusat pada serangkaian proses sosial yang terjadi baik secara terencana maupun spontan untuk mengarahkan individu.

Pengendalian sosial sebenarnya adalah sistem dan proses yang bertujuan untuk mendidik, mengajak, dan kadang-kadang memaksa anggota masyarakat agar berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial. Sistem pendidikan bertujuan menciptakan perubahan sikap dan tingkah laku individu agar sesuai dengan norma-norma. Sistem mengajak untuk bertindak berdasarkan norma-norma, dan bukan atas kehendak pribadi. Dan sistem memaksa ditujukan untuk memberikan pengaruh yang kuat agar individu patuh pada norma-norma yang berlaku. Jika seseorang tidak patuh pada kaidah atau norma, maka akan ada sanksi yang dikenakan padanya.

2. Tujuan Pengendalian Sosial

Dengan menanamkan nilai dan norma yang baik, orang akan terdorong untuk menghindari perilaku negatif yang bisa membahayakan dirinya dan orang lain. Selain itu, dengan menciptakan ketentraman dan harmoni dalam kehidupan bersama di masyarakat, serta meningkatkan kesadaran individu terhadap hal ini, maka akan mengurangi potensi terjadinya perilaku menyimpang dan pada akhirnya akan membawa ketenteraman dalam lingkungan tersebut.

Lebih lanjut, tujuan pengendalian sosial memungkinkan pelaku untuk menyadari kesalahan yang telah dilakukannya dan membuka diri untuk memperbaiki

perilaku dan sikapnya terhadap orang lain. Dan juga membuat pelaku penyimpangan sosial sadar akan pentingnya mematuhi nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat mereka. Terakhir, menyebarkan pengertian serta menanamkan nilai dan norma dalam masyarakat, baik melalui kesadaran diri maupun pengaruh dari berbagai faktor.

C. Jenis-jenis Pengendalian Sosial

Menurut M. Kemal Dermawan , reaksi sosial atau reaksi masyarakat terhadap kejahatan pada dasarnya terhubung dengan tujuan dari upaya pencegahan dan penganggulangan kejahatan. Dan ikhtiar dalam rangka pencegahan dan penganggulangan itulah merupakan salah satu bentuk pengendalian sosial.

Berdasarkan aspek-aspek tertentu, pengendalian sosial dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan waktu pelaksanaannya

Berdasarkan waktu pelaksanaannya, pengendalian sosial dapat dibedakan menjadi tiga bagian, berikut di bawah ini:

- a. Tindakan preventif; yaitu tindakan yang diambil oleh pihak yang berwenang sebelum terjadinya penyimpangan sosial untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Pengendalian preventif sering kali dilakukan melalui rujukan, pendidikan, dan undangan. Misalnya saja kegiatan peningkatan kesadaran yang dilakukan oleh instansi terkait mengenai bahaya penggunaan narkoba. Tindakan represif; yaitu tindakan aktif dari pihak yang berwenang ketika terjadi penyimpangan sosial untuk dapat mencegah terjadinya penyimpangan tersebut. Misalnya, guru menghukum siswa yang datang terlambat ke sekolah dan tidak teratur. Sanksi ini dimaksudkan agar perilaku menyimpang siswa tidak terulang kembali.

- b. Tindakan kuratif; tindakan ini dilakukan setelah terjadi tindakan menyimpang secara sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk membangkitkan kesadaran bagi mereka yang berbuat salah agar sadar akan kesalahannya, mempunyai kemauan dan kemampuan untuk memperbaiki kehidupannya, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Misalnya, memasukkan pecandu narkoba ke pusat rehabilitasi untuk mendapatkan konseling agar pecandu narkoba tidak kembali melakukan pelanggaran.

2. Berdasarkan sifatnya

- a. Pengendalian internal; kontrol sosial jenis ini dilakukan oleh penguasa atau pemerintah sebagai pemegang kekuasaan (kelas penguasa) untuk menjalankan kekuasaannya melalui strategi politik. Strategi politik ini dapat berupa peraturan perundang-undangan atau program sosial lainnya.
- b. Pengendalian eksternal; kontrol sosial jenis ini dilakukan oleh rakyat terhadap pemimpinnya. Hal ini dilakukan karena diyakini adanya pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh elite penguasa. Kontrol sosial jenis ini dapat dilakukan melalui aksi protes atau unjuk rasa, melalui pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau melalui wakil rakyat di DPRD.

3. Berdasarkan cara atau perlakuan pengendalian sosial

- a. Tindakan persuasif; yaitu tindakan preventif dilakukan melalui pendekatan damai dan koersif. Bentuk kontrol ini misalnya berupa mengajak atau menasihati masyarakat agar tidak berbuat salah. Misalnya, seorang guru BP menasihati dan menghimbau siswanya untuk tidak merokok.
- b. Tindakan koersif; yaitu kontrol sosial yang ditegakkan melalui paksaan. Dalam hal ini penegakan hukum

dilakukan dengan memberikan sanksi atau hukuman kepada siapapun yang melanggar tergantung pada tingkat kesalahannya. Misalnya, penertiban paksa terhadap PKL yang dilakukan petugas Satpol PP.

4. Berdasarkan pelaku pengendalian sosial

- a. Pengendalian pribadi; yaitu pengaruhnya berasal dari manusia atau dari karakter (tokoh) tertentu. Pengaruh ini bisa baik atau buruk.
- b. Pengendalian institusional; yaitu pengaruh akibat keberadaan satu atau lebih organisasi. Pola perilaku organisasi tidak hanya memantau anggota organisasi tetapi juga memantau dan mempengaruhi kehidupan orang-orang di sekitarnya.
- c. Pengendalian resmi; yaitu pengendalian atau pengawasan sosial yang dilakukan oleh lembaga resmi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan sanksi yang jelas dan mengikat. Kontrol formal dilakukan oleh otoritas negara, seperti polisi, polisi umum, kantor kejaksaan atau pengadilan, untuk memantau kepatuhan warga negara terhadap undang-undang yang ditetapkan.

D. Cara Pengendalian Sosial

Berbagai metode dapat digunakan dalam melaksanakan proses pengendalian sosial, mulai dari cara persuasif yang tidak melibatkan kekerasan hingga cara yang bersifat koersif. Bagaimana cara terbaik yang sebaiknya diterapkan, sedikit banyaknya juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seputar orang yang hendak dikendalikan dan situasi yang tengah terjadi.



Ilustrasi Pengendalian Sosial Koersif dalam kehidupan masyarakat
(Sumber: Kumparan. Com)

Menurut Selo Soemardjan, dalam masyarakat yang cenderung tenteram, penggunaan cara-cara persuasif dapat lebih berhasil daripada menggunakan paksaan. Karena dalam lingkungan yang tenang, sebagian besar norma-norma dan nilai-nilai sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari karakter masyarakatnya. Situasi seperti itu tidak selalu berarti bahwa paksaan sama sekali tidak diperlukan. Berapapun damai dan tenteramnya suatu masyarakat, selalu ada warga yang melakukan tindakan-tindakan menyimpang. Sesekali, perlu memberikan dorongan kepada mereka agar tidak mengganggu ketenangan yang sudah ada.

Mengenai pengawasan yang bersifat memaksa ini, Menurut Peter L. Berger, metode terakhir dan paling kuno adalah penggunaan kekuatan fisik yang bisa dianggap sah dan resmi jika semua upaya lainnya tidak berhasil. Namun, metode menggunakan tindakan keras atau memaksa akan menghasilkan respon yang tidak diinginkan. Ketika reaksi negatif terjadi, biasanya ia akan mengincar kesempatan dan menunggu momen di mana para penegak hukum sedang tidak waspada.

Di samping menggunakan paksaan, terdapat juga berbagai metode lain yang digunakan masyarakat untuk menjaga situasi tetap terkendali. Mekanisme-mekanisme tersebut, menurut Berger, termasuk dalam bentuk-bentuk pengaruh yang melibatkan pembujukan, sindiran, perang mulut, perendahan martabat, dan isolasi.

Pengendalian lainnya dapat dibagi berdasarkan sifatnya yaitu formal dan informal. Tindakan-tindakan seperti merayu, mempermainkan, mengejek, dan menjauhkan orang lain dapat diklasifikasikan sebagai bentuk pengendalian yang bersifat informal. Jika pengendalian diatur oleh hukum tertulis atau jika dipandang dari aspek aturan resmi lainnya, pengendalian ini dapat dianggap sebagai bersifat formal.

Pelaksanaan pengendalian sosial dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pemidanaan, kompensasi, terapi, atau konsiliasi. Patokan pemidanaan adalah aturan yang jika dilanggar, dapat menimbulkan kesulitan bagi pelanggarnya, menyebabkan pelakunya dikenakan sanksi pidana. Dalam hal kompensasi, acuan yang dipakai adalah kewajiban. Inisiatif untuk proses tersebut ada pada pihak yang merasa dirugikan atau menjadi korban, yang kemudian akan mengajukan permintaan ganti rugi dalam proses gugatan perdata. Di sini terdapat pihak yang menang dan kalah, sebagaimana di dalam proses hukuman, sifatnya cenderung akuisitor (dipaksakan).

Ada tiga jenis sanksi yang diterapkan dalam usaha penerapan pengendalian sosial, yaitu: Pertama, hukuman yang berupa perlakuan fisik. Kedua, sanksi jenis psikologik, dan Ketiga, sanksi jenis ekonomik. Namun pada praktiknya, ketiga jenis sanksi tersebut seringkali harus diterapkan secara bersamaan, tidak bisa dipisahkan. Contohnya, ketika seorang hakim menjatuhkan pidana penjara kepada seorang terdakwa, hal ini berarti, saat itu juga terdakwa menghadapi beberapa sanksi; sanksi fisik yang berarti kehilangan kebebasan fisik, sanksi psikologis yang melibatkan perasaan aib dan malu, juga sanksi ekonomis karena peluang untuk melanjutkan aktivitasnya untuk mencari penghidupan secara finansial otomatis terhenti.

Di sisi lain, agar terciptanya keserasian, pengendalian sosial juga dilaksanakan dengan memberikan insentif-insentif positif, yaitu dorongan positif yang membantu individu-individu agar dengan cepat meninggalkan kebiasaan yang keliru. Seperti halnya sanksi sebelumnya, sanksi insentif juga dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu, insentif fisik, insentif psikologis, dan insentif ekonomis.

Insentif fisik tidaklah terlalu beragam, dan juga tidak begitu mudah diperoleh. Jikalau diberikan, kenikmatan badaniah yang didapatkan tidak akan sebesar penderitaan yang dirasakan di dalam hukuman badan. Perlakuan seperti jabatan tangan, usapan di kepala, pelukan, dan ciuman tidak dapat sama rasa dengan penderitaan yang ditimbulkan oleh sanksi fisik ekstrem seperti hukuman cambuk, kerja paksa, hukum gantung, dan sebagainya. Keistimewaan hadiah tidak semata sebagai simbol, tetapi sebaliknya boleh memberi dorongan psikologi yang lebih bermakna.

E. Jenis-jenis Lembaga Pengendalian Sosial

Perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat kadang-kadang memicu perilaku menyimpang yang terjadi baik oleh individu maupun kelompok dalam masyarakat. Jika tidak segera ditangani, perilaku yang menyimpang tersebut berpotensi menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kekacauan maka tindakan pengendalian sosial perlu dilakukan.

Menurut Haris Priyatna dalam karya bukunya Kamus Sosiologi (2017), pengendalian sosial adalah cara untuk mengawasi masyarakat dengan cara yang persuasif maupun koersif untuk memastikan perilaku anggotanya selaras dengan nilai dan norma yang berlaku. Supaya pengendalian sosial bisa berjalan dengan baik, maka diperlukan keberadaan lembaga yang bertanggung jawab atas pengendalian sosial.

Dalam masyarakat, pengendalian sosial dibagi menjadi dua jenis, yakni formal dan informal. Kedua jenis ini saling

melengkapi untuk menciptakan keteraturan yang seimbang. Berikut adalah penjelasannya:

1. Jenis-jenis Lembaga Pengendalian Sosial Formal

a. Lembaga Kepolisian

Kepolisian adalah badan negara yang bertugas melindungi keamanan masyarakat dari gangguan yang dapat membahayakan kehidupan serta keutuhan mereka. Gangguan itu mungkin bisa timbul dari dalam masyarakat atau dari luar masyarakat. Fungsi utama Polri adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menjalankan penegakan hukum. Sebagai salah satu badan keamanan negara, polisi memiliki alat untuk melaksanakan fungsi pengendalian sosial dengan menggunakan hukuman yang tegas dan tertulis. Fungsi kepolisian termaktub dalam pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 yang berbunyi:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Dalam konteks sosiologis, fungsi polisi melibatkan berbagai tugas yang dianggap penting dan bermanfaat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari untuk memastikan keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka. Pelaksanaannya dilakukan dengan kesadaran dan dukungan sukarela dari masyarakat, yang kemudian menjadi bagian integral dari pola kehidupan masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka, termasuk pendirian berbagai satuan keamanan di berbagai lingkungan seperti tempat tinggal, pendidikan, dan tempat kerja.



Lembaga Pengendalian Sosial Formal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri, Jakarta)

Menurut pernyataan dari Samapta Polri⁵⁹, setiap anggota, terutama yang mengenakan seragam, diharapkan untuk melakukan tindakan kepolisian apabila menemui pelanggaran hukum. Itu adalah apa yang disebut dengan kewenangan umum kepolisian. Hal tersebut benar-benar menjadi bagian yang melekat pada jiwa setiap anggota Polri, agar dapat melaksanakan tindakan sesuai dengan wewenang yang dimiliki.

b. Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan adalah suatu institusi di mana aktivitas proses pembelajaran dilakukan. Lembaga pendidikan juga diartikan sebagai organisasi yang diciptakan untuk mencapai tujuan menyampaikan ilmu pengetahuan dan budaya kepada individu agar dapat meningkatkan perbaikan tingkah laku seseorang.

Lembaga pendidikan memegang peran penting dalam masyarakat dengan memberikan pengetahuan kepada individu dan membantu meningkatkan kualitas hidup mereka agar bisa lebih baik dalam berinteraksi dengan lingkungan. Fungsi lembaga pendidikan sangatlah urgen dalam masyarakat untuk memberikan

⁵⁹ Anton Tabah. 1991. *Menatap dengan Hati Polisi Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), hal. 81.

ilmu dan keterampilan kepada individu guna meningkatkan perilaku mereka menjadi lebih positif.

Peran lembaga pendidikan begitu vital dalam proses sosialisasi individu. Dengan mengikuti proses pendidikan, individu dapat memahami nilai-nilai sosial, norma, dan etika yang dihargai dalam masyarakat. Lembaga pendidikan turut membimbing individu agar memahami peran mereka dalam masyarakat serta mengasah keterampilan sosial yang diperlukan untuk bersosialisasi.

c. **Pengadilan**

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin bahwa warga negaranya akan menerima keadilan sesuai dengan hukum positif yang berlaku melalui kekuasaan kehakiman dan lembaga peradilan. Pasal 24 ayat (1) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi di negara yang menjalankan tugasnya tanpa adanya campur tangan.

Tugas utama dari pengadilan adalah menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara yang diajukan padanya, atau dengan kata yang lainnya, pokok dari tugas pengadilan yaitu mengadili dengan berpatokan pada hukum dan keadilan. Dalam menjalankan tugas pokok ini, Mahkamah Agung dan jajarannya terus diperbincangkan oleh para pencari keadilan dari tahun ke tahun sejalan dengan perkembangan sistem satu atap telah ditingkatkan untuk memenuhi standar layanan publik di bidang peradilan.

Menurut Profesor,. Dr. Barda Nawawi Arief, S. H, mengungkapkan bahwa sistem peradilan pada dasarnya sama dengan penerapan hukum, karena pada dasarnya peradilan adalah menguatkan keberlakuan hukum. Jadi

sebenarnya identik dengan "sistem kekuasaan kehakiman", karena intinya kekuasaan kehakiman adalah otoritas untuk menegakkan hukum.⁶⁰

Sampai sekarang, sudah dibentuk berbagai pengadilan khusus untuk memenuhi keperluan hukum dan keadilan bagi masyarakat, seperti Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial, dan Pengadilan Perikanan terletak di wilayah Peradilan Umum, sementara Pengadilan Pajak berada dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Jenis-jenis Lembaga Pengendalian Sosial Informal

Berbeda dengan pengendalian sosial formal, pengendalian sosial informal terjadi tanpa rencana dan tidak terlibat dengan lembaga resmi. Kontrol ini berlaku dalam hubungan sehari-hari antara orang-orang di dalam masyarakat. Walau tanpa dasar hukum, pengendalian informal tetap efektif dalam menjaga keteraturan sosial. Pengendalian sosial informal seringkali menggunakan pendekatan persuasif, di mana individu diarahkan untuk mengikuti norma tanpa tekanan. Namun, tekanan sosial yang kuat bisa sangat berpengaruh untuk meningkatkan kepatuhan. Berikut penjelasannya:

a. Lembaga Adat

Pengakuan serta penghormatan terhadap masyarakat adat dipertegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat 2. Pasal 18B ayat (2) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

⁶⁰ Barda Nawawi Arief. 2019. *Reformasi Sistem Peradilan, Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cet. I, (Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro), hal. 45.

masyarakat, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang- Undang.”

Pasal ini mengakui dan menghargai kehadiran serta hak-hak tradisional masyarakat hukum adat yang telah ada sejak zaman dahulu dan tetap relevan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat lokal. Pengakuan dan penghargaan negara itu bertujuan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan ketentuan tersebut, hukum adat tumbuh dan dijalankan serta dijaga sebagai peraturan untuk menjaga tata tertib sosial dan hukum di antara anggota masyarakat dengan tujuan mencegah ancaman dan tindak kejahatan yang mungkin terjadi.



Ilustrasi Lembaga Pengendalian Sosial Informal: Lembaga Adat Melayu Riau

Hukum adat adalah salah satu jenis hukum yang tetap relevan dalam kehidupan dan kebudayaan masyarakat Indonesia hingga kini. Dengan demikian, diperlukan hukum adat untuk bersama-sama mencegah dan mengatasi kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Menurut penjelasan Hardjito Notopuro seperti yang disebutkan dalam bukunya (Wulansari,

2010:4-6), hukum adat dikonotasikan sebagai hukum yang tidak tertulis, bermula dari tradisi dengan karakteristik yang unik, menjadikannya arahan panduan bagi masyarakat dalam menjalankan sistem keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara akrab dan harmonis.⁶¹

Keberadaan sanksi adat atau reaksi adat, atau koreksi adat, merupakan usaha untuk mengembalikan keseimbangan akibat gangguan tidak sesuai dengan tradisi. Sanksi adalah bagian penting dari tata kelola sosial masyarakat yang tidak dapat dianggap sama di setiap wilayah secara sosiologis. Pengendalian sosial dapat tercermin di berbagai situasi di dalam suatu kelompok tertentu, mulai dari lingkungan keluarga di rumah, hingga di lembaga pemasyarakatan yang mengatur norma-norma tentang perilaku yang sesuai dan tidak sesuai, termasuk nilai etika, tradisi, manajemen birokrasi, dan sebagainya; serta di dalam kehidupan komunitas.

Sanksi bisa jadi berfungsi sebagai bentuk penghormatan atau hadiah untuk yang bersifat baik, namun juga bisa diterapkan sebagai hukuman bagi yang bersifat negatif, sehingga pada dasarnya sanksi adalah semacam dorongan untuk bertindak atau tidak. Sehingga pengendalian sosial yang bersifat informal dalam bentuk hukum adat ini juga sangat berdampak positif terhadap keharmonisan masyarakat.

b. Lembaga Keagamaan

Lembaga agama memainkan peran yang cukup efektif dalam menjaga ketertiban sosial. Karena lembaga agama mematuhi peraturan yang didasarkan pada syariat agama. Agama Islam, sebagai contoh, mengatur aturan mengenai yang halal dan yang haram. Halal adalah yang boleh dilakukan menurut

⁶¹ Dewi Wulansari. 2010. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Cet. I, (Bandung: PT Refika Aditama), hal. 4-6

ajaran agama Islam. Sementara itu, haram adalah hal yang tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Di samping itu, agama Islam juga mempunyai ketentuan perintah yang terbagi dalam tingkatan wajib, sunnah, dan makruh.

Lembaga Keagamaan memiliki peranan yang penting dalam mengendalikan perilaku sosial masyarakat. Mereka dapat membimbing individu agar mengikuti ajaran agama, hidup sehat, patuh terhadap hukum, serta menjunjung tinggi adat istiadat. Dalam hal ini Durkheim memiliki sudut pandang bahwa agama memiliki ciri sakral dan profan yang memungkinkannya lebih efektif dalam mengcounter pemeluknya. Peran agama sebagai kontrol sosial bisa membimbing individu menjadi toleran atau intoleran, tergantung pada pemahaman dan penghayatan individu terhadap agama yang pada dasarnya abstrak. Umumnya, orang yang beragama percaya bahwa ajaran agama membawa dampak positif bagi kehidupan sehari-hari.

Keterkaitan antara agama dan masyarakat juga tercermin dalam urusan ritual. Kesatuan masyarakat dalam masyarakat tradisional sangat bergantung pada hati nurani kolektif, di mana agama juga memainkan peran yang penting, dalam hal ini masyarakat berkembang menjadi "masyarakat" karena di dalamnya setiap anggota memiliki kepatuhan pada kepercayaan dan pandangan bersama. Ritual, termanifestasi dalam mengumpulkan individu dalam sebuah upacara keagamaan, menonjolkan kembali keyakinan mereka pada tatanan moral yang ada, yang menjadi landasan dari solidaritas mekanis. Agama tampak sebagai alat integrasi masyarakat di mana praktek ritual yang dilakukan secara terus menerus menekankan ketaatan manusia terhadap agama.

Dengan demikian, agama ikut berperan dalam memperkuat rasa solidaritas.

c. Tokoh Masyarakat

Peran tokoh masyarakat sangatlah penting dalam menjaga tatanan sosial di masyarakat. Selain bertugas sebagai penjaga dan penegak nilai-nilai serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, tokoh masyarakat juga memiliki peran strategis dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul. Karena itu, peran tokoh masyarakat begitu penting dalam membimbing warganya agar tetap patuh pada aturan, nilai, dan norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat.

Seseorang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat memiliki pengaruh yang kuat dalam jalinan sosial karena mereka dihormati di masyarakat sekitar. Karena itu, peran yang dimainkan oleh tokoh masyarakat sangatlah signifikan. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1987 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 menyatakan bahwa Tokoh Masyarakat adalah “seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau pemerintah”.

Effendi memaparkan bahwa peran memiliki arti yang sangat penting ketika kita menjalankan suatu tugas atau fungsi, karena peran merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.⁶² Artinya, seseorang yang telah dipercayai harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan posisinya. Karenanya, peran tokoh masyarakat sangatlah penting dalam menjalankan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya.

Peran adalah bagian tak terpisahkan dari eksistensi manusia sebagai entitas sosial yang diharapkan mampu menjalankan tugasnya sesuai

⁶² Effendy. 2013. *Peran*, Cet. (Tangerang Selatan: Lotubooks), hal. 72.

dengan posisinya. Tokoh masyarakat memiliki peran penting sebagai contoh dalam memahami dan menjalankan nilai serta norma yang berlaku di masyarakat secara menyeluruh. Berbagai langkah bisa diambil oleh tokoh masyarakat dalam menjaga dan memperkuat nilai serta norma yang berlaku.

d. Media massa

Media massa memiliki peran penting dalam menyajikan informasi, hiburan, dan pendidikan, dan juga menjalankan fungsi sebagai alat kontrol sosial. Pengaruh media massa sangat signifikan dalam kehidupan sosial. Karena perannya yang sangat berpotensi untuk memberdayakan dan membentuk pemikiran publik sekaligus sebagai sarana berkomunikasi antar berbagai kelompok masyarakat.

Menurut Karlina, dkk (2002), media massa berperan dalam memberikan pendidikan, memengaruhi, serta membantu dalam proses pengembangan mental dan adaptasi lingkungan. Secara spesifik, media massa memiliki berbagai fungsi yang meliputi mengonfirmasi, memberikan posisi sosial, menginspirasi, merangsang solidaritas, menghormati privasi, dan menumbuhkan hubungan parasosial.

Pada masa reformasi, kebebasan pers semakin diakui seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Di dalam pasal 2 UU tersebut disebutkan bahwa “kemerdekaan pers merupakan salah satu bentuk kedaulatan rakyat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.” Sementara dalam pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa pers nasional berperan sebagai sarana informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol sosial.

Artinya, pers tidak hanya berperan sebagai wadah yang bebas dalam mencari serta menyebarkan

informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab penting sebagai pengawal demokrasi dengan rutin melakukan pengawasan terhadap lingkungan di segala tempat. Pada masa reformasi, semua pihak terdampak, termasuk individu, lembaga pemerintah, pejabat negara, bahkan presiden.

Pengaruh pemberitaan media sangat terasa dalam hal psikologi, gaya hidup, dan pandangan masyarakat. Setiap tindakan dan cara berpikir masyarakat dapat dipengaruhi oleh informasi yang disampaikan melalui media massa. Dengan begitu, apabila liputan tersebut kurang positif, maka secara tidak langsung pandangan dan tindakan masyarakat akan ikut dipengaruhi. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa peran media sangat penting dalam pembentukan perilaku masyarakat.

F. Konformitas

1. Pengertian Konformitas

Konformitas adalah ketika seseorang bertindak sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat di sekitarnya. Menurut informasi dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, konformitas yaitu proses mengikuti norma dan nilai-nilai masyarakat sebagai bentuk penyesuaian diri. Secara umumnya, kepatuhan dan ketaatan sering kali timbul dari konformitas.

Menurut Sarwono (2005), konformitas dapat dijelaskan sebagai tindakan, sikap, dan keyakinan yang ditunjukkan oleh seseorang entah karena dipengaruhi oleh tekanan kelompok atau semata-mata ingin sejalan dengan orang lain serta mematuhi norma yang berlaku.⁶³ Maksud dibalik sikap konform itu adalah untuk menciptakan kesan yang positif sehingga lebih mudah diterima oleh kelompok atau individu lainnya. Konformitas adalah sikap selaras

⁶³ Sarowono, S. W. 2005. *Psikologi Sosial, Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan*, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hal. 34.

dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, berkebalikan dengan perilaku menyimpang yang cenderung tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Menurut Kiesler (dalam Jalaludin Rahmat) menjelaskan bahwa konformitas merujuk pada perubahan dalam perilaku atau keyakinan yang mengarah ke norma kelompok yang dipicu oleh pengaruh tekanan dari kelompok, baik itu berupa situasi real atau hanya dibayangkan.⁶⁴ Cialdini dan Goldstein, mengungkapkan bahwa konformitas yaitu merujuk pada kecenderungan seseorang untuk mengubah keyakinan atau perilakunya agar sejalan dengan yang dilakukan oleh orang lain.⁶⁵

Dari berbagai definisi konformitas yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa konformitas merupakan sebuah bentuk pengaruh sosial di mana seseorang mengubah sikap dan perilakunya agar sejalan dengan norma-norma sosial yang berlaku. Sebagai contoh tindakan konformitas yang umum dilakukan adalah memberikan buah atau makanan kepada orang yang sedang sakit. Contoh lainnya, saat akan mengambil uang di ATM atau menyetor uang di bank, biasanya orang akan menunggu dengan sabar di tempat antrian.

Kuatnya pengaruh sosial pada tingkat konformitas telah terbukti melalui studi penelitian yang dilakukan oleh Solomon Asch pada tahun 1951. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa manusia umumnya cenderung melakukan konformitas dengan mengikuti penilaian orang lain karena adanya tekanan kelompok yang mereka rasakan. Penelitian lain mengenai konformitas juga dilakukan oleh Muzafer Sherif pada tahun 1936.

Salah satu alasan yang penting dalam melakukan konformitas adalah pemahaman bahwa melalui konformitas,

⁶⁴ Jalaludin Rakhmat. 1996. *Psikologi Komunikasi*, Cet. 1, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), hal. 150.

⁶⁵ Shely E, et. Al., *Psikologi Sosial*, Edisi ke 12, ter. Tri Wibowo B.S. 2009, (Jakarta: Prenada Media Group), hal. 253.

seseorang dapat lebih mudah mendapatkan persetujuan dan penerimaan yang diinginkan. Sumber konformitas yang dimaksud adalah pengaruh sosial normatif yang mencakup perubahan perilaku untuk menjawab harapan orang lain.

Contohnya, saat seseorang berada bersama temannya yang juga peduli terhadap kesehatan, dia akan menunjukkan bahwa dia menyukai buah dan ikan segar serta tidak merokok, meskipun sebenarnya dia tidak begitu menyukai makanan tersebut.⁶⁶ Dalam keadaan seperti ini, kemungkinan seseorang akan menyesuaikan perilakunya dengan norma kelompok, sehingga keyakinannya juga bisa ikut berubah.

2. Ciri-ciri Konformitas

Menurut Sarwono (2005) , ada beberapa ciri konformitas yang muncul dalam kelompok, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah kelompok, ukuran kelompok yang lebih kecil cenderung lebih memudahkan dalam hal mematuhi tata tertib daripada kelompok yang besar.
- 2) Suara bulat, mempertahankan sudut pandang akan lebih mudah jika memiliki banyak teman. Keterpaduan, semakin besar keterpaduan maka semakin besar kemauan individu untuk mengikuti kelompoknya.
- 3) Respons umum, perilaku terang-terangan yang dapat didengar atau dilihat umumnya lebih mendorong kepatuhan dibandingkan perilaku yang dapat didengar atau dilihat oleh segelintir orang.
- 4) Komitmen umum, orang yang tidak memiliki komitmen cenderung lebih mudah untuk bersikap konformitas.
- 5) Status, jika seseorang tidak memiliki status di dalam kelompok, maka ia akan cenderung untuk berusaha menyesuaikan diri agar dapat memperoleh status sesuai dengan keinginannya.

⁶⁶ E. Taylor, Shelley. 2009. *Psikologi Sosial*, edisi ke. 12, (Jakarta: Kencana), hal. 255-259.

3. Aspek-aspek Konformitas

Menurut pandangan dari Sears dan rekan-rekannya, terdapat beragam aspek yang dapat ditemui dalam hal konformitas, di antaranya :

- a. Keyakinan terhadap kelompok
Semakin kuat keyakinan seseorang terhadap kelompok sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya, semakin besar juga peluangnya untuk berintegrasi dengan kelompok tersebut.
- b. Ketidakpercayaan menilai diri sendiri. Seseorang yang yakin dengan penilaiannya sendiri akan cenderung mengurangi tingkat kepatuhannya karena ia tidak lagi melihat kelompok sebagai sumber informasi yang terdepan.
- c. Ketakutan akan kritik sosial
Alasan mengikuti konformitas adalah untuk mendapatkan persetujuan atau untuk menjauhi kritik dari kelompok.
- d. Ketakutan terhadap perilaku yang menyimpang
Seseorang yang enggan untuk mengikuti apa yang sedang terjadi di dalam kelompok akan bertanggung jawab atas kemungkinan menghadapi konsekuensi yang tidak diinginkan, tidak menyenangkan.

4. Jenis-jenis Konformitas

Menurut Myers (2012), ada dua jenis konformitas yang dapat dibedakan, yakni:

a. Pemenuhan (compliance)

Compliance didefinisikan sebagai tindakan mengikuti norma kelompok di mana seseorang bertindak sesuai dengan harapan kelompok, meskipun secara pribadi ia tidak setuju dengan tindakan itu. Tindakan ini dilakukan agar seseorang diterima dalam kelompok dan menghindari penolakan. Compliance merupakan bentuk konformitas yang bersifat patuh, di mana orang mengikuti perilaku kelompok meskipun ia tidak setuju.

Tipe konformitas ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu:

- 1) Rasa takut akan penyimpangan. Ketakutan dianggap sebagai individu yang menyimpang, adalah faktor utama yang menyebabkan kepatuhan konformitas. Ketakutan ini diperkuat oleh reaksi kelompok terhadap tindakan menyimpang. Penyimpangan dalam kelompok dapat menyebabkan seseorang menghadapi risiko yang tidak menyenangkan seperti dijauhi atau ditolak oleh kelompok.
- 2) Kekompakan kelompok. Semakin tinggi minat individu pada kelompok, maka semakin tinggi pula konformitas yang terjadi. Saat anggota kelompok berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang sama, mereka lebih cenderung untuk menyesuaikan diri dibandingkan jika mereka tidak berada dalam satu kesatuan. Ketika rasa saling suka antar anggota kelompok meningkat, maka harapan untuk mendapatkan keuntungan dari keanggotaan kelompok juga akan semakin besar dan kelompok akan semakin solid. Semakin kuat kekompakan, semakin tinggi tingkat konformitas yang terjadi.
- 3) Kesepakatan kelompok. Anggota kelompok yang menghadapi keputusan yang sudah disepakati, akan merasakan dorongan yang besar untuk menyesuaikan pandangan atau tindakan mereka. Namun jika ada satu orang yang tidak setuju dengan anggota lainnya, tingkat kesesuaian dalam kelompok tersebut akan berkurang.

b. Penerimaan (acceptance)

Acceptance merupakan suatu bentuk penyesuaian di mana sikap dan keyakinan seseorang selaras dengan pengaruh kelompok. Dalam jenis penerimaan ini, penyesuaian terjadi karena kelompok memberikan informasi krusial yang tidak dimiliki oleh individu. Acceptance adalah tipe penyesuaian yang bersifat solid, di

mana individu mengikuti tindakan kelompok karena percaya dan setuju dengan keputusan yang diambil oleh kelompok. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi konformitas Acceptance meliputi:

Pertama, Kepercayaan pada kelompok. Pertanyaan utama adalah apakah seseorang percaya pada informasi yang dimiliki kelompok. Semakin tinggi kepercayaan individu terhadap kelompok sebagai penyedia informasi yang akurat, semakin besar kemungkinan untuk beradaptasi atau mengikuti kelompok. Salah satu elemen penting dalam kepercayaan terhadap kelompok adalah kemampuan dan keterampilan yang dimiliki anggota kelompok lainnya. Semakin tinggi tingkat kemampuan dan keterampilan kelompok, maka kepercayaan individu terhadap kelompok akan semakin meningkat.

Kedua, Kepercayaan pada diri sendiri. Tingkat konformitas akan berkurang jika seseorang memiliki keyakinan yang kuat dalam menilai perilakunya sendiri. Salah satu elemen yang dapat memengaruhi kepercayaan diri adalah seberapa baik seseorang menilai kemampuannya. Faktor lainnya adalah tingkat kesulitan; semakin besar tantangan yang dihadapi, semakin rendah kepercayaan diri seseorang.

5. Faktor yang Mempengaruhi Konformitas

Berdasarkan Myers (2012), ada beberapa elemen yang dapat memengaruhi konformitas, yaitu:

(1) Budaya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang tinggal di negara dengan budaya kolektif memiliki tingkat individualitas yang rendah dan lebih suka hidup dalam kelompok dan memprioritaskan nilai-nilai kelompok. Baik sebagai anggota maupun pemimpin dalam suatu kelompok, individu cenderung menyesuaikan sikap dan perilakunya agar selaras dengan norma dan nilai yang dipegang oleh kelompok tersebut.

(2) Pengaruh dari orang-orang yang disukai. Orang-orang yang disukai memiliki dampak yang lebih kuat. Kata-kata dan tindakan mereka biasanya akan ditiru oleh individu lain yang mengagumi dan dekat dengan mereka.

(3) Kekompakan kelompok. Kekompakan dalam suatu kelompok kerap dinamakan kohesivitas. Ketika tingkat kohesivitas sebuah kelompok tinggi, maka dampaknya dalam membentuk cara berpikir dan tindakan anggota kelompok tersebut akan semakin besar.

(4) Ukuran kelompok atau tekanan sosial. Kesesuaian akan bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah anggota kelompok. Semakin besar kelompok itu, semakin besar pula dorongan kita untuk berpartisipasi, meskipun mungkin kita akan melakukan sesuatu yang berbeda dari keinginan kita.

(5) Norma sosial deskriptif dan norma sosial *injungtif*. Norma deskriptif merupakan norma yang hanya menggambarkan apa yang biasanya dilakukan oleh kebanyakan orang dalam situasi tertentu. Norma ini akan memengaruhi perilaku kita dengan cara memberikan informasi tentang apa yang biasanya dianggap efektif atau sesuai dalam situasi tersebut. Di sisi lain, norma *injungtif* berfungsi untuk memengaruhi kita dalam menentukan tindakan yang seharusnya diambil serta perilaku yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam situasi tertentu.

BAB IX

KEKUASAAN, WEWENANG, DAN KEPEMIMPINAN

A. Pengertian Kekuasaan

Kekuasaan adalah elemen yang krusial dalam kehidupan bermasyarakat karena pengaruhnya mampu memengaruhi keadaan banyak orang. Kekuasaan selalu hadir dalam masyarakat, baik yang masih sederhana maupun yang besar dan rumit. Dalam struktur masyarakat yang secara khusus dirancang untuk mencapai maksud tertentu, umumnya berhubungan dengan pembagian kekuasaan dan otoritas yang resmi dalam organisasi formal, seperti pemerintah, perusahaan, partai politik, militer, dan lain-lain.

Kekuasaan merupakan kemampuan dari seseorang atau sekelompok orang untuk memengaruhi orang lain atau kelompok lain agar mau mengikuti keinginan yang dimiliki oleh pemegang kuasa. Dalam konteks ini, kekuasaan mencakup kemampuan untuk memimpin serta membuat keputusan yang secara langsung atau tidak langsung berdampak pada tindakan individu atau kelompok yang berada di bawah kekuasaannya.

Max Weber mengartikan kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk memaksakan kehendaknya pada orang atau kelompok lain. Kekuasaan dapat diperoleh dari pengaruh pribadi, jabatan pribadi atau diperoleh dengan cara keduanya. Seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain untuk melakukan kerja karena jabatan organisasi yang dijabatnya, maka orang tersebut memiliki kekuasaan jabatan.⁶⁷

Menurut Miriam Budihardjo bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk

⁶⁷ Max Weber, *Essay in Sociology*, Oxford University Press. 1946, hal. 180, terj. Noorkholis dan Tim Penerjemah Promothia, *Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang memiliki kekuasaan. Menurut Ramlan Surbakti bahwa kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi.

John Locke mengartikan kekuasaan sebagai sesuatu yang perlu dipisahkan dan tidak boleh berada dalam satu elemen yang sama. Definisi yang diajukan oleh John Locke ini kemudian dikenal sebagai teori pembagian kekuasaan. Dalam jurnal berjudul Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam (2019) oleh Suparto, dijelaskan bahwa John Locke membagi kekuasaan menjadi tiga bagian, yaitu: Pertama, Kekuasaan legislatif bertanggung jawab untuk menciptakan peraturan dan undang-undang. Kedua, Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab untuk menerapkan undang-undang, termasuk wewenang untuk mengadili. Ketiga, Kekuasaan federatif bertugas untuk menjaga keamanan dan hubungan antarnegara.

Montesquieu memberikan definisi mengenai kekuasaan dengan membaginya menjadi tiga komponen. Ini kemudian dikenal sebagai Trias Politica. Pertama, Kekuasaan legislatif memiliki tanggung jawab untuk merumuskan undang-undang. Kedua, Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab untuk menerapkan undang-undang. Ketiga, Kekuasaan yudikatif bertugas untuk menegakkan hukum jika terdapat pelanggaran terhadap undang-undang.

Menurut Budiarjo, kekuasaan merupakan sesuatu yang bisa diperoleh oleh individu atau kelompok untuk menerapkan keahlian mereka sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kekuasaan tidak bisa digunakan melebihi batas yang telah diperoleh, atau kemampuan untuk memengaruhi perilaku orang atau kelompok sesuai dengan keinginan pelaku tersebut.⁶⁸ Kekuasaan berbeda dari kekuatan, karena kekuasaan adalah

⁶⁸ Budiarjo. 2002. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet. 1, (Jakarta: Gramedia), hal. 5.

kemampuan untuk memengaruhi orang lain sehingga individu merasa perlu mengikuti keinginan untuk memengaruhi.⁶⁹

Adapun individu yang mendapatkan kekuasaan dari pengikutnya dapat dikatakan memiliki kekuasaan secara pribadi. Meskipun demikian, ada juga yang memiliki keduanya, yaitu kekuasaan jabatan serta kekuasaan pribadi secara bersamaan. Berdasarkan metode perolehan kekuasaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kekuasaan kelompok, kekuasaan penguasa, dan kekuasaan pejabat pemerintah.

Dari sudut pandang sosiologi, tidak melihat kekuasaan sebagai hal yang positif atau negatif, tetapi sosiologi mengakui kekuasaan sebagai elemen penting dalam kehidupan masyarakat. Kekuasaan terdapat di setiap jenis masyarakat, baik yang sederhana maupun yang rumit.⁷⁰ Adanya kekuasaan bergantung pada interaksi antara pihak yang berkuasa dan pihak yang dikuasai, atau dengan kata lain, antara individu yang dapat memberikan pengaruh dan individu lain yang menerima pengaruh tersebut, baik secara sukarela maupun terpaksa. Jadi, ketika kekuasaan diartikan dalam konteks individu tertentu, orang tersebut biasanya disebut sebagai pemimpin, sementara orang-orang yang menerima pengaruhnya disebut sebagai pengikut.

Oleh karena itu, jika sebuah masyarakat ingin hidup dengan teratur dan menjaga kesatuan masyarakat, maka kekuasaan dan kewenangan harus dibagi dengan sistematis, sehingga setiap individu akan memahami dengan jelas posisi kekuasaan dan kewenangan mereka dalam organisasi, baik secara horizontal maupun vertikal

B. Unsur-unsur Kekuasaan

Kekuasaan adalah sesuatu yang akan menimbulkan unsur-unsur seperti pengaruh, kepatuhan, dan otoritas. Penggunaan kekuasaan terjadi diberbagai lapisan masyarakat,

⁶⁹ Heywood, A. (2004). *Political Theory: An Introduction*. Palgrave Macmillan, hal. 97

⁷⁰ Soerjono Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada), hal. 230

baik itu organisasi formal maupun nonformal. Kekuasaan yang dapat dijumpai pada interaksi sosial antara manusia maupun antar kelompok, seorang pekerja dengan bosnya, seorang bawahan dengan atasannya. Adapun kekuasaan itu sendiri dapat timbul berdasarkan unsur-unsur pokok antara lain sebagai berikut :

1. Rasa takut

Perasaan takut terhadap seseorang akan menghasilkan ketaatan kepada semua kemauan dan tindakan orang yang ditakuti itu. Ketakutan adalah tanda yang umum yang ada di mana-mana dan biasanya dimanfaatkan secara maksimal dalam komunitas yang memiliki pemerintahan yang otoriter.

2. Rasa cinta

Rasa cinta terhadap penguasa membuat mereka mau melakukan yang terbaik untuk orang yang mereka cintai. Seseorang bertindak sesuai dengan keinginan pihak yang memiliki kekuasaan untuk memuaskan semua pihak. Rasa cinta umumnya menghasilkan tindakan-tindakan yang baik.

3. Rasa Percaya atau Kepercayaan

Kepercayaan muncul dari interaksi langsung antara dua orang atau lebih yang saling terhubung. Dasar dari kepercayaan terbentuk karena setiap pihak sudah mengenal pihak lainnya. Dengan adanya kepercayaan, setiap keinginan satu pihak akan dilaksanakan oleh pihak lain.

4. Pemujaan

Seseorang atau sekelompok orang yang memegang kekuasaan, mempunyai dasar pemujaan dari orang lain. Apa yang dilakukan oleh pihak yang dipuja akan diikuti karena dianggap benar atau setidaknya dianggap sebagai sebuah kebenaran. Sistem keyakinan seperti ini mungkin bisa ditentang oleh orang lain, namun sistem pemujaan membawa individu dan kelompok untuk membenarkan segala hal yang berasal dari penguasa tersebut. Contoh: Kepala suku, Raja.

C. Jenis-jenis Kekuasaan

Penggunaan kekuasaan yang efektif akan meningkatkan motivasi bawahannya sehingga dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Sebaliknya, penggunaan kekuasaan yang tidak efektif oleh seorang pemimpin akan mengakibatkan dampak negatif sehingga pekerjaan atau tugas yang diberikan kepada bawahannya tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Amitai Etzioni (1961: 1-336), menjelaskan dalam mencari sumber daya kekuatan organisasi, mengusulkan penggabungan sistem yang digunakan organisasi untuk memastikan ketaatan anggotanya. Minat yang terjadi adalah bagaimana individu di dalam organisasi menyesuaikan diri dengan kebutuhan organisasi dan mematuhi norma perilaku yang diharapkan. Organisasi yang berfokus pada pencapaian tujuan dan kinerja tentu menuntut tingkat kepatuhan yang tinggi dari para anggotanya. Namun, kerap kali masalah muncul ketika anggota tidak konsisten dalam mempertahankan standar yang telah ditetapkan, hal ini biasanya disebabkan oleh rendahnya komitmen dari pihak anggota. Oleh karena itu, pengaturan kekuasaan dipegang oleh para anggota organisasi lainnya - baik oleh manajer maupun anggota lainnya.

Kepatuhan terjamin melalui pengaturan kontrol dan wewenang organisasi, struktur hirarki formal, pengawasan, penjabaran tugas, kebijakan, serta prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini menyebabkan organisasi menjadi lebih tidak tergantung pada fluktuasi dan preferensi pribadi. Terdapat pula faktor motivasi yang terlibat di sini, sebab struktur ini mempengaruhi tingkat keterlibatan individu dalam organisasi di mana ia menjadi bagian darinya. Pernyataan yang lebih sederhana adalah bahwa semakin besar tingkat komitmen individu, semakin sedikit kontrol formal yang diperlukan.

Untuk mendalami lebih lanjut tentang wewenang yang dimiliki oleh seorang pemimpin atau manajer, sosiolog asal Amerika Serikat, Etzioni, telah mengidentifikasi beragam jenis kekuasaan, yaitu:

1. Kekuasaan Utilitarian

Utility berarti kegunaan atau manfaat yang berkaitan dengan asset ekonomi. Dimana bagi mereka yang memiliki sumber daya ekonomi yang besar maka akan memiliki kekuasaan. Apa saja bisa dibeli dengan uang sehingga akibatnya nilai-nilai sosial menjadi berkurang. Contohnya: Orang kaya akan cenderung memiliki banyak pembantu karena adanya kebutuhan yang banyak yang tidak bisa diurus secara pribadi, sehingga muncul persepsi majikan dan bawahan, yang menyebabkan berkurangnya nilai-nilai sosial.

Sistem utilitarian menyediakan berbagai jenis imbalan, baik berupa benda maupun bukan benda, guna memastikan ketaatan para anggotanya. Keanggotaan dalam organisasi ditentukan oleh setiap individu yang membuat perjanjian kontrak dengan lembaga tersebut serta melakukan negosiasi mengenai imbalan yang diharapkan sebagai hasil dari ketaatan, loyalitas, keandalan, dan kontribusi mereka secara menyeluruh. Dalam sistem ini, anggota mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberi manfaat bagi mereka, seperti lembur, kenaikan gaji, promosi, penghasilan tetap, serta masa depan jangka panjang. Secara singkat, sistem utilitarian adalah kekuasaan yang bersandar pada pemberian insentif atau sanksi. Bisnis yang menerapkan kenaikan gaji, promosi, atau ancaman pemecatan dapat dianggap sebagai organisasi yang bersifat utilitarian.

2. Kekuasaan Koersif

Kekuasaan yang terjadi dikarenakan memiliki kekuatan, baik berupa kekuatan fisik, senjata dan lain-lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Contohnya: Amerika Serikat yang dijuluki sebagai negara super power, sehingga negara tersebut menjadi patokan bagi negara-negara lain dalam bidang teknologi dan kehidupan.

Sistem Koersif adalah kemampuan organisasi dalam menggunakan kekuatan fisik, pengekangan, serta rasa sakit

untuk menangani ketidakpatuhan. Sebagai contoh, mungkin termasuk fasilitas penjara atau sistem pengawasan lain yang mengatur penarikan kebebasan dan hak istimewa anggota. Terlibat dengan organisasi dari sistem kontrol koersif dapat membuat seseorang merasa terasing, cenderung pasif, serta penuh dengan perasaan negatif dan disosiasi. Suatu contoh kuat pengaruh di dalam organisasi terletak pada kemampuan yang tersirat atau jelas untuk melakukan pemecatan, penurunan jabatan, atau pemindahan ke posisi yang tidak diinginkan. Menurut Etzioni, penggunaan metode koersif cenderung memperkuat interaksi negatif dalam sebuah kelompok, seperti perasaan tidak suka, penolakan, kemarahan, konflik, persekongkolan, koalisi, dan menurunkan motivasi intrinsik.

3. Kekuasaan Normatif

Kekuasaan yang terjadi dikarenakan mereka memiliki aset yang berkaitan dengan norma-norma sosial. Biasanya mereka adalah orang-orang yang dihormati dan ditaati, dimana sikap dan perilakunya sesuai dengan norma-norma sosial di masyarakat. Dijadikan panutan dan contoh, walaupun tidak kaya.

Sosiologi tidak memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang baik atau yang buruk, namun sosiologi mengakui kekuasaan sebagai unsur penting dalam kehidupan suatu masyarakat. Kekuasaan ada dalam setiap bentuk masyarakat, baik yang bersahaja maupun masyarakat yang kompleks

Adanya kekuasaan tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai, atau dengan kata lain, antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dan pihak lain yang menerima pengaruh itu, dengan rela atau karena terpaksa, sehingga apabila kekuasaan itu diterjemahkan pada diri seseorang, biasanya orang itu dinamakan pemimpin, dan mereka yang menerima pengaruh-pengaruhnya adalah pengikut-pengikutnya.

D. Cara Mempertahankan Kekuasaan

Kekuasaan yang sudah dijalankan membutuhkan sejumlah cara atau usaha untuk tetap bertahan. Setiap pemimpin yang telah memiliki kekuasaan dalam masyarakat demi menjaga stabilitas, akan berupaya untuk mempertahankannya. Beberapa metode atau upaya yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Dengan cara menghapus semua aturan-aturan lama, terutama aturan di sektor politik, yang menguntungkan posisi penguasa. Aturan-aturan tersebut akan diganti dengan aturan-aturan baru yang akan menguntungkan penguasa. Situasi ini umumnya terjadi ketika terjadi peralihan kekuasaan dari satu penguasa ke penguasa yang lain (yang baru).
2. Membangun sistem kepercayaan (belief-systems) yang dapat memperkuat posisi penguasa atau kelompoknya. Sistem kepercayaan ini mencakup agama, ideologi, dan lain-lain.
3. Pelaksanaan yang efisien dalam administrasi dan birokrasi yang efektif.
4. Melakukan konsolidasi baik secara horizontal maupun vertikal.

E. Saluran-saluran Kekuasaan

Dalam menjalankan kekuasaan, tentunya diperlukan adanya objek penyaluran dan pembagian kekuasaan. Objek-objek penyaluran tersebut adalah alat untuk menjalankan sebuah kekuasaan. Max Weber mengelompokkannya menjadi lima, yaitu:

1. Saluran Militer

Penguasa akan lebih banyak mempergunakan paksaan (coercion) serta kekuatan militer (military force) dalam melaksanakan kekuasaannya. Dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut dalam diri masyarakat atau tunduk pada kemauan penguasa. Saluran militer adalah jalur yang paling umum digunakan oleh para penguasa untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Melalui saluran militer,

para penguasa dapat menggunakan paksaan dan kekuatan militer untuk menjalankan kekuasaan mereka.

Tujuan utama adalah untuk menciptakan ketakutan dalam masyarakat, agar mereka patuh pada keinginan penguasa atau sekelompok orang yang dianggap sebagai penguasa. Kebutuhan ini sering kali melibatkan pembentukan organisasi-organisasi atau kelompok khusus yang berfungsi sebagai badan intelijen. Fenomena ini umum terjadi di negara-negara yang bersifat otoriter.

2. Saluran Ekonomi

Penguasa berusaha untuk menguasai sendi-sendi jaringan ekonomi, sehingga penguasa dapat menyalurkan perintah-perintahnya melalui berbagai peraturan dan kebijakan ekonomi, yang membuat rakyat harus menerima kebijakan tersebut sehingga penguasa dapat lebih mudah dalam menjalankan kekuasaannya. Melalui jalur ekonomi, penguasa mencoba untuk mengendalikan kehidupan masyarakat. Dengan menguasai ekonomi dan kehidupan rakyat tersebut, penguasa menerapkan aturannya dan akan menyampaikan perintahnya dengan melibatkan saksi-saksi tertentu.

3. Saluran Politik

Penguasa dan pemerintah membuat berbagai peraturan melalui badan-badan yang berwenang dan sah yang harus ditaati oleh masyarakat agar pemerintahan dapat berjalan dengan lancar. Melalui jalur politik, para pakar dan pihak berwenang bekerja sama untuk merumuskan garis panduan yang harus diikuti oleh setiap daerah dengan cara membujuk atau menginspirasi masyarakat umum agar patuh pada pedoman yang disusun oleh lembaga yang terpercaya dan berwibawa.

4. Saluran tradisional

Dengan cara menyesuaikan tradisi pemegang kekuasaan dengan tradisi yang dikenal dalam suatu masyarakat, agar pelaksanaan kekuasaan dapat berjalan dengan lancar. Melalui tradisi, mereka yang berkuasa dapat

mempertahankan dan mengakselerasi kekuasaannya. Para pemimpin menggunakan cara-cara tradisional untuk mengakselerasi kekuasaan dengan cara menantang tradisi-tradisi para penguasa dengan tradisi-tradisi yang dikenal dalam masyarakat, tradisi-tradisi yang tertanam kuat dalam jiwa orang-orang bersangkutan. Biasanya saluran amalan ini menjadi pilihan favorit karena sesuai dengan tradisi atau adat yang berlaku di masyarakat umum sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan.

5. Saluran Ideologi

Penguasa mengemukakan ajaran, doktrin-doktrin untuk menerangkan dan memberi dasar pembenaran bagi pelaksanaan kekuasaannya yang diharapkan akan menjelma menjadi sebuah wewenang. Saluran-saluran lainnya seperti melalui alat-alat komunikasi didukung kemajuan teknologi dan komunikasi sebagai media.

Di samping itu, pemimpin yang tampil di hadapan publik cenderung memberikan perhatian khusus pada perkembangan ilmu pengetahuan atau nilai-nilai yang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas serta memotivasi dalam menjalankan kepemimpinan mereka. Hal ini dilakukan dengan cara yang terencana sehingga potensi kekuatan bisa diubah menjadi sumber daya yang bermanfaat.

6. Saluran yang berbeda

Saluran ini digunakan untuk meningkatkan pengaruhnya. Para ahli tidak hanya membatasi diri pada stasiun-stasiun yang disebutkan sebelumnya, tetapi juga memanfaatkan media massa lain, seperti pengumuman, selebaran, surat kabar, radio, televisi, pameran musik, dan hal-hal lain yang dapat menarik simpati masyarakat. Perkembangan yang pesat dalam inovasi perangkat khusus massal telah membuat saluran ini dianggap sebagai media yang vital untuk menyampaikan aktivitas kekuatan.

F. Wewenang

1. Pengertian Wewenang dan Kewenangan

Penggunaan kata “wewenang” sering kali dikonotasikan dengan kekuasaan individu yang menjabat di ranah politik. Memang benar, istilah tersebut benar-benar dapat digunakan dalam konteks yang lebih luas selain dari sekadar politik. Saat seseorang diberi kewenangan tertentu, penting baginya untuk menjalankan tugas dan wewenangnya dengan penuh tanggung jawab.

Apabila merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah “wewenang” dapat dijelaskan dalam dua definisi, yaitu pertama, ‘hak dan kekuasaan untuk mengambil tindakan’, dan kedua, ‘kewenangan dalam membuat keputusan, memberi perintah, serta menyerahkan tanggung jawab kepada individu lain’. Secara mendasar, wewenang adalah kemampuan untuk melaksanakan tindakan tertentu atau memberikan instruksi kepada individu lain demi mencapai sasaran yang ditetapkan.

Beberapa pakar juga memiliki pandangan tersendiri mengenai definisi dari konsep wewenang ini. Bernard (2003) menjelaskan bahwa wewenang dianggap sebagai batu ujian yang penting bagi kelangsungan berjalannya suatu organisasi birokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa bawahan seharusnya taat pada perintah atasan, namun bawahan juga berhak untuk menolak tugas yang diberikan kepadanya.

Webber mengartikan wewenang adalah suatu hak yang telah ditetapkan dalam suatu tata tertib sosial yang bertujuan menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai persoalan-persoalan penting untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan. Menurut pendapat Philipus M. Hadjon, dalam hukum tata negara, menjelaskan bahwa wewenang (*bevoegdheid*) dapat diartikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Dalam kerangka hukum publik, wewenang berhubungan dengan kekuasaan.

Dari segi hukum, wewenang ialah kapabilitas yang diberikan oleh peraturan hukum untuk menimbulkan konsekuensi-konsekuensi hukum. Wewenang dapat diuraikan sebagai seperangkat ketentuan yang mengatur pengadaan dan penggunaan kekuasaan pemerintah oleh pihak-pihak yang terlibat dalam hukum publik.⁷¹

Istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang kerap muncul dalam karya-karya ilmiah di bidang politik, pemerintahan, dan hukum. Kekuasaan sering kali dianggap sama dengan kewenangan, begitu pula istilah kekuasaan kerap dipertukarkan dengan kewenangan, dan bahkan wewenang pun sering disamakan dengan kewenangan. Pada umumnya, kekuasaan dapat dipahami sebagai bentuk hubungan di mana terdapat satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).

Berdasarkan definisi tersebut, terdapat kemungkinan terjadinya penguasaan yang diluar kendali hukum. Kekuasaan yang terlepas dari aturan hukum oleh Henc van Maarseven dinamakan sebagai blote match. Sedangkan kekuasaan yang berdasarkan pada hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal. Hal ini merujuk pada wewenang yang ditegakkan berdasarkan sistem hukum yang dianggap sebagai norma yang dihormati dan dijalankan oleh masyarakat, bahkan didukung oleh negara.

Wewenang minimal terdiri dari tiga elemen penting, yang terdiri dari pengaruh, dasar hukum, dan kesesuaian dengan hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan untuk mengarahkan penggunaan wewenang agar dapat mengendalikan perilaku subyek hukum. Prinsip dasar hukum menekankan pentingnya wewenang yang tertanam pada dasar hukum yang jelas serta memperjuangkan kepatuhan hukum dengan menetapkan standar yang spesifik untuk masing-masing jenis wewenang. Dari segi hukum,

⁷¹ Irfan Fachruddin. 2004. Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Cet. I, (Bandung: Alumni), hal. 4.

wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan tindakan yang berdampak secara hukum.⁷²

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam bidang hukum publik wewenang terkait dengan konsep kekuasaan. Kekuasaan memiliki arti yang serupa dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudisial adalah kekuasaan formal. Kekuasaan memiliki peran yang krusial dalam menjalankan pemerintahan suatu negara. Kekuasaan adalah kemampuan individu atau kelompok untuk melakukan apa yang mereka inginkan meskipun ada pihak lain yang bersikeras menentang.⁷³

Sedangkan kewenangan adalah merujuk pada kekuasaan resmi yang berasal dari otoritas yang diberikan oleh undang-undang atau badan legislatif, yang kemudian diterangkan oleh kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan adalah hak istimewa yang dimiliki oleh sekelompok orang tertentu atau kendali atas suatu wilayah pemerintahan atau aspek tertentu dari pemerintahan, dan wewenang terfokus pada bagian spesifik dari kewenangan tersebut. Wewenang adalah hak untuk memberikan arahan dan kekuasaan untuk meminta patuh.

2. Pendelegasian Wewenang

a. Pengertian Pendelegasian Wewenang

Salah satu hal yang sangat krusial dalam manajemen adalah pendelegasian wewenang. Ada kalanya, seseorang yang menjabat dalam suatu posisi mungkin mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas yang diberikan, entah itu karena jumlah pekerjaan yang banyak atau keterbatasan dalam keahlian yang dimiliki. Apabila semua rintangan tersebut tidak dapat

⁷² Indroharto. 2002. *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet. I, (Jakarta: Pusat Sinar Harapan, hal. 68.

⁷³ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group), hal. 73.

dipecahkan, maka kemungkinan besar akan berdampak buruk pada performa. Inilah mengapa penting untuk memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain melalui delegasi.

Pendelegasian dapat dilakukan dengan cara membagi kewenangan, tugas, tanggung jawab, hak, kewajiban yang ditetapkan dalam sebuah deskripsi tugas formil. Seseorang harus dapat mendelegasikan wewenang dan koordinasi agar mereka dapat menjalankan operasi manajemen dengan baik. Pendelegasian dilakukan agar bawahan dapat berkembang sehingga dapat memperkuat kinerja sebuah organisasi.

Dari segi etimologi, delegasi bisa diartikan sebagai penyerahan sebagian tanggung jawab dan pemberian kewenangan kepada individu lain. Dengan mengatur delegasi, bisa dikatakan bahwa seseorang memerlukan bantuan dari orang lain untuk menyelesaikan tugasnya. Delegasi adalah saat wewenang dan tanggung jawab resmi diserahkan kepada individu lain untuk melakukan tugas tertentu. Delegasi wewenang merupakan proses di mana para manajer mengalihkan kekuasaan ke bawah kepada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab mereka. Agar dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengertian delegasi wewenang. Di bawah ini akan menjabarkan pandangan para pakar, termasuk:

- a. S. P. Hasibuan menyatakan bahwa pendelegasian wewenang merupakan proses memberikan sebagian tugas atau hak oleh pihak yang mendelagasi kepada penerima delegasi untuk dilakukannya tugas itu atas nama delegator.
- b. Raleph C. Davis menjelaskan bahwa pendelegasian wewenang adalah bagian dari proses di mana wewenang diserahkan untuk melepaskan posisi dengan menjalankan kewajiban.

- c. Louis A. Allen mengungkapkan delegasi kekuasaan adalah sebagai proses yang dilakukan oleh seorang manajer dalam membagi tugas yang diberikan kepadanya. Ini memungkinkan dia untuk fokus pada pekerjaan yang hanya bisa dilakukannya karena posisi uniknya dalam organisasi, sehingga dia bisa aktif dan melibatkan orang lain untuk membantu menyelesaikan pekerjaan yang tidak bisa dia lakukan.

Menurut penafsiran dari ahli-ahli di atas, terdapat empat kegiatan yang terjalin saat delegasi dilaksanakan, yakni:

- a. Pendelegasian dilakukan dengan menetapkan serta memberikan arah dan tanggung jawab kepada rekan kerja.
- b. Pendelegasi memberikan wewenang yang diperlukan demi mencapai tujuan atau tugas yang ditetapkan.
- c. Penerimaan delegasi membawa bersamanya kewajiban atau tanggung jawab.
- d. Pendelegasi bertanggung jawab atas kinerja bawahannya dalam mencapai hasil yang diharapkan.⁷⁴

Kunci keberhasilan seorang manajer yang membedakan antara mereka yang berhasil dan tidak berhasil adalah seberapa efektif mereka dalam melakukan delegasi tugas. Tujuan utama dari pendelegasian adalah agar organisasi dapat memanfaatkan sumber dayanya dengan efisien. Namun, memberikan tanggung jawab kepada orang lain bukanlah perkara yang mudah, oleh karena itu diperlukan pertimbangan tertentu sebagai dasar dalam memberikan tanggung jawab. Beberapa faktor yang menyebabkan tanggung jawab yaitu kesamaan fungsi dan rentang manajemen.

⁷⁴ Bambang Supardi, Baktiar Nasution, *Pendelegasian Tugas dan Wewenang dalam Pendidikan Islam*, Kreatifitas Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam, ISSN 2460-9870. Online 2807-1883 Vol. 10. No. 1. Maret 2021-Agustus 2021, hal. 73-74.

Pendelegasian wewenang yang efektif adalah ketika bawahan diberi kebebasan untuk berkreasi dalam menyelesaikan tugas mereka dengan menggunakan pendekatan yang dianggap paling optimal. Karena itu, manajer mengkaji faktor-faktor yang berdampak pada efektivitas pendelegasian wewenang, sehingga bawahan dapat menerimanya dengan penuh dedikasi. Dengan cara seperti itu, bawahannya akan bekerja dengan semangat yang tinggi, penuh ketulusan, yang akhirnya akan memberikan dampak positif bagi perkembangan organisasi.

b. Jenis-jenis Pendelegasian

1) Delegasi umum

Delegasi umum adalah kelompok bawahan yang diberi kepercayaan oleh atasan untuk melaksanakan berbagai tugas manajemen esensial seperti penempatan, pengarahan, perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan.

2) Delegasi khusus

Delegasi khusus merupakan delegasi yang ditugaskan untuk tugas-tugas spesifik. Salah satu contoh yang bisa disebutkan adalah ketika seorang penjual diberikan wewenang untuk menghimpun pembayaran dari para debitur.

3) Delegasi formal

Delegasi ini telah dipilih sesuai dengan struktur organisasi perusahaan tempatnya bekerja. Dengan struktur organisasi yang telah ditentukan, atasan tidak memiliki opsi lain selain menunjuk bawahannya sebagai delegasi. Sebagai contoh, apabila seorang manajer produksi diberi wewenang untuk meningkatkan produksi jasa atau barang.

4) Delegasi Informal

Delegasi informal adalah saat bawahan langsung melakukan delegasi tanpa adanya izin resmi dari atasan. Sebagai contoh, ketika terjadi kerusakan

pada peralatan di tempat kerjanya, dia akan dengan percaya diri memperbaiki alat tersebut tanpa menunggu perintah dari atasan.

5) Delegasi Lateral

Delegasi ini diberikan wewenang yang lebih luas dibandingkan hanya satu orang atau dengan bantuan beberapa orang. Berikut adalah contoh di mana seorang manajer umum dari departemen penjualan meminta bantuan dari manajer penjualan untuk menyusun data mengenai tim penjualan. Karena tugas tersebut cukup menantang jika dikerjakan sendirian, maka dia akan memohon pertolongan kepada bagian personalia.

c. Unsur-unsur Delegasi

1) Tugas

Tugas merupakan pekerjaan yang harus dilakukan oleh seseorang yang telah ditunjuk. Dalam lingkungan perusahaan atau organisasi, penugasan tugas diberikan oleh atasan kepada bawahan atau unit kerja yang berada di tingkat yang lebih rendah.

Melaksanakan tugas merupakan salah satu kewajiban utama bagi seorang karyawan. Dengan menyelesaikan tugas secara baik, diikuti dengan hasil kerja yang memuaskan, karyawan berpotensi untuk menerima apresiasi yang pantas. Namun, jika tidak memenuhi standar yang diharapkan, akan dilakukan evaluasi.

2) Kekuasaan

Kekuasaan atau otoritas memiliki sifat yang mengalir, mulai dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah. Dari pimpinan hingga anak buah atau dari hierarki yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Seseorang yang memiliki kekuasaan harus fasih dalam menjelaskan tugas kepada rekan timnya dan mempercayakan pelaksanaannya pada orang yang cocok.

3) Tanggung jawab

Tanggung jawab merujuk pada tugas yang harus dipenuhi seseorang sesuai dengan yang diamanatkan kepadanya. Tanggung jawab merujuk pada kesadaran individu terhadap setiap tindakan, baik yang disengaja maupun tidak. Seorang delegasi diharapkan untuk selalu siap bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan oleh atasan. Terutama ketika membuat keputusan, penting untuk dapat menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut.

4) Akuntabilitas

Kewajiban akuntabilitas mengharuskan seseorang atau sebuah tim untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja yang telah dilakukan. Akuntabilitas adalah wujud dari kesadaran akan tanggung jawab untuk memenuhi harapan pihak yang memberikan tugas atau kewenangan.

d. Mekanisme Pendelegasian

Menurut Wahyuningsih (2016), proses pelimpahan wewenang dapat dimaknai sebagai pemberian tanggung jawab kepada individu atau kolektif untuk mencapai tujuan organisasi. Elemen-elemen dasar yang menjadi landasan utama keberhasilan dalam pendelegasian adalah: (1) mengutamakan delegasi bukanlah untuk menghindari tanggung jawab, tetapi sebagai upaya menjadikan tanggung jawab lebih bermakna. (2) Tugas dan wewenang harus dipercayakan secara seimbang. (3) Pelimpahan dapat mendorong seseorang untuk menunaikan tanggung jawabnya, memperluas kewenangannya, serta meningkatkan kemampuannya dalam mencapai tujuan organisasi. (4) Memberikan dukungan kepada semua anggota sangat penting, terutama untuk menciptakan suasana yang asertif.⁷⁵

⁷⁵ Wahyuningsih, A., & Yusiana, M. A. 2016. *Persepsi Perawat Tentang Pendelegasian Tugas Kepala Ruang Mempengaruhi Tingkat Kepuasan Kerja Perawat*, Jurnal Stikes RS Bapstis, Kediri, No. 9, hal. 2.

e. Kontribusi Pendelegasian Wewenang

Adanya delegasi wewenang tentu berdampak signifikan bagi suatu organisasi, baik itu dalam ranah pemerintahan maupun lembaga pemerintahan. Menurut Stoner dan Kesumanjaya (2018), pendelegasian wewenang memiliki beberapa peran penting dalam usaha mencapai tujuan organisasi, yaitu:

- 1) Melalui pemberian wewenang kepada bawahan, mereka akan dapat melaksanakan tugas-tugas yang esensial dan strategis untuk menjaga kelangsungan organisasi dengan baik. Semakin banyak tugas yang didelegasikan kepada bawahan, akan semakin besar kesempatan bagi mereka untuk menerima tanggung jawab dari manajer.
- 2) Melalui pendelegasian wewenang, pimpinan dapat memperoleh keputusan yang lebih tepat karena mendapatkan informasi langsung dari bawahannya yang lebih berhubungan langsung dengan inti permasalahan yang sedang dihadapi.
- 3) Dengan mendelegasikan wewenang, keputusan bisa diambil dengan lebih cepat karena tidak perlu selalu menunggu persetujuan dari atasan. Dalam konteks ini, penting bagi bawahan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan.
- 4) Dengan memberikan wewenang kepada bawahan, akan mendorong mereka untuk merasa lebih bertanggung jawab dan inisiatif, terutama dalam konteks organisasi.
- 5) Dengan memberikan wewenang ini, adapat memberikan kesempatan pada bawahan untuk belajar dan berkembang serta siap untuk diberikan jabatan yang lebih tinggi.

3. Jenis-jenis Wewenang

1) Wewenang Kharismatik

Kewenangan kharismatis adalah bentuk kekuasaan yang bersumber dari kharisma, yakni bakat spesial yang dimiliki atau dianugerahkan kepada seseorang oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Keberadaan wewenang kharismatis bisa berkurang jika orang yang memiliki wewenang tersebut melakukan kesalahan yang merugikan masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadapnya ikut menurun.

Wewenang ini akan tetap terjaga selama pihak yang berwenang bisa menunjukkan kualitas yang dimilikinya. Semakin besar pengaruh yang diberikan oleh pihak tersebut, semakin menguatlah kewenangannya.

2) Wewenang Tradisional

Wewenang tradisional merupakan wewenang yang bersifat kolektif dan bisa dimiliki bersama dalam suatu kelompok. Setiap anggota dalam kelompok tersebut akan diberikan wewenang.

Wewenang tradisional timbul akibat otoritas yang telah dipegang oleh suatu kelompok yang telah tumbuh dan meresap dalam masyarakat. Wewenang tradisional dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu patriakhalisme dan patrimonialisme. Berikut ini adalah penjelasan dari kedua istilah tersebut:

Pertama, Patriarkhis adalah bentuk kepemimpinan tradisional yang diterapkan oleh individu yang memiliki posisi otoritas tertinggi dalam kelompok tertentu. Kedua, Patrimonialisme muncul ketika kekuasaan terbentuk melalui kolaborasi antara individu-individu terdekat yang memiliki loyalitas dan ikatan kuat dengan pemimpin mereka.

3) Wewenang rasional atau ilegal

Kewenangan rasional atau legal adalah kewenangan yang dibentuk berdasarkan aturan dan sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Biasanya,

kewenangan ini berkembang di tengah masyarakat modern. Kewenangan ini mengikuti norma-norma yang telah disepakati bersama oleh masyarakat.⁷⁶

4) Wewenang Teritorial

Keterletakan wilayah tempat tinggal memiliki pengaruh pada tingkat kebersamaan yang dapat berkurang akibat adanya faktor individualisme. Sebagai contoh, seorang kepala daerah kota.

5) Wewenang Terbatas

Wewenang tidak merata ke seluruh bidang atau sektor kehidupan, melainkan hanya terbatas pada satu sektor saja. Wilayah yang luas memiliki batas yang terbatas. Sebagai contoh, seorang menteri pendidikan akan fokus dalam pembahasan mengenai bidang pendidikan.

6) Wewenang Menyeluruh

Kewenangannya tidak terbatas pada bidang-bidang kehidupan tertentu. Sebagai contoh, hal ini adalah mengenai kekuasaan suatu negara dalam menjaga kedaulatan wilayahnya.

4. Sumber-sumber Wewenang

Dalam ranah hukum suatu negara, prinsip legalitas hadir dengan makna bahwa wewenang pemerintahan bersumber dari regulasi yang telah diatur. Maksudnya, semua kekuasaan di pemerintahan berasal dari hukum dan tidak boleh disentuh. Kewenangan tersebut berasal dari ketentuan hukum yang dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu Atribusi, Delegasi, dan Mandat.

a. Atribusi

Yaitu ketika pembuat undang-undang memberikan wewenang kepada organ pemerintahan. Pemberian wewenang dalam hukum adalah ketika UUD 1945 atau

⁷⁶ Anjany, S.M., Mahzuni, D., & Mulyadi, R. 2021, Kuasa Ketua Hukum Adat Pada Prosesi Upacara Adat Seren Taun, Dikesepeuhan Cipta Mulya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, *Metahumaniora*, 11 (3), hal. 268-281.

Undang-Undang memberikan keleluasaan kepada lembaga negara atau pemerintahan untuk membuat peraturan perundang-undangan.

b. Delegasi

Yaitu ketika wewenang pemerintahan dialihkan dari satu badan pemerintahan ke badan pemerintahan lain. Oleh sebab itu, langkah pertama dalam sebuah delegasi adalah menetapkan atribusi wewenang terlebih dahulu.

c. Mandat

Pada saat tertentu, suatu organ pemerintahan mengizinkan organ pemerintahan lain untuk menjalankan kewenangan yang diberikan atas nama pemberi mandat. Dalam ranah Hukum Administrasi Negara, mandat tersebut mengacu pada petunjuk untuk menjalankan tugas dari atasan, dengan kewenangan yang dapat berfluktuasi sesuai dengan pemberi mandat, sehingga tidak terjadi perubahan dalam tanggung jawab.

G. Kepemimpinan

1. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan seni dalam mengajak orang-orang bersama menuju tujuan visi yang lebih besar. Terlibat dalam interaksi yang efektif, penuh empati, dan mampu mengambil keputusan sulit dengan bijaksana. Seorang pemimpin yang efektif menitikberatkan pada hasil akhir serta langkah-langkah yang ditempuh guna mencapainya. Kepemimpinan merupakan proses yang terus-menerus, dipenuhi dengan beragam tantangan dan kesempatan. Ini adalah keterampilan yang dapat dipelajari dan ditingkatkan oleh siapa pun yang berkomitmen untuk belajar.

Dalam kegiatan sehari-hari, kepemimpinan tidak hanya sebatas memberikan instruksi. Hal ini melibatkan proses mendengarkan dengan seksama, memahami perspektif yang berbeda, dan memberikan dorongan agar tim

tetap termotivasi. Seorang pemimpin yang kompeten adalah seseorang yang mampu mengenali bakat-bakat yang dimiliki oleh setiap individu di dalam timnya, memberikan mereka dukungan yang dibutuhkan, serta menciptakan suasana kerja yang memungkinkan setiap orang tumbuh dan berkembang dengan baik.

Berikut adalah beberapa definisi kepemimpinan menurut para ahli yang akan dijelaskan, sebagai berikut:

1. Warren Bennis

Menurut Warren Bennis, kepemimpinan dapat dijelaskan sebagai kemampuan untuk mewujudkan visi ke dalam kenyataan. Menurut pendapat Bennis, seorang pemimpin perlu memiliki kemampuan untuk memahami pandangan keseluruhan serta membimbing timnya menuju visi tersebut. Dikutip dari buku, *On Becoming a Leader*.

2. John C. Maxwell

John C. Maxwell mengemukakan bahwa seorang pemimpin adalah sosok yang memahami dan mengikuti jalan yang benar, serta pandai menunjukkan jalan tersebut kepada orang lain. Dia memberikan penekanan pada pentingnya integritas serta konsistensi dalam kepemimpinan. Bersumber dari buku, *The 21 Irrefutable Laws of Leadership*.

3. Peter Drucker

Menurut Peter Drucker, esensi kepemimpinan bukanlah menciptakan pengikut, melainkan mendukung lahirnya lebih banyak pemimpin. Seorang pemimpin yang baik adalah orang yang menciptakan lingkungan yang membuat setiap individu merasa dihargai dan termotivasi untuk tumbuh. Diambil dari buku *The Essential Drucker*.

4. Jim Collins

Jim Collins menggambarkan bahwa kepemimpinan adalah hasil dari kombinasi kerendahan hati pribadi dan kekuatan kehendak profesional. Pemimpin yang luar

biasa lebih memprioritaskan tujuan organisasi dibandingkan mencari pengakuan pribadi. Diambil dari buku "Good to Great".

5. Daniel Goleman

Daniel Goleman menyoroti betapa esensialnya kecerdasan emosional dalam dunia kepemimpinan. Pemimpin yang memiliki tingkat kecerdasan emosional yang tinggi memiliki kemampuan untuk memperkuat hubungan serta menciptakan suasana kerja yang damai. Sumbernya berasal dari Emotional Intelligence.

Pendapat dari para ahli ini mencakup beragam sudut pandang mengenai kepemimpinan, termasuk mulai dari visi dan integritas hingga pemberdayaan dan kecerdasan emosional. Setiap pengertian memberikan wawasan tentang cara menjadi pemimpin yang efektif serta mampu menginspirasi orang lain.

2. Perbedaan Pemimpin dan Kepemimpinan

a. Pemimpin

Seorang pemimpin merupakan sosok yang memiliki peran sentral dalam membimbing dan menginspirasi orang lain. Mereka adalah individu yang berada di posisi terdepan, memikul tanggung jawab, dan mengambil keputusan krusial. Pemimpin dapat berasal dari latar belakang apa pun dan memiliki karakter yang berbeda, namun semuanya memiliki kemampuan untuk memengaruhi dan membimbing anggota tim mereka. Sebagai ilustrasi yang mudah dipahami, bayangkanlah Anda sebagai seorang kapten tim sepak bola yang memimpin rekan-rekan dengan strategi yang cerdas dan semangat yang membara menuju kemenangan.

b. Kepemimpinan

Kepemimpinan, pada sisi lainnya, mengacu pada proses atau seni dari bertindak sebagai seorang pemimpin. Ini meliputi beragam keterampilan, strategi, serta pendekatan yang digunakan untuk memotivasi dan

membimbing orang lain. Kepemimpinan bukanlah hak mutlak seseorang, melainkan kemampuan yang dapat dimiliki oleh siapa pun yang mampu menginspirasi dan mendorong orang lain. Hal ini ibarat seperti menyatukan berbagai bahan dan teknik dalam memasak untuk menciptakan hidangan yang sempurna terasa seperti seni yang indah.

3. Teori Kepemimpinan Menurut Para Ahli

Demi meraih tujuan bersama, organisasi, kelompok, atau perusahaan membutuhkan seorang pemimpin yang mampu membimbing anggotanya untuk mencapai kesuksesan bersama. Seorang pemimpin yang diperlukan harus memiliki kualitas kepemimpinan yang baik sebagai bagian dari manajemen. Peran kepemimpinan sangat penting dan krusial dalam meningkatkan kinerja individu serta keseluruhan organisasi. Karenanya, penting untuk memahami secara menyeluruh teori-teori kepemimpinan, termasuk tujuan, fungsi, dan beragam gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan.

Di bawah ini dijelaskan teori kepemimpinan menurut para ahli, yaitu:⁷⁷

1) Teori Sifat (*Trait Theory*)

Teori yang mencoba mengidentifikasi karakteristik yang khas (aspek fisik, mental), dan kepribadian ini seringkali dikaitkan dengan keberhasilan dalam kepemimpinan. Teori ini menggarisbawahi pentingnya atribut-atribut pribadi dari para pemimpin. Prinsip pokok dari teori tersebut adalah keyakinan bahwa ada beberapa individu yang secara alami memiliki bakat kepemimpinan dan dikaruniai dengan beberapa karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain, seperti energi yang tak pernah habis, intuisi yang mendalam, kemampuan

⁷⁷ Encep Syarifudin. 2004. *Teori Kepemimpinan*, *Jurnal Al Qalam*, Vol. 21, No. 102, hal. 467.

meramal yang luar biasa, dan kekuatan persuasif yang sangat kuat.

Pada teori ini mencoba untuk menemukan karakteristik yang dapat digunakan untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin yang efektif. Namun, teori ini juga menyatakan bahwa seorang pemimpin dapat belajar dan mengembangkan keterampilan untuk menjadi pemimpin yang lebih efektif. Menurut teori kepemimpinan ini, keberhasilan dalam manajerial terjadi karena adanya kemampuan-kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh seorang pemimpin.

2) Teori Perilaku (*Behavioral Theory*)

Menurut teori perilaku, kepemimpinan dianggap sebagai keterampilan yang bisa dipelajari dan ditingkatkan. Poin utamanya adalah pada langkah dan tingkah laku pemimpin, bukan sifat-sifat bawaan yang mereka miliki. Seperti belajar bermain gitar mirip dengan proses memahami – dengan tekun dan komitmen, siapa pun dapat menjadi seorang gitaris yang mahir. Pemimpin yang efektif biasanya menunjukkan perilaku yang positif seperti komunikasi yang lancar dan kemampuan memotivasi anggota tim.

3) Teori Situasional (*Situational Theory*)

Sebuah pendekatan terhadap kepemimpinan yang menjelaskan bahwa pemimpin perlu memahami perilaku, karakter dari bawahannya, dan situasi sebelum menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai. Pendekatan ini menekankan perlunya kemampuan diagnostik dalam perilaku manusia bagi seorang pemimpin.

Teori ini yang dikembangkan oleh Paul Hersey dan Ken Blanchard menyatakan bahwa penting bagi seorang pemimpin untuk dapat menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka dengan tingkat kesiapan dan kompetensi dari para pengikut. Mirip dengan seorang

pelatih yang menyesuaikan cara melatihnya berdasarkan keterampilan dan semangat masing-masing pemain.

Teori ini juga menyatakan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi. Sebagai pemimpin, sangat penting untuk bisa beradaptasi dengan berbagai situasi yang berbeda. Teori ini menggarisbawahi bahwa kemampuan pemimpin untuk mengevaluasi situasi dan menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai kebutuhan anggotanya sangatlah krusial.

4) Teori Transformasional (*Transformational Theory*)

Teori ini memandang pemimpin sebagai sosok yang menjadi agen perubahan yang mampu memberi inspirasi serta motivasi kepada tim mereka untuk meraih tujuan yang lebih tinggi. Pemimpin transformasional berpusat pada upaya meningkatkan kemampuan anggota tim serta mendorong terciptanya inovasi. Mereka adalah seperti pelatih olahraga yang tidak hanya mengasah keterampilan teknis, tetapi juga memupuk semangat dan motivasi tim untuk meraih kesuksesan.

5) Teori Transaksional (*Transactional Theory*)

Pemimpin transaksional memandu atau menggerakkan pengikut mereka menuju tujuan tertentu dengan menjelaskan peran dan tanggung jawab mereka. Teori ini memandang bahwa pemimpin memiliki peran penting dalam memberikan penghargaan dan hukuman kepada bawahannya berdasarkan kinerja yang telah dicapai oleh bawahan. Seorang pemimpin perlu memiliki kemampuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis sehingga anggota tim dapat bekerja secara optimal. Dalam teori ini, fokus diberikan pada kemampuan manajerial kepemimpinan di mana pemimpin diharapkan mampu efektif mengelola sumber daya manusia serta mencapai sasaran organisasi dengan baik.

6) Teori Karismatik (*Charismatik Theory*)

Teori Charismatic menekankan betapa pentingnya sifat-sifat kepribadian pemimpin yang mampu menginspirasi orang lain untuk mengikuti mereka. Kepribadian ini dipandang sebagai “daya tarik yang memukau” yang mampu menarik perhatian orang lain dan membuat mereka terpicu untuk mengikuti pemimpin tersebut. Menurut teori ini, kehadiran seorang pemimpin yang karismatik mampu meningkatkan semangat, loyalitas, dan kinerja anggota timnya.

7) Teori Kecerdasan Emosional (*Emotional Intelligence Theory*)

Teori ini menyoroti betapa krusialnya kecerdasan emosional dalam menjalankan kepemimpinan. Pemimpin yang efektif memiliki kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi mereka sendiri, sekaligus memahami serta memengaruhi emosi orang lain. Mereka adalah seperti para ahli dalam diplomasi yang mahir dalam mengarungi situasi sosial yang rumit dengan penuh empati dan keahlian interpersonal yang mendalam.

Memahami konsep kepemimpinan melalui berbagai teori dapat membantu kita untuk berkembang menjadi pemimpin yang lebih efektif. Setiap situasi memerlukan pendekatan yang berbeda, karena setiap teori menawarkan beragam wawasan bermanfaat untuk menyemangati, memotivasi, dan membimbing tim. Pemimpin yang luar biasa dapat menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka sesuai dengan keadaan dan kebutuhan tim yang mereka pimpin.

4. Peran dan Fungsi Kepemimpinan

a. Peran Kepemimpinan

Salah satu tanda kinerja organisasi yang berhasil adalah keberhasilan seorang pemimpin dalam memengaruhi anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Pentingnya dalam suatu organisasi kelompok adalah peran pemimpin, yang dapat berjalan secara

efektif apabila gaya kepemimpinan yang diusung sesuai dengan anggota bawahannya. Menurut Merton (2007: 67), peran merupakan tindakan-tindakan yang diharapkan masyarakat dari individu yang menduduki posisi penting untuk mewujudkan kehidupan yang lebih teratur.

Dalam posisi tersebut, seorang pemimpin mampu mengontrol dan memberikan pengaruh pada situasi. Cara seseorang memimpin tercermin dalam sikap dan tindakan mereka secara keseluruhan, yang terlihat melalui cara mereka berbicara dan bertindak sebagai bagian dari suatu organisasi. Pemimpin memiliki peran yang krusial dalam menangani segala kebutuhan dan kepentingan yang dimiliki anggota. Mereka terlibat dalam kegiatan organisasi guna memfasilitasi penyelenggaraan pekerjaan dengan lebih efisien. Dengan arahan dari pimpinan, keterkaitan antara tujuan individu dan organisasi semakin kokoh, sehingga menyebabkan anggota bekerja untuk mencapai tujuan pribadinya daripada hanya fokus pada pencapaian tujuan organisasi.

Peranan kepemimpinan memegang posisi yang penting dalam struktur suatu organisasi. Menurut Baharudin dan Umiarso (2012), kehadiran para pemimpin memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek seperti kepuasan, kenyamanan, rasa aman, kepercayaan, dan terutama tingkat prestasi dalam sebuah organisasi. Maka, kepemimpinan dianggap sebagai kunci dalam manajemen yang memiliki peran yang signifikan dan strategis dalam kesinambungan sebuah bisnis.⁷⁸

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sayadi et al. (2016) menunjukkan bahwa kepemimpinan memiliki korelasi positif dengan kinerja organisasi. Artinya, jika seorang pemimpin mampu membimbing dengan baik anggotanya dan menunjukkan sikap kepemimpinan yang

⁷⁸ Baharudin, B., & Umiarso, U. 2012. *Kepemimpinan Pendidikan Islam; Antara Teori dan Praktek*, Cet. I, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), hal. 6

baik, maka kinerja organisasi secara keseluruhan juga akan semakin baik.

Menurut Henry Mintzberg, Peran Pemimpin dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut:

- a) Peran sebagai penghubung antar perorangan, dalam kasus ini fungsinya sebagai pemimpin yang dicontoh, pembangun tim, pelatih, direktur, dan mentor konsultasi.
- b) Peran informal sebagai monitor, penyebar informasi dan juru bicara.
- c) Peran Pembuat keputusan, berfungsi sebagai pengusaha, penanganan gangguan, sumber alokasi, dan negosiator.

Seseorang yang berada dalam posisi atau status tertentu di suatu lingkungan, entah itu dalam masyarakat atau dalam sebuah organisasi, ketika mereka menjalankan kewajiban dan haknya secara bijaksana untuk melakukan suatu tindakan, mereka dapat dikatakan sedang memainkan peran.

b. Fungsi Kepemimpinan

Fungsi kepemimpinan mencerminkan kondisi ideal mengenai lingkungan kerja yang tercapai melalui berbagai perilaku kepemimpinan. Karenanya, sangat dibutuhkan fungsi kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja sebuah organisasi. Dengan terciptanya kerjasama yang solid antara berbagai fungsi kepemimpinan di dalam organisasi, maka dapat tercapai kinerja organisasi yang efektif. Maka, peranan kepemimpinan pun dapat berfungsi sebagai penengah yang menyeimbangkan pengaruh variabel lainnya.

Kepemimpinan memegang peranan kunci dalam pertumbuhan organisasi, pasalnya tanpa kepemimpinan yang efektif, pencapaian tujuan organisasi akan terasa sulit dicapai. Fungsi seorang pemimpin adalah untuk memberikan panduan, arahan, bimbingan,

membangkitkan semangat kerja, mengelola organisasi, menjaga komunikasi yang efektif, melaksanakan pengawasan secara konsisten, serta mengarahkan bawahannya menuju tujuan yang diinginkan.

Kartini Kartono dalam Thoha (2010)⁷⁹ mengemukakan bahwa fungsi kepemimpinan adalah untuk mengarahkan, mendorong, membimbing, memotivasi, mengarahkan, mendukung kerja, membentuk organisasi, memperkokoh jaringan komunikasi yang positif, memberikan pengawasan yang efektif, serta membimbing para pengikut menuju target yang sesuai dengan target waktu dan rencana yang telah disusun.

Diungkapkan oleh Nawawi (1995)⁸⁰, terdapat lima fungsi pokok kepemimpinan yang dapat dibedakan secara operasional, yaitu: University Press

a. Fungsi Instruktif

Fungsi ini berjalan dengan sifat yang bersifat komunikasi satu arah. Sebagai pemimpin, tugasnya adalah mengambil keputusan dan memberi perintah kepada bawahannya. Sebagai pemimpin yang menjadi komunikator, ia memiliki peran penting dalam menentukan apa yang harus dilakukan (isi perintah), bagaimana (cara melaksanakan) perintah tersebut, kapan (waktu) yang tepat untuk memulai, melaksanakan, dan melaporkan hasilnya, serta di mana tempat yang sesuai untuk melaksanakan perintah tersebut guna mencapai keputusan yang efektif.

b. Fungsi Konsultatif

Fungsi ini beroperasi secara dua arah yang melibatkan komunikasi, walaupun tingkat

⁷⁹ Thoha, M. 1998. *Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa dan Intervensi*, Cet. I, (Jakarta: Rajawali Pers), hal. 45.

⁸⁰ Nawawi, H. 1995. *Kepemimpinan yang Efektif*, Cet. I, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), hal. 70.

efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kemampuan pihak pimpinan. Dalam tahap awal ketika sedang mempertimbangkan keputusan, pemimpin sering kali memerlukan masukan dari orang-orang yang dipimpinya, sehingga perlu berkomunikasi dengan mereka. Konsultasi hanya dapat dilakukan secara terbatas dengan orang-orang tertentu yang dianggap memiliki berbagai informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan.

c. Fungsi Partisipasi

Fungsi ini tidak hanya berjalan searah dan saling berhubungan, melainkan juga menjadi implementasi yang efektif dari hubungan yang baik antara pemimpin dan bawahan. Dalam menjalankan tugasnya, seorang pemimpin berusaha mendorong partisipasi aktif dari orang-orang yang dipimpinya, baik dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaannya. Setiap anggota di tim diberikan kesempatan yang setara untuk ikut serta dalam menjalankan aktivitas yang telah dijelaskan berdasarkan tugas pokok mereka, sesuai dengan posisi atau jabatan yang mereka emban.

d. Fungsi Delegasi

Fungsi ini dapat dijalankan dengan memberikan kewenangan untuk membuat keputusan, baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan dari pimpinan. Fungsi delegasi adalah memberikan kepercayaan. Seorang pemimpin perlu bersikap terbuka dan dapat mempercayai orang lain sesuai dengan jabatannya ketika diberi tanggung jawab tambahan.

e. Fungsi Pengendalian

Maksud dari fungsi pengendalian adalah bahwa kepemimpinan sukses mampu mengelola aktivitas anggotanya dengan teratur dan koordinasi yang efektif, sehingga tujuan bersama dapat dicapai secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi

pengendalian dapat dilaksanakan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan.

c. Konsep Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam masyarakat Indonesia memiliki konsep tradisional namun masih sangat relevan digunakan dalam perkembangan zaman sekarang. Ajaran tradisional di Jawa menggambarkan tugas seorang pemimpin melalui pepatah: "*Ing ngarsa sung tulada, Ing madya mangun karsa, Tut wuri handayani*". Pepatah tersebut sering dipergunakan oleh Ki Hajar Dewantara, yang apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia memiliki arti : "Di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan".

Seorang pemimpin yang berkualitas harus memiliki keyakinan yang kuat pada nilai-nilai yang diyakininya serta memiliki kemampuan untuk mengomunikasikan visinya kepada masyarakat dengan cara yang mudah dipahami, hal ini dikarenakan tugasnya adalah untuk menetapkan arah dan tujuan yang jelas bagi masyarakat yang dipimpinnnya, serta mengatasi segala hambatan yang timbul demi mewujudkan tujuan tersebut.

Seorang pemimpin yang berada di pusat perhatian selalu mampu memantau perkembangan organisasi dengan penuh perhatian, dan merasakan perasaan senang dan sedih dari orang-orang di sekitarnya. Di tengah-tengah, diharapkan pemimpin mampu menggambarkan dan memahami perasaan serta keinginan masyarakat agar dapat diperbaiki. Pemimpin di belakang diharapkan memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan masyarakat secara baik. Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perkembangan masyarakat tetap sesuai dengan norma dan nilai yang dihargai oleh masyarakat.

TENTANG PENULIS



Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H. Lahir di Padang Ratu Lampung Utara, 26 Juni 1984. Menamatkan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di tempat kelahirannya di Sungkai Utara. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMU Negeri 44 Jakarta. Penulis adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2007, dan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia tahun 2012 dan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung selesai tahun 2024. Sejak tahun 2015 menjadi Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

Sebelum menjadi Dosen penulis pernah mengabdikan selama delapan tahun di Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat ini penulis juga aktif sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Zainudin Hasan & Partners dan sebagai Advokat di Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Cabang Lampung. Sebagai Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kota Metro, Lampung Tengah, dan Lampung Timur (2019-2023). Sebagai Tim Ahli Hukum Gubernur Lampung (2019-2024), Tenaga Ahli di DPRD Kota Bandar Lampung dan Tenaga Ahli di DPRD Provinsi Lampung (2024).

Penulis aktif sebagai peneliti dan penceramah diberbagai seminar ditingkat lokal, nasional dan internasional. Telah banyak menulis opini, artikel, jurnal, dan buku antara lain pada media Lampung Post, Lintas Lampung, Jurnal Pranata Hukum, Jurnal

Keadilan Progresif, menulis buku monograf tentang “Perkembangan Hukum di Indonesia” (2017), dan buku tentang “Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba melalui media terapi musik dalam perspektif Pidana Ekonomi” (2018), “Sosiologi; Hukum, Masyarakat, Dan Kebudayaan Integrasi Nilai Sosial Untuk Pembangunan” (2024).

DAFTAR PUSTAKA

- Anton Tabah, Menatap dengan Hati Polisi Indonesia, Cet. I, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Anthony Giddens, Kapitalisme dan Teori Sosial Modern: Suatu Analisis karya tulis Marx, Durkheim dan Max Weber, diterjemahkan oleh Soeheba Kramadibrata, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Becker, H.S, Outsiders. In E. Rubington, & M. S. Weinberg, Deviance: The Interactionist Perspective (pp. 10-13). Needham Heights, MA: Allyn and Bacon, 1996.
- Barda Nawawi Arief, Reformasi Sistem Peradilan, Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Cet. I, Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2019.
- Baharudin, B., & Umiarso, U, Kepemimpinan Pendidikan Islam; Antara Teori dan Praktek, Cet. I, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Gramedia Jakarta, 1986.
- Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, Cet. I, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- David O'Sears, et. al., Psikologi Sosial Jilid 2, ter. Michael Adryanto, Jakarta: Erlangga, 1985.
- E Taylor, Shelley, Psikologi Sosial, edisi ke. 12, Jakarta: Kencana, 2019.
- Effendy, Peran, Cet. 1, Tangerang Selatan: Lotubooks, 2013.
- E. Taylor, Shelley, Psikologi Sosial, edisi ke. 12, Jakarta: Kencana, 2009.
- Grusky, David B.ed, Social Stratification, Class, Race And Gender, Boulder-San Fransisco-Oxford: Westview Press, 1994.
- Henslin, James M. Essential of Sociology : A Down-to-Earth Approach (Sosiologi dengan Pendekatan Membumi). Penerjemah: Kamanto Sunarto. Jakarta: Penerbit Erlangga, Jakarta, 2007.
- Herimanto dan Winarno. Ilmu Sosial & Budaya Dasar, PT. Bumi Akasara, Jakarta, 2009.

- Horton, Paul B.- Hunt, Chester L, Sosiologi, (terj.)edisi keenam, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1992.
- Horton, P. B & Hunt, C. L, Sosiologi, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991.
- Indroharto, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, Cet. I, (Jakarta: Pusat Sinar Harapan, 2002.
- Johnson, Doyle Paul, Teori Sosiologi Klasik Dan Modern, terj. Jilid 1 - 2. PT Gramedia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Julyati Hisyam, Sosiologi Perilaku Menyimpang, (Jakarta: LPPS Press Universitas Negeri Jakarta, 2015.
- Jalaludin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, Cet. 1, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996.
- Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Cet. I, Bandung: Alumni, 2004.
- Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Djambatan, Jakarta 1988
- Margaret M. Poloma, Sosiologi Kontemporer, Rajawali Press, Jakarta 1984.
- Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2019.
- Merton, Robert K, Social Theory and Social Structure, New York: The Free Press, 1967.
- M. Kemal Dermawan, Strategi Pencegahan Kejahatan, Cet. I, Bandung: Citra Aditya, 1994.
- Myers, D.G, Psikologi Sosial, Cet. 1, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Max Weber, Essay in Sociology, Oxford Univercity Press. 1946, hal. 180, terj. Noorkholis dan Tim Penerjemah Promothea, Sosiologi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Mas Ahmad Yani, Pengendalian Sosial Kejahatan, Jurnal Cita Hukum. Vol. II No. ISSN: 2356-1440, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Nandang Burhanudin, Al-Qur'an Mushaf al-Burhan Edisi Tajwid, Bandung: Media Fitrah Rabbani, 2011.
- Nawawi, H, Kepemimpinan yang Efektif, Cet. I, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.

- Lemert, E.M. 1951. *Social Pathology*, New York: Mc Graw-Hill, 1951.
- Pitirin Sorokin, *Contemporary Sociological Theories*, Harper & Row, New York, and Evanston, 1928.
- Peter L. Berger, *Invitation to Sociology : A Humanistic Perspective*, Harmondsworth, Middlesex : Penguin Books, 1978.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2014.
- Roucek dan Warren, *Sociology, An Introduction*, Peterson, New Jersey: Littlefield, Adam & Co, 1962
- Sanderson, *Sosiologi Macro, Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Selo Soemardjan-Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1964.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko, *Pengantar Konsep dan Teori Sosiologi*, Universitas Lampung Press, 1984
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. I, Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Suardi. M.Pd., M.Pd, *Sosiologi Komunitas Menyimpang*, Yogyakarta: Penerbit Writing Revolution, 2018.
- Soleman B. Taneko, *Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, CV. Rajawali Press, Jakarta, 1990.
- Stephen K. Sanderson, *Sosiologi Makro Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, CV. Rajawali Press, Jakarta, 1993.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Cet. I, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Schur, E.M, *Capling Women Deviant: Gender, Stigma, and Social Control*, New York: Random House, 1984.
- Sagarin, E. *Deviants and Deviance: An Introduction to the Study of Disvalued People an Behaviour*. New York: Holt, 1975.
- Sunarto, Kamanto, *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*, Cet. I, Jakarta: Erlangga, 2007.

- Sarowono, S. W, Psikologi Sosial, Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan, Cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Shely E, et. Al., Psikologi Sosial, Edisi ke 12, ter. Tri Wibowo B.S, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Thoha, M, Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa dan Intervensi, Cet, I, Jakarta: Rajawali Pers, 1998.
- William F. Ogburn dan Mayer F Nimkoff, Sociology, Edisi keempat, Boston: Apfeffer an Simons International University Edition, Toughton Mifflin Company, 1964.